PEMBANGUNAN EKONOMI

Pasar, Struktur Ekonomi,
Pendidikan dan
Pengurangan Kemiskinan

YULHENDRI

Pembangunan Ekonomi Pasar, Struktur Ekonomi, Pendidikan dan Pengurangan Kemiskinan

Yulhendri

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA
PASAL 72 KETENTUAN PIDANA SAKSI
PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pembangunan Ekonomi Pasar, Struktur Ekonomi, Pendidikan dan Pengurangan Kemiskinan

Yulhendri, S. Pd., M. Si.

Penerbit
Universitas Negeri Padang Press

**Yulhendri,
Pembangunan Ekonomi
/Yulhendri
Penerbit UNP Press, Padang, 2009
1 (satu) jilid; 176x250 mm (B5)
144 hal.**

Pembangunan Ekonomi

ISBN : 978-979-8587-79-5

1. Ekonomi 2. Pembangunan

1. UNP Press Padang

**PEMBANGUNAN EKONOMI: PASAR, STRUKTUR EKONOMI,
PENDIDIKAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN**

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

Hak penerbitan pada UNP Press

Penyusun: *Yulhendri, S. Pd, M. Si*

Editor: *Tim Editor UNP Press*

Layout: *Drs. Nasbahry Couto. M. Sn.*

Book Antique, 11, pt

Desain Sampul: *Nasbahry Couto*

Kata Pengantar

Pada era pemerintahan reformasi sekarang, ada kecenderungan para perancang kebijakan kebanyakan berasal dari ekonom yang pro pasar. Mereka meyakini bahwa pasar sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan. Namun mereka lupa bahwa pasar juga memiliki keterbatasan, khususnya pada ketidakterpenuhan kondisi Indonesia saat ini pada asumsi pasar persaingan sempurna. Perekonomian yang mengandalkan pasar akan menyebabkan ketidakadilan ekonomi yang semakin tinggi, karena pelaku ekonomi di pasar tidak memiliki kemampuan finansial dan informasi yang sama. Disamping itu, pasar juga menimbulkan eksternalitas negatif diantaranya adalah kesenjangan, polusi, pengangguran dan kemiskinan.

Untuk itu, perlu peran pemerintah dalam menjaga agar perekonomian bisa berjalan dengan adil dan tercipta kesejahteraan. Joseph E. Stiglitz (2003), seorang ekonom dan peraih hadiah nobel ekonomi menjelaskan benih-benih kehancuran ekonomi dunia sebagai akibat dari terjadinya keserakahan umat manusia, gelembung ekonomi (*economic bubble*) karena 1) pertumbuhan harga aset tidak lagi terkait dengan nilai yang dikandungnya; 2) kegairahan *irrational* ekonomi, yakni adanya kecenderungan harga yang tidak masuk akal pada saham-saham tertentu atau produk tertentu; 3) akuntansi perusahaan menyajikan informasi yang keliru karena adanya konflik kepentingan atas laporan keuangan tersebut; dan 4) pemotongan tarif pajak (*capital gains*). Kondisi tersebut diperparah kegagalan pemerintah sebagai penyeimbang pasar dan pertumbuhan "murah" yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dan "pelitnya" investasi di sektor pendidikan, infrastruktur dan riset dasar

Buku ini mencoba memaparkan tentang pasar, dan kegagalan pasar menciptakan keadilan ekonomi. Pada bagian kedua mencoba menelaah kondisi perekonomian Indonesia dan dilanjutkan dengan faktor pendidikan

dalam perekonomian, dan perlunya penciptaan pelaku ekonomi yang rasional.

Semoga buku ini bisa menambah khasanah pemikiran ekonomi, dan pendidikan di negeri ini, dan saran dan kritik yang membangun amat diharapkan.

Padang, 2009
Penulis,

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PEMBANGUNAN EKONOMI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Warna Pemikiran Ekonomi	3
C. Perkembangan Pemikiran Ekonomi	4
D. Pembangunan Ekonomi	9
E. Pasar yang Tidak Sempurna dan Informasi Asimetris	12
F. Mengenal Ekonomi Institutional	17
G. Kehancuran Sosialisme, Kapitalisme dan Titik Temu Pembangunan Ekonomi	20
BAB II PARADIGMA PEMBANGUNAN	27
A. Asumsi	27
B. Paradigma Pembangunan	28
BAB III PEMBANGUNAN EKONOMI, PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA (Kajian Makro)	45
A. Transformasi Ekonomi dan Distribusi Pendapatan	48
B. Kesimpulan	54
BAB IV ANALISIS IMPOR, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	55
A. Perkembangan Nilai Impor Indonesia (1996 - 2005)	55
B. Perkembangan Jumlah Pengangguran tahun 1996 - 2005	61

C. Impor dan Pengangguran	64
D. Kesimpulan	73
E. Implikasi	74
 BAB V WACANA PENGURANGAN KEMISKINAN	75
A. Pendidikan untuk Anak Keluarga Miskin	75
B. Upaya Makro dan Mikro	84
C. APBN 5% untuk Pendidikan Anak RT Miskin	87
D. Investasi Modal Manusia dan Pengurangan Kemiskinan	91
E. Upaya Rumah Tangga dan peran Pemerintah dalam Memperbaiki Standar Hidup Orang Miskin	94
F. Memberdayakan Keluarga Miskin	97
G. Re-distribusi Sebagai Solusi untuk Mengatasi Kemiskinan	100
H. Pembangunan (Wacana Pembangunan Ranah Minang)	103
 BAB VI PENDIDIKAN BAGI RUMAH TANGGA DAN MASYARAKAT	114
A. Pentingnya Pendidikan	117
B. Penciptaan Nilai dalam Persaingan	119
C. Strategi Pendidikan Masyarakat	123
D. Upaya Publik, Penyediaan Dana Publik	126
E. Upaya Rumah Tangga	132
F. Kesimpulan	137
G. Saran-Saran dan Implikasi	138
 DAFTAR PUSTAKA	139
TENTANG PENULIS	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Perkembangan dan Fokus Aliran Ekonomi Utama Dunia.	8
Gambar 1.2 Diagram Human Development Index	10
Gambar 1.3 Kesejahteraan Ekonomi Bangsa	26
Gambar 2.1 Profil umur dan tingkat pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan (Sumber, Psacharopoulos, 1995) 38	
Gambar 3.1 Grafik Perubahan Struktural , 1970 - 2003 Sumber: BPS, di ukur berdasarkan harga berlaku, grafik diolah	49
Gambar 3.2 Grafik Hipotesis Kuznet antara PDB Perkapita dan Gini Rasio, Tahun 1970 -2003 Sumber: BPS, Grafik diolah	51
Gambar 3.3 Trend Gini Rasio Pengeluaran Rumah Tangga, 1970 - 2003 . Sumber: BPS, 2003, grafik diolah	52
Gambar 4.1 Struktur Ekspor dan Impor Indonesia, tahun 2005 Sumber : Bank Indonesia,2006	56
Gambar 4.2 Struktur Barang Impor antara Bahan konsumsi, Bahan Penolong dan Barang Modal, tahun 2002,2003,2004,2005 dan 2006 Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik, dan Departemen Perdagangan 2007	57
Gambar 4.3 Permasalahan Tenaga Kerja di Indonesia Sumber : Bank Indonesia, 2006	63
Gambar 4.4 Jenis Industri Padat Tenaga Kerja dan Padat Modal,2006	72
Gambar 6.1 Tiga Strategi Generik	121
Gambar 6.2 Teori Konsumsi Siklus Hidup, sumber (Case. 2003:271)	134

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pilihan, Strategi, Manfaat dan Eksternalitas Kebijakan Pendidikan	37
Tabel 2.2	Pengembalian Investasi Pendidikan Individu dan Sosial	38
Tabel 4. 1	Perkembangan Impor di Indonesia (1996 - 2005)	56
Tabel 4.2	Nilai Total dan Presentase Impor berdasarkan Golongan Barang, Ekonomi, tahun 2002- 2006(JUTA US\$)	58
Tabel 4.3	Nilai dan Presentase Impor berdasarkan Golongan Barang Ekonomi	59
Tabel 4.4	Orientasi Pasar dan Ketergantungan Industri Bahan Baku Impor, 2003	61
Tabel 4.5	Perkembangan Jumlah Pengangguran di Indonesia (1996 - 2005)	62
Tabel 4.6	Jumlah Pengangguran berdasakan tingkat pendidikan, 2001, 2002, 2003, 2004 and 2005*)	64
Tabel 4.7	Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja	69
Tabel 4.8	Perkembangan Sumbangan Sektor Ekonomi terhadap PDB Pada Fase Kejayaan Minyak dan Resesi Ekonomi dan Reformasi	70
Tabel 4.9	Kesempatan kerja menurut sektor Ekonomi Tahun 2003 - 2005	72
Tabel 4.10	Komposisi Bahan Baku Penolong yang di Impor, 2002- 2006	73
Tabel 6.1	Jumlah Siswa Berdasar Jenjang Pendidikan dan Pertumbuhan setiap tahunnya	129

BAB I

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

A. Pendahuluan

Kemiskinan terjadi tatkala kekayaan suatu negara tidak terdistribusi secara adil kepada warga negara. Sebagian warga negara memiliki banyak aset, namun sebagiannya terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Para ekonom yang pro pasar mengatakan bahwa meningkatkan efisiensi pasar merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Adagiumnya : semakin besar peran pasar maka kian besar pula peran masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi secara rasional. Kebebasan yang tumbuh itu membangkitkan dinamika masyarakat dan merangsang kebutuhan akan kebebasan politik (Salim, 2008). Aliran ekonomi, baik aliran klasik (*newklasik*) yang dirintis oleh Adam Smith (1776) dan para pengikutnya, dan Keynes (*new keynesian*) (1930-an) juga menjadi induk dari ajaran ekonomi yang menganjurkan pasar sebagai alat untuk menciptakan kemakmuran ekonomi.

Meskipun begitu, realitas struktur perekonomian dunia, tak bisa munafik terjadinya ketimpangan sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat internasional. Struktur perekonomian dewasa ini adalah minoritas penduduk makmur memiliki cukup banyak makanan, kekayaan, barang dan jasa untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan lainnya; berhadapan dengan mayoritas penduduk miskin yang kekurangan makanan, tinggal di gubuk tua, di kolong jembatan, di tengah hutan, dan di tempat rawan banjir dan longsor.

Dalam skala yang lebih kecil, perekonomian dunia juga dihadapkan atas *high disparitas* antarnegara utara - selatan,

antar-penduduk kaya dan penduduk miskin, antar profesi-profesi, antar jabatan dan antar kelompok-kelompok personal yang memiliki bakat khusus dan yang tidak. Seperti antara penyanyi, pemain sepakbola, pemain basket, antar-etnis dan suku dan lain-lain. *Spase* antara makmur-miskin yang tinggi pada akhirnya menimbulkan bencana kemanusiaan, seperti : kelaparan, gizi buruk, kebodohan dan penindasan terstruktur pada suatu bangsa

Ironisnya, Amerika Serikat sebagai negara yang melahirkan ide dan gagasan globalisasi ekonomi tidak bisa melepaskan dirinya atas fenomena ketimpangan¹. Bahkan, pada awal tahun 2008, AS mengalami guncangan ekonomi akibat krisis finansial. Joseph E. Stiglitz (2003), seorang ekonom dan peraih hadiah nobel ekonomi menjelaskan benih-benih kehancuran ekonomi AS akibat adanya gelembung ekonomi (*economic bubble*) karena (1) pertumbuhan harga aset tidak lagi terkait dengan nilai yang dikandungnya; (2) kegairahan irrasional, yakni adanya kecenderungan harga yang tidak masuk akal pada saham-saham tertentu atau produk tertentu; (3) akuntansi perusahaan menyajikan informasi yang keliru karena adanya konflik kepentingan atas laporan keuangan tersebut; dan (4) pemotongan tarif pajak (*capital gains*). Kondisi tersebut diperparah kegagalan pemerintah sebagai penyeimbang pasar dan pertumbuhan "murah" yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dan "pelitnya" investasi di sektor pendidikan, infrastruktur dan riset dasar.

¹ Pada 2007, 55 % pendapatan nasional AS dikuasai 20 % penduduk terkaya. Kenaikan yang didapat 1 % penduduk terkaya selama 2003-2005 (US \$ 1,3 triliun ke US \$ 1,8 triliun) jauh melebihi kenaikan pendapatan yang dinikmati 20 % penduduk termiskin (US\$ 383,4 miliar). Pada tahun 2005, pendapatan 3 juta penduduk terkaya sebanding dengan total pendapatan 166 juta penduduk lapis pendapatan terbawah. Mereka rata-rata menikmati kenaikan sebesar US\$ 465.700, sementara 20 % penduduk termiskin hanya US\$ 200. Lihat Kompas, Kampiun-kampiun Globalisasi, edisi 15 Agustus 2008.

Para ekonom negara maju dan beberapa ekonom dalam negeri yang telah dirasuki oleh pemikiran pasar (*neoliberalism*) menganjurkan ekonomi pasar sebagai obat yang mujarab untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Namun, pemikiran itu amatlah keliru karena asumsi ekonomi pasar tidak terpenuhi. Disamping itu juga efektivitas pasar memerlukan adanya dukungan kelembagaan, budaya, dan aturan hukum tertentu yang sebagian besar tidak dimiliki di negara berkembang (Todaro, 2004)

B. Warna Pemikiran Ekonomi

Ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial, yang mempelajari tingkah laku manusia dan masyarakat. Ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang bagaimana seseorang dan masyarakat memilih cara pemanfaatan sumberdaya langka yang disediakan oleh alam dan warisan oleh generasi sebelumnya (Case, 2003). Kata kunci yang penting dalam pengertian ini adalah memilih (*choose*), dimana dengan kelangkaan sumberdaya yang dimiliki manusia harus memilih sumberdaya yang langka itu untuk mencapai tingkat kepuasan maksimal.

Belajar atau mempelajari ilmu ekonomi merupakan sesuatu yang amat menarik dan memiliki tujuan yang amat penting dalam kehidupan masyarakat. Case (2003) mengemukakan bahwa ada empat alasan utama dalam mempelajari ilmu ekonomi, yakni mempelajari dan memahami kerangka berpikir, memahami masyarakat, memahami masalah global dan pemberi kontribusi pemikiran pada perkembangan pengetahuan.

Terdapat dua pendekatan yang biasa dikembangkan oleh para penulis dalam mempelajari ilmu ekonomi yakni pendekatan mikro dan pendekatan makro. Pendekatan mikro lebih cenderung pembahasannya pada unit analisis individu, rumah tangga baik rumah tangga produsen maupun rumah tangga konsumen atau suatu komoditas tertentu. Pendekatan makro lebih cenderung mempelajari ilmu ekonomi secara keseluruhan (*agregatif*) perilaku rumah tangga secara keseluruhan, seperti akumulasi pendapatan menjadi pendapatan nasional, kesempatan kerja dan pengangguran, perdagangan internasional, inflasi, tingkat suku bunga, investasi dan lain-lain pada skala regional (kawasan) dan skala

suatu negara (*nation*).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi amat mempengaruhi cara pandang manusia dalam memandang kehidupan, dan kesejahteraan. Dulu, orang mengartikan sejahtera dengan memiliki tanah yang luas, bangunan yang tinggi dan besar. Namun sekarang, orang mengartikan kesejahteraan dalam bentuk kepemilikan dan kemampuan pengetahuan, keterampilan, ilmu pengetahuan dan informasi.

C. Perkembangan Pemikiran Ekonomi

Sama halnya dengan bidang ilmu sosial lainnya ilmu ekonomi lahir, tumbuh dan berkembang melalui suatu proses yang relatif panjang. Penulis sejarah pemikiran ekonomi mengategorikan sejarah perkembangan ilmu ekonomi dalam beberapa periode sesuai dengan perkembangan lingkungan pada masa itu.

Secara garis besar terdapat 3 aliran utama ilmu ekonomi yakni aliran klasik, aliran keynesian dan aliran sosialis (komando), namun belakangan muncul variasi baru dalam ilmu ekonomi yakni ekonomi campuran, Islam, Kongfucu, Jepang, *rasional ekspektasion*, *moneteris*, *supply side*. Aliran ekonomi klasik dan keynesian pada dasarnya adalah aliran yang percaya pada mekanisme pasar sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Sementara itu ekonomi sosialisme (*commando*) lebih percaya bahwa kesejahteraan dan keadilan ekonomi tercipta jika perekonomian negara itu dikendalikan secara sentralistik baik jumlah produksi dan jumlah uang diciptakan oleh negara. Sementara itu ada juga keyakinan bahwa perekonomian itu bisa maju pada saat perekonomian suatu negara itu menggunakan pola kombinasi dan campuran kedua pemikiran itu yakin perlu ada peran negara dan juga pasar juga diberikan kesempatan untuk membagi dan mendistribusikan sumberdaya.

Aliran klasik pertama kali fondasinya dibangun oleh Adam Smith (1729-1790) melalui bukunya "*The Wealth of Nations*". Pada saat itu Adam Smith tidak mengklaim dirinya sebagai kaum klasik, tetapi istilah klasik itu diperkenalkan ratusan tahun kemudian oleh para penulis ekonomi yang lain. Adam Smith menghasilkan karya dan kontribusi pemikirannya tidak hanya dari pengalaman berpikir dan perenungannya

dengan situasi lingkungan saat itu, namun juga belajar dari gurunya diantaranya: Quesnay (1694), Hutcheson (1746), dan David Hume (1776). Adam Smith meyakini bahwa kebebasan pribadi untuk memiliki, memuaskan keinginan merupakan dorongan yang kuat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi yang lebih luas. Mekanisme pasar dimana permintaan dan penawaran merupakan suatu kekuatan yang bisa mencapai tingkat harga keseimbangan. Banyaknya kuantitas barang yang diproduksi amat ditentukan oleh faktor harga, dimana pasar atau harga menjadi "*impossible hand*" penggerak perekonomian sehingga peran pengaturan oleh otoritas negar mesti dikurangi.

Adam Smith (1776) memberikan kontribusi pemikiran ekonomi pada teori nilai guna (*utility*) dan nilai tukar (*value in change*), akumulasi modal, spesialisasi dan pembagian kerja. Adam Smith memiliki keyakinan bahwa peningkatan output dan produktivitas amat ditentukan oleh pembagian kerja para pekerja dan akumulasi modal (*surplus produsen*). Pemikiran kaum klasik juga diberikan kontribusinya oleh Thomas Robert Malthus (1766-1834), David Ricardo (1772-1823), Jean Baptiste Say (1767-1832) dan John Stuar Mill (1806-1873).

Malthus (1766) memberikan sumbangan pada perlunya pengendalian kelahiran sebagai upaya untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk karena pertumbuhan makanan (ekonomi) tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk sehingga akan menimbulkan persoalan kemiskinan, kekurangan pangan dan pengangguran.

Ricardo (1772) juga memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu ekonomi, khususnya biaya marginal pada sewa tanah, teori upah, teori nilai kerja dan keunggulan kompetisi dalam perdagangan internasional. Sementara itu Say (1767) mengemukakan bahwa perekonomian suatu negara merupakan *full employment*, sehingga setiap penawaran barang akan memunculkan permintaan atas barang yang diproduksi tersebut, (*supply creates its own demand*), dengan asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan kerena perekonomian pada posisi *full employment*. Dalam pasar tidak akan terjadi kelebihan *supply*. (*excess supply*). Kemudian, John Stuar Mill (1806) memperbarui pemikiran klasik tentang kebebasan individu, dan memberikan kontribusi pada teori penambahan input yang memberikan hasil berkurang atau

(*deminising return to scale*), dan meletakkan fondasi pemikiran elastisitas permintaan.

Akan tetapi, pemikiran Adam Smith ini beberapa kritikus mengatakan bahwa dalam implikasinya menimbulkan persoalan, diantaranya adalah kebebasan individu menyebabkan terjadi manusia satu penghisap manusia lainnya. Munculnya kaum kapitalis yang memiliki surplus atau akumulasi modal menghisap nilai tambah pekerja, kesenjangan ekonomi. Orang kaya semakin kaya dan orang miskin dan buruh semakin miskin. Untuk itu, Karl Mark (1818-1883) melakukan kritis atas teori ekonomi saat itu dan mengungkapkan realitas sosial. Mark (1883) menjelaskan kaum kapitalis mendapatkan surplus dari hasil pekerja, dimana pekerja setiap harinya bekerja 7 jam, namun pemilik modal hanya memberikan upah 5 jam kepada pekerja (*proletar*), sementara 2 jam lagi menjadi surplus kapitalis. Produsen atau pemilik modal juga mendapatkan keuntungan dari sirkulasi barang dagang yang dijual di pasar. Pedagang membeli harga 10 namun menjualnya 12, selisih harga jual dengan harga beli menjadi surplus pedagang. Surplus itulah yang menjadikan akumulasi modal kapitalis yang dikatakan sebagai *capital*.

Mark (1883) juga banyak menjelaskan pemikirannya tentang perlu keadilan sosial melalui suatu masyarakat sosialis atau komunal yang kemudian dinamakan dengan masyarakat komunis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kaum kapitalis dalam perekonomian melakukan penghisapan terhadap kelompok buruh atau proletar, sehingga terjadi konflik antara kapitalis dengan proletar. Mark (1883) meyakini jika sistem kapitalis tetap dijalankan kaum buruh akan semakin miskin dan akan menimbulkan revolusi sosial, dan dengan revolusi sosial itu akan terjadi suatu perubahan sistem, terjadi keharmonisan, keselarasan etis, sosial dan ekonomi.

Pada tahun 1930-an terjadi resesi dan depresi ekonomi di Amerika Serikat. Pada waktu itu USA menganut ekonomi klasik, dengan keyakinan bahwa pasar akan menciptakan keseimbangan baru (*equilibrium*) dan pemerintah tidak perlu ikut campur dalam perekonomian. Akan tetapi kebijakan ekonomi yang didasari oleh paradigma klasik tidak mangkus memperbaiki situasi perekonomian saat itu. Orangpun mulai mendalami dan menelaah tulisan yang telah diterbitkan oleh Keynes (1913) tentang *Indian Currency and finance, A Revisin of*

the Treaty (1922), The General Theory of employment, interest and Money.

Keynes (1930) memberikan kritikan terhadap keyakinan klasik selama ini. Diantaranya adalah kritikan terhadap beberapa asumsi yang tidak tepat dalam perekonomian diantaranya adalah: tidak perlunya peran pemerintah dalam perekonomian, perekonomian dalam situasi *full employment*, penawaran akan menciptakan permintaan, kekuatan mekanisme pasar dalam menciptakan keseimbangan baru (*equilibrium*), terlalu dominannya analisis ekonomi klasik pada pendekatan mikro.

Dalam hal ini, Keynes (1930) menawarkan pokok pikiran bahwa perekonomian tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah perlu ikut campur dalam perekonomian untuk menjaga dan menciptakan keseimbangan itu. Asumsi kaum klasik yang menyatakan bahwa dalam perekonomian itu terjadi *full employment* juga tidak terpenuhi, malah justru terjadi sebaliknya dalam perekonomian selalu ada orang yang menganggur, tidak bekerja karena belum dapat pekerjaan dan ada juga sebagian yang belum mau bekerja. Keynes juga membantah asumsi klasik bahwa penawaran itu akan menciptakan permintaan. Karena asumsi pertama tidak terpenuhi yakni perekonomian *fullemployment*, maka dengan sendirinya tidak semua produk yang dihasilkan akan ada permintaan. Dalam perekonomian sesungguhnya setiap produk yang dihasilkan mesti mempertimbangkan penawaran supaya jangan sampai kelebihan supply. Keynes juga memberikan kontribusi pada pemikiran perlunya perhitungan pendapatan nasional secara *agregatif* sehingga memudahkan dalam melakukan intervensi.

Keynes berkeyakinan pemerintah memiliki otoritas untuk menentukan jumlah uang yang beredar dan anggaran pemerintah (pajak) sehingga dikenal dengan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengurangi atau menambah uang yang beredar. Melalui bank sentral pemerintah memiliki otoritas untuk mempengaruhi peredaran uang dengan beberapa kebijakan, yakni menaikkan atau menurunkan suku bunga, mencetak uang, atau meminjam uang ke luar negeri. Disamping itu, pemerintah juga bisa mengendalikan belanja pemerintah, apakah pemerintah mau menambah anggaran negara untuk belanja publik atau

mengurangi belanja publik. Jika pemerintah ingin menambah belanja publik, pemerintah bisa saja menaikkan tarif pajak sehingga nilai konsumsi rumah tangga (masyarakat) akan berkurang. Karena $Y_d = Y - T$. Tentunya penerimaan masyarakat berkurang.

Disamping ketiga aliran pemikiran ekonomi itu, sampai sekarang juga berkembang beberapa aliran ekonomi diantaranya adalah ekonomi institutional, ekonomi rasional ekpektasion, aliran moneteris, *supply side*, ekonomi syariah, dan ekonomi kongfucu.

Gambar : 1.1 Skema Perkembangan dan Fokus Aliran Ekonomi Utama Dunia.

D. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan usaha yang selalu harus dilakukan, tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional (*gross national product*), kemudian membagi pendapatan nasional (GNP) tersebut kepada warga negara secara adil (*income percapita*), kemajuan sektor industri untuk penyerapan angkatan kerja yang tinggi dan mengurangi tingkat pengangguran (*unemployment*) dan kemiskinan (Todaro, 2004). Akan tetapi kemajuan ekonomi saja tidak cukup, analisis dan pengambil kebijakan mengembangkan pembangunan dalam dimensi sosial diantaranya di kembangkan oleh UNDP (*united nation development program*) dengan ukuran pembangunan manusia (*human development*) dengan beberapa indikator diantaranya adalah tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kondisi dan kualitas kesehatan (UNDP, 2004)

Sebelum ukuran HDI dikembangkan sebagai ukuran pembangunan, bank dunia sebelum tahun 1990-an mengembangkan konsep PQLI (*The physical quality life index*) sebagai ukuran pembangunan. PQLI menggunakan tiga indikator yang terdiri atas

1. Infant Mortality : IM
2. Life Expectancy : e
3. Basic literacy : L

sehingga indeks PQLI dapat ditulis dengan

$$PQLI = (IMI, eI, LI)/3$$

dimana : IMI = indeks tingkat kematian

: e I = Indeks harapan hidup

: LI = Indeks kemampuan melek huruf

$$HDI = 1/3 (\text{Index } X_1 + \text{Index } X_2 + \text{Index } X_3)$$

Where X_1 , X_2 and X_3 are longevity, educational attainment and standard of living respectively.

Sehingga, $PQLI = 0,33 IMI + 0,33 eI + 0,33 LI$.

UNDP sejak 1988- juga mengembangkan empat (4) blok pengukuran pembangunan manusia HDI1, HDI2, HDI3, HDI4

1. Harapan Hidup			
2. GDP Perkapita			
3. Tingkat Melek Huruf	HDI1		
4. Kualitas Hidup	HDI2		
5. Kependudukan dan Garis Kemiskinan	HDI3		
6. Urbanisasi		HDI4	

Gambar : 1.2 Diagram Human Development Index

Kualitas kehidupan, diukur dengan indikator: (1) akses pada air bersih, (2) jaringan listrik (3) kecukupan makanan pokok dua kali sehari setiap tahun (4), ketersediaan rumah (5) dan layanan rumah sakit untuk penduduk.

UNDP pada tahun 1990 memodifikasi dan mengembangkan indikator pembangunan dengan berbagai ukuran *Human Development Index*, yang menyediakan berbagai indeks antarnegara di dunia dan dengan menggabungkan antara indikator sosial seperti yang dikembangkan oleh bank dunia dengan indikator ekonomi, yakni pendapatan perkapita dan indeks kemiskinan.

UNDP 1997, menyusun formula untuk menghitung indeks pembangunan manusia dengan suatu ukuran 0 - 1. Untuk menghitung indeks. UNDP 2001 mengembangkan indikator HDI perbandingan antarnegara.

Indeks HDI $>0,8$ = negara kategori HDI tinggi

Indeks HDI $0,5 - 0,8$ = negara kategori HDI Menengah

Indeks $< 0,5$ = negara kategori HDI rendah

UNDP, 2004, mengembangkan standar untuk beberapa indikator yang terdiri atas:

Komponen HDI	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Tingkat melek huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama bersekolah	15	0	Standar UNDP
Daya Beli	737.720	360.000(1999)	GDP/Kapita

Sumber, UNDP, 2004

suatu indikator disusun rumus sebagai berikut :

Indeks harapan hidup

Nilai aktual - Nilai minimum

li = nilai Maksimum - Nilai minimum

Pada tahun 2008, UNDP telah mempublikasikan 35 kategori data yang bisa dibaca di setiap negara dengan berbagai indikator, ukuran, dan trend data yang tersedia dalam sebuah negara. Contoh perhitungan indeks

Calculating the HDI	
This illustration of the calculation of HDI uses data for Aceh Province in 1999	
Life expectancy	67.6
Adult literacy rate (%)	93.1
Mean years of schooling	7.2
Adjusted real per capita expenditure (Thousand Rupiah)	562.8
Life expectancy index $(67.6 - 25) / (85 - 25) = 0.71 = 71\%$	
Adult literacy index $(93.1 - 0) / (100 - 0) = 0.93 = 93\%$	
Mean years of schooling index $(7.2 - 0) / (15 - 0) = 0.48 = 48\%$	
Educational attainment index $(2/3 \times 93) + (1/3 \times 48) = 0.78 = 78\%$	
Income index $(562.8 - 360) / (732.72 - 300) = 0.469 = 47\%$	
Human development index $HDI = (71 + 78 + 47) / 3 = 65.3$	

Sumber: UNDP, Bappenas, 1999

E. Pasar yang Tidak Sempurna dan Informasi Asimetris

Bila ditelisik lebih mendalam, setidaknya terdapat tiga faktor yang membuat konsepsi pasar dapat dinilai atau dapat menjurus pada kondisi "gagal", sehingga membutuhkan intervensi pemerintah. *Pertama*, meskipun *demand and supply law* berlaku umum, tapi dalam praktiknya, ketika variabel lain berubah acap kali hukum tersebut menjadi tidak berlaku. Hukum permintaan dan penawaran menjelaskan tentang interaksi antara pembeli dan penjual yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya kesepakatan harga dan kuantitas yang diminta dan ditawarkan pada titik keseimbangan (*point of equilibrium*). Harga menjadi faktor penentu kuantitas yang *demand* dan *supply* karena selayak "tangan ajaib", harga akan memotivasi umat manusia untuk berperilaku ekonomi.

Meskipun berlaku umum, tapi dalam praktiknya, ketika variabel lain berubah hukum *demand supply* tersebut tidak berlaku. Fenomena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok pada saat bulan Ramadhan dan hari raya umpamanya. Pada keadaan seperti itu harga terus meningkat, namun konsumen cenderung membeli dalam jumlah yang banyak dan akhirnya mendorong kenaikan harga. Pada situasi ini hukum *demand and supply* kurang berlaku.

Fenomena tersebut adalah dampak psikologis konsumen yang kuatir barang yang dibutuhkan habis di pasar pada saat diperlukan. Disamping faktor khawatir tersebut, ketidakmampuan hukum ini tidak berlaku juga dipengaruhi oleh faktor pengharapan orang di masa depan. Seperti keuntungan masa depan yang akan diperoleh ketika membeli suatu barang. Fenomena serupa juga ditemui dalam kasus emas dan harga bunga *anthurium* pada akhir 2007.

Kenaikan harga barang dan jasa yang konsisten cenderung mendorong konsumen untuk berperilaku "memborong" dengan cara membeli barang dan jasa tersebut dalam kuantitas yang lebih tinggi. Namun bagi konsumen dengan anggaran terbatas (*budget line*) di bawah, aktivitas "memborong" tidak bisa dilakukan dengan leluasa. Pasalnya, mereka cenderung tidak akan mampu bersaing dengan konsumen berdaya beli tinggi. Dengan demikian, fenomena "memborong" hanya terjadi saat konsumen tidak memiliki keterbatasan anggaran/dana, untuk mengimbangi harga produk yang selalu naik tersebut. Selain itu, fenomena memborong juga hanya terjadi

pada momen-momen tertentu dan bersifat sangat pendek (*very short time*). Dalam periode singkat tersebut, hukum "*demand and supply*" kadang-kadang memang tidak berlaku signifikan.

Kedua, persaingan tidak dapat bekerja efektif dalam kondisi lemahnya pesaing atau terlalu dominannya salah satu atau sekelompok kekuatan di dalam pasar. Ketika ada kekuatan pasar yang terlampau dominan, pemerintah wajib untuk mengintervensi pasar guna meningkatkan persaingan.

Selanjutnya, Pemerintah juga mesti mengintervensi pasar, ketika konsumen tidak memiliki informasi yang memadai untuk menilai kualitas suatu produk. Kebijakan tersebut sesuai dengan pendapat McLuhan (1996), (dalam Briggs, 2000), yang menjelaskan bahwa konteks globalisasi di mana pasar (produsen/kapitalis) memiliki kekuasaan finansial yang besar dalam perekonomian sehingga dapat menguasai opini dan persepsi konsumen dengan memperlalat media massa dan televisi, pemerintah wajib turut campur.

Dalam konteks antisipasi atas ketidakseimbangan informasi, pemerintah perlu membuat aturan dan melarang iklan yang tidak benar dan menyesatkan konsumen. Pemerintah dapat mewajibkan perusahaan-perusahaan farmasi untuk membuktikan keamanan dan khasiat produknya. Pemerintah juga bisa mengatur sektor industri-industri, seperti perbankan dan listrik, dalam upaya melindungi konsumen dari iklan palsu dan penggambaran keuangan yang keliru. Dalam beberapa kasus, pemerintah bahkan terlibat dalam keputusan penetapan wilayah kendali penggunaan ekonomis lahan.

Ketiga, eksternalitas akibat aktivitas ekonomi acapkali menghambat terjadinya efektivitas dan efisiensi pasar. Dalam kasus Indonesia, eksternalitas akibat aktivitas ekonomi bisa dicontohkan dalam beberapa kasus-kasus yang menonjol diantaranya adalah: polusi udara, bencana banjir, lumpur yang terus keluar dan tak terkendali dari perut bumi (kasus lumpur lapindo), jatuhnya pesawat terbang ke pemukiman warga di dekat Bandar udara Polonia Medan, bau yang menyengat di sekitar pabrik karet, dan bunyi musik sampai larut malam di jalan Legian Bali

Dalam menghadapi eksternalitas, pemerintah perlu mengatur tentang izin lokasi tempat usaha bisnis, boleh atau tidak dilakukan, standar asap pada pabrik, seberapa tinggi

bangunan bisa dibangun, boleh tidaknya suatu lokasi menjadi tempat pembuangan sampah?, dan aspek-aspek ANDAL (Analisa Dampak Lingkungan).

Dari pemaparan di atas, dapat dirumuskan empat pertanyaan dasar mengenai relasi antara pasar dan pemerintah, yaitu: 1) Apakah cara yang terbaik yang dapat dilakukan pemerintah untuk memajukan pasar-pasar agar efisien; 2) Sejauhmana kegagalan pasar dikendalikan tanpa mengganggu keuntungan-keuntungan efisiensi yang sangat besar dari persaingan dan pertarungan pasar yang tidak dikendalikan; 3) Bidang-bidang apa saja yang memerlukan aturan dan bagaimana peran aturan itu dalam perekonomian; dan 4) Bagaimana aturan yang diperlukan untuk penggabungan industri

Dalam era globalisasi ini pasar (produsen/kapitalis) memiliki kekuatan finansial yang besar dalam perekonomian. Stiglitz (2003) menjelaskan bahwa kekuatan globalisasi terletak di sisi finansial. Sehingga dengan kekuatan itu pasar (produsen) bisa menguasai opini dan persepsi konsumen pada media massa dan televisi. McLuhan (1996) menjelaskan televisi merupakan "*the medium is the message* (media itulah yang menjadi pesan). Hal ini merupakan formula kunci dari masa simulasi (*electronic simulation*), yang menunjukkan televisi melebur dalam kehidupan. Dampaknya adalah pemirsa mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sering melakukan duplikasi atas tayangan-tayangan televisi tersebut.

Ketika televisi menyiarkan atau mempertontonkan perilaku kekerasan, seks dan pornografi pada bentuk acara film, berita, sinema, drama di televisi ada kecenderungan masyarakat juga akan meniru dan melakukan apa yang diajarkan oleh televisi. Lebih lanjut McLuhan (1965), (dalam Severin, 2005), menjelaskan bahwa televisi memberikan penekanan pada indra yang lebih banyak, dapat diraba, televisi lebih membuat orang terlibat dan berperan serta. Herbert Schiller (1976), (dalam Briggs, 2000) mengungkapkan televisi komersial merupakan salah satu alat dominasi budaya "*imperialisme culture*" merendahkan standar hidup dan memberikan sampah budaya¹

Pemerintah perlu membuat aturan dan melarang iklan yang tidak benar dan menyesatkan konsumen, sehingga pasar

dapat bekerja lebih baik. Konsumen mendapatkan informasi yang memadai tentang produk yang ditawarkan oleh produsen. Perusahaan pialang saham dan perusahaan yang *go public* juga memberikan laporan keuangan yang wajar dan valid serta informasi yang memadai untuk proyeksi masa depan sehingga membantu melindungi investor (*buyer*) dari perbuatan yang curang menyangkut nilai sekuritas perusahaan.

Regulasi dan aturan-aturan perlindungan tenaga kerja juga perlu dibuat oleh pemerintah sehingga calon pencari kerja terbantu atas kekurangan informasi di tempat kerja. Pemerintah juga perlu menyusun aturan standar minimum bagi keselamatan kerja, kompensasi kecelakaan kerja sehingga individu tidak perlu lagi melakukan investigasi dan advokasi atas konflik yang terjadi antara majikan dan pekerja.

Begitu pula halnya dengan eksternalitas yang di akibatkan oleh suatu kegiatan ekonomi, seperti polusi udara, bencana banjir, lumpur yang terus keluar dan tak terkendali dari perut bumi (kasus lumpur lapindo), jatuhnya pesawat terbang ke pemukiman warga di dekat Bandar udara Polonia Medan, bau yang menyengat disekitar pabrik karet, dan bunyi musik sampai larut malam di jalan Legian Bali. Untuk itu, Maka pemerintah perlu mengatur tentang izin lokasi tempat usaha bisnis, boleh atau tidak dilakukan, standar asap pada pabrik, seberapa tinggi bangunan bisa dibangun, boleh tidaknya suatu lokasi menjadi tempat pembuangan sampah, dan aspek-aspek amdal (analisa dampak lingkungan lainnya)

Ketika penulis berkunjung ke Australia, sabagai salah satu negara maju dengan menerapkan ekonomi pasar. Australia tidak se-liberal ekonomi Indonesia. Pemerintah memiliki otoritas yang kuat untuk mengatur perekonomian disana semua mengurangi dan menjaga kegagalan pasar dan eksternalitas. Penulis memperhatikan salah satu bentuk aturan yang ditetapkan di Australia adalah pengaturan jam buka dan jam tutup *mall* dan *supermarket*. *Mall* dan *supermarket* boleh buka jam 9.00 pagi dan harus tutup jam 05.00 sore. Sementara itu, kios-kios kecil boleh buka 24 jam. Ini salah satu pengaturan yang bisa dilakukan agar usaha kecil mendapatkan rezki pula. Beda halnya dengan kita, *mall* dan *supermarket* buka jam 09.00 pagi hingga larut malam. Di sisi lain PKL juga boleh menjajakan

dagangannya di depan toko usaha besar, sehingga keduanya bersaing secara bebas tanpa ada pengaturan oleh pemerintah. Pedagang yang memiliki toko harus mengeluarkan sewa toko dan retribusi pasar sementara PKL hanya bermodalkan gerobak dan harga di PKL lebih murah dibandingkan dengan di toko, dalam hal ini PKL kita juga berbuat zolim kepada pedagang yang memiliki toko.

Kepemilikan lahan juga diperhatikan bagi petani, petani mendapatkan lahan dengan skala ekonomi, sehingga kesejahteraan petani akan meningkat. Umpamanya kasus kepemilikan tanah, aturan hukum Indonesia terbaru memungkinkan pengusaha mendapatkan hak menguasai tanah dalam bentuk HGU (hak guna usaha) ribuan hektar selama 75 tahun. Kemudian dengan selebar HGU yang telah diperoleh tersebut, mereka mendapatkan kredit investasi besar untuk mengolah lahan. Sementara itu, petani rakyat diimangi dengan kredit revitalisasi perkebunan rakyat namun program itu tidak bisa diakses oleh rakyat ke bank karena rakyat tidak memiliki sertifikat tanah.

Pertanyaan selanjutnya adalah bisakah kita lebih sejahtera, seperti yang dirasakan oleh negara maju? Penulis mengira ada beberapa prasyarat yang harus terpenuhi. *Pertama*, para pemikir dan para perumus kebijakan harus menyadari bahwa ekonomi pasar tidak sepenuhnya bisa mensejahterakan rakyat karena beberapa hal yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Karena itu, pemerintah harus mengurangi kegagalan pasar dengan cara memberikan informasi yang memadai kepada pelaku usaha dan konsumen, mengatur standarisasi kualitas produk, menjamin terjadinya redistribusi aset produktif nasional. Redistribusi ini dalam bentuk pengalokasian dan pendistribusian lahan kembali (*land reform*) lahan yang dikuasai pengusaha kepada warga Negara. Penjaminan kredit bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dan program peningkatan mutu modal manusia dalam bentuk investasi pada sektor pendidikan. *Kedua*, Pemerintah mesti mengendalikan eksternalitas ekonomi seperti pencegahan kerusakan alam, polusi udara, jaminan sosial bagi keluarga miskin dan pengangguran.

Ketiga, Pemerintah mesti melakukan restrukturisasi birokrasi agar lebih efisiensi dan penghematan biaya demokrasi dan meningkatkan investasi infrastruktur ekonomi

dan modal manusia khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Keempat, Memperbaiki kualitas kependudukan dengan program pengendalian kelahiran, dan pendidikan untuk kaum perempuan sehingga pertumbuhan penduduk bisa dikurangi. *Kelima*, Merubah kebijakan pertambangan dan industri. Setiap bahan galian tambang yang keluar dari perut bumi Indonesia mesti diolah di Indonesia menjadi produk jadi dan setengah jadi. Sehingga efek ganda dari pembukaan tambang tersebut memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga Negara.

F. Mengenal Ekonomi Institutional

Saat ini, terdapat sejumlah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, namun di sisi lain juga terlihat negara yang hidup dalam standar yang rendah. Banyak penjelasan yang bisa kita peroleh kenapa perbedaan ini terjadi. Yeager (1999) (dalam Yustika, 2006) menjelaskan ada 5 hipotesis yang diperkirakan menjadi sumber kemajuan ekonomi sebuah negara, yaitu 1) Modal sumberdaya manusia (*human capital*). 2) Sumberdaya alam (*natural resources*) 3) Kepadatan penduduk yang rendah (*population density*) dan 4) penguasaan teknologi, dan 5) letak geografis, negara-negara di daerah khatulistiwa yang berhawa sangat panas, dan memiliki jumlah penduduk miskin lebih banyak.

Kelima faktor itu bukan berarti bahwa ketika suatu negara memiliki atau tidak memiliki sumber pertumbuhannya tidak bisa makmur. Contohnya ketika suatu negara memiliki sumberdaya alam yang banyak dan unik lalu kemudian negara itu secara otomatis makmur, belum tentu bisa. Kasusnya adalah Indonesia. Indonesia memiliki laut yang luas, pantai, hutan, bahan material, penduduk yang banyak tetapi belum juga menunjukkan kemakmuran yang tinggi. UNDP, (2005) mencatat pendapatan perkapita Indonesia \$ 3.843. Ini urutan ke 113 dari 177 negara atau setara 12% pendapatan perkapita Jepang. Pada kasus Indonesia ini ada dugaan bahwa terdapat beberapa penyebab rendahnya tingkat kemakmuran. Penyebab yang dominan adalah kesalahan pemimpin Indonesia dalam mengatur perekonomian, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, mengatur distribusi kekayaan, regulasi pengelolaan sumberdaya alam, rendahnya investasi pada sumberdaya manusia, rendahnya investasi pada infrastruktur

khususnya di daerah luar Pulau Jawa, pengalokasian tanah yang dominan dikuasai oleh investasi asing dan swasta dan BUMN sehingga rakyat tidak memiliki cukup lahan untuk mengembangkan bisnis pertaniannya. Padahal penduduk Indonesia lebih dari 60% bermata pencarian sebagai petani. Sementara itu tingkat kepemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,3 hektar perkeluarga (Bappenas, 2005). Kalau kita bandingkan dengan petani Australia, rata-rata 1 keluarga memiliki 50 hektar lahan.

Kelima hipotesis sebagaimana sudah dijelaskan terdahulu, sesungguhnya juga memiliki sanggahannya, misalnya Singapura yang tidak memiliki sumberdaya alam namun masuk dalam kategori negara yang makmur, begitu juga Jepang, sebagai salah satu negara yang penduduknya amat padat berhasil mencapai kemakmuran yang tinggi. Penjelasan yang paling mutakhir menjelaskan sumber kemakmuran sebuah bangsa adalah pemikiran peran teknologi dalam menentukan kemajuan bangsa. Pendapat ini juga disanggah oleh beberapa pemikir. Bukankah teknologi itu bisa diadopsi oleh negara berkembang melalui pendidikan, transfer teknologi dan riset dan penelitian. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar kecepatan negara berkembang itu khususnya manusia di dalam mengadopsi teknologi itu sehingga menjadi berguna bagi kemajuan masyarakatnya.

Akhirnya, dalam satu dekade terakhir ini muncul pemikiran bahwa faktor kelembagaan (*institutions*) menjadi variabel yang dominan dalam mendorong pertumbuhan suatu negara. Aturan hukum (*rules of the game*). Acemoglu (2003), (dalam Yustika, 2006) mengemukakan terdapat tiga ciri kelembagaan yang baik. *Pertama*, pemaksaan terhadap hak kepemilikan (*enforcement of property right*), adanya kepemilikan di masyarakat akan memberi insentif bagi individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. *Kedua*, membatasi tindakan politik elit, dan kelompok berpengaruh lainnya yang berupaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa prosedur yang benar. *Ketiga*, memberi kesempatan yang sama (*equal opportunity*) bagi semua individu untuk mengerjakan aktivitas ekonomi dan investasi, khususnya dalam peningkatan kapasitas individu (*human capital*) maupun partisipasi dalam kegiatan produktif.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa ekonomi pasar memiliki kelemahan dan terdapat

dua asumsi yang tidak terpenuhi, yakni, ketidaksamaan kemampuan finansial, ketidaksamaan mendapatkan informasi pelaku usaha, skala usaha dan terjadinya eksternalitas. Karena itu, kelembagaan tidak hanya sebatas fasilitator bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan mendorong wirausaha dan investasi. Tetapi juga berusaha untuk menciptakan pasar (*market creating*), dengan melakukan kontrak penjualan dengan perusahaan di luar negeri, pembelanjaan pemerintah, dan mendorong konsumsi dalam negeri. Kelembagaan juga mengantisipasi efek dari eksternalitas ekonomi, seperti: pengangguran, kemiskinan, polusi udara, kesenjangan ekonomi dan jaminan sosial untuk rumah tangga tidak mampu, redistribusi assets, pola *land reform*, kredit untuk usaha kecil, pendidikan gratis untuk keluarga miskin sampai ke perguruan tinggi.

Sebenarnya ekonomi institusional berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu ekonomi. Ilmu ini mendasari filosofi pemikiran pada neoklasik tetapi juga terbuka pemikiran pada landasan ekonomi sosialis (*left-wing thinkers*) Poulton (1998), dalam Yustika (2006).

New Institutional economics (NIE) merupakan suatu kajian kelembagaan dan bagaimana kelembagaan saling berhubungan, dengan aturan organisasi. Kelembagaan adalah hukum tertulis dan tidak tertulis, aturan, norma dan keterbatasan manusia memikirkan untuk mengurangi ketidakpastian dan pengendalian. Di dalamnya termasuk (i) menulis aturan dan persetujuan bahwa mengurus relasi dan pengelolaan perusahaan (ii) konstitusi, hukum dan aturan-aturan politik, pemerintah, keuangan, dan masyarakat lebih luas, dan (iii) kode-kode yang tidak tertulis dari perilaku, norma, dan kepercayaan. Menard dan Shirley (2005)

Pemikiran institusional masih mengadopsi pemikiran neoklasik tentang naluri individu untuk mencari kepuasan dan keuntungan pribadi masih tetap dipakai. Akan tetapi tiga asumsi neoklasik tentang kesempurnaan informasi, rasionalitas yang tinggi dan tidak adanya biaya transaksi tidak digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan pemikirannya (North, 2005). Sementara itu, pemikiran kiri juga dimasukkan dalam kontribusi untuk membangun pemikiran *institutional* diantaranya adalah tujuan bersama dan kolektivitas untuk mencapai tujuan bersama.

G. Kehancuran Sosialisme, Kapitalisme dan Titik Temu Pembangunan Ekonomi

1. Kehancuran Sosialisme dan Kapitalisme

Idiologi sosialisme dan kapitalisme setelah perang dunia kedua, menjadi kekuatan utama (*super power*) di dunia. Sosialisme dikomandoi oleh Unisovyet (USSR), yang terdiri dari Eropa Timur, dan China, Korea Utara, dan Amerika Latin. Sementara itu kapitalisme dikomandoi oleh USA dan Eropa Barat, Korea Selatan, dan Jepang. Sosialisme dalam penerapan kenegaraannya dikatakan sebagai negara komunis yang meyakini bahwa perlunya peran negara dalam mengatur perekonomian (sentralistik), dimana jumlah produksi, dan perencanaan perekonomian ditentukan secara nasional oleh pemerintah. Sementara itu, negara kapitalis dengan sistem demokrasi liberal menjadi kekuatan ekonomi pasar dan peran negara dikurangi dalam perekonomian.

Pada 9 November 1989 tembok Berlin runtuh. Ini sebagai momentum hancurnya sosialisme yang memisahkan Jerman Barat yang menganut ekonomi liberal dan Jerman Timur yang menganut ekonomi sosialis. Momentum kedua hancurnya negara sosialis komunis adalah bubarnya negara USSR tahun 1991. Soviet-Rusia menjadi beberapa negara merdeka yakni Rusia, Chekoslovakia, Rumania, Bosnia, Estonia, Serbia, dll). (Bahrum, 2008). Rusia kemudian mengundang IMF, Bank Dunia dan berbagai instrumen ekonomi pasar lainnya untuk berpartisipasi dalam perekonomian Rusia. Beberapa penulis menghasilkan analisis tentang beberapa penyebab kegagalan sosialisme menciptakan kesejahteraan yakni: (1) terjadi praktek korupsi di tingkat elit, (2) akumulasi modal sulit untuk diciptakan karena akumulasi modal berasal dari tabungan sementara itu, tabungan masyarakat tidak terstimulasi dengan baik (3) masyarakat secara luas tidak diberikan kebebasan beraktivitas dan berkarya sehingga motivasi individu semakin menurun.

Sementara itu kapitalisme beberapa kali menimbulkan krisis ekonomi dan moneter dunia. Terjadinya depresi ekonomi di USA tahun 1930 yang disebabkan oleh krisis kredit dan krisis ekonomi awal tahun 1980an karena kenaikan harga minyak dunia dan pasca perang Vietnam. (Mankiw, 2003)

Pada akhir tahun 2008, Amerika dan dunia internasional juga mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis finansial di Amerika Serikat. Kehancuran ekonomi pasar seperti terjadinya krisis ekonomi global dalam beberapa kali dalam tahun ini menandakan bahwa ekonomi pasar ternyata juga memiliki kelemahan dan bisa dikatakan gagal menciptakan keadilan ekonomi. Ada fakta yang terungkap semakin tinggi tingkat kebebasan pasar dalam perekonomian, tingkat kesenjangan ekonomi negara itu akan semakin tinggi (Stiglitz, 2003).

Pada awal tahun 2008 ini, Amerika Serikat sebagai negara yang melahirkan ide dan gagasan globalisasi ekonomi terlihat mengalami guncangan ekonomi. Joseph E. Stiglitz (2003), seorang ekonom dan peraih hadiah nobel ekonomi menjelaskan benih-benih kehancuran ekonomi Amerika Serikat itu terjadi karena adanya gelembung ekonomi (*bubble*) yang disebabkan: (1) pertumbuhan harga aset tidak lagi terkait dengan nilai yang dikandungnya; (2) kegairahan irrasional tertentu yakni adanya kecenderungan harga yang tidak masuk akal pada saham-saham tertentu atau produk tertentu; (3) akuntansi perusahaan menyajikan informasi yang keliru karena adanya konflik kepentingan atas laporan keuangan tersebut, dan pemotongan tarif pajak (*capital gains*).

Bibit tersebut ditambah dengan kegagalan pemerintah sebagai penyeimbang pasar dan pertumbuhan murah yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dan terlalu sedikit berinvestasi pada pendidikan, infrastruktur dan riset dasar.

Perekonomian dunia saat ini terjadi kesenjangan yang tinggi antarnegara Utara-Selatan, antarpenduduk kaya dan penduduk miskin, antarprofesi-profesi, antarjabatan dan antar kelompok-kelompok personal yang memiliki bakat khusus dengan tidak, seperti antara penyanyi, pemain sepakbola, pemain basket, dan antaretnis. Sebagian ekonom meyakini pasar yang kompetitif dapat mengarahkan produksi dan penetapan harga yang efisien. Namun, kekuatan-kekuatan persaingan tidak dapat bekerja efektif dalam kondisi lemahnya atau ketiadaan para pesaing.

Apabila ada kekuatan pasar yang berlebihan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk

meningkatkan persaingan. Ada juga kegagalan pasar lain yang memerlukan campur tangan pemerintah. Kadang-kadang orang tidak memiliki informasi yang memadai untuk menilai kualitas produk. Oleh karena itu, pemerintah mengharuskan agar perusahaan-perusahaan obat-obatan membuktikan keamanan dan kemanjuran obat tersebut. Pemerintah juga mengatur industri-industri seperti perbankan dan listrik supaya berusaha melindungi konsumen dari iklan palsu dan penggambaran keuangan yang keliru, dan terlibat dalam keputusan penetapan wilayah kendali penggunaan ekonomis lahan.

Dalam era globalisasi ini pasar (produsen/kapitalis) memiliki kekuasaan finansial yang besar dalam perekonomian. Stiglitz, (2003) menjelaskan bahwa kekuasaan global terletak di sisi finansial, sehingga dengan kekuatan itu pasar (produsen) bisa menguasai opini dan persepsi konsumen pada media massa dan televisi. McLuhan (1996, dalam Briggs, 2000). Dalam hal ketidakseimbangan informasi pemerintah perlu membuat aturan dan melarang iklan yang tidak benar dan menyesatkan konsumen.

2. Titik Temu Ilmu ekonomi Pasar dan Sosialisme untuk mencapai kesejahteraan

Ilmu ekonomi normatif merupakan ilmu ekonomi yang menganalisis output atau kinerja perekonomian, perilaku ekonomi, dan mengevaluasi kebaikan dan keburukan dan pilihan tindakan atau kebijakan ekonomi. Sementara itu, ilmu ekonomi positif atau deskriptif merupakan penjelasan fenomena ekonomi yang bersumber dari fakta empiris. (Case, 2003).

Ada fenomena yang menarik untuk ditelaah pada era globalisasi sekarang. Negara maju khususnya negara kapitalis yang menganut ekonomi pasar ternyata mereka tidak menjalankan sistem ekonomi pasar secara penuh. Pemerintah memiliki otoritas dan kekuatan yang mampu menciptakan suasana ekonomi dimana pengusaha besar tidak semena-mena terhadap pekerja, dan usaha yang masih kecil diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Terjadi sinergi dan kehidupan yang harmonis antarpelaku ekonomi. Misalnya, Jepang memiliki suatu sistem Titsu sistem dimana usaha kecil

dan petani merupakan subkontrak dengan industri Jepang, sebagian *spart park* atau bagian dari input industri dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah. Akibatnya terjadi kemitraan usaha antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar (*multinasional*). Pemerintah melalui otoritas regulasinya mengatur perusahaan (pemilik modal), memberikan jaminan kesehatan, jaminan pensiun, upah minimum, aturan kelebihan jam kerja atau jam lebur, konsep ini di adopsi dari pemikiran sosialis.

Pengusaha besar, khususnya pedagang besar seperti mall dan supermarket di negara maju diatur jam bukanya-biasanya boleh buka dari jam 09.00 pagi hingga jam 05.00 sore dan pedagang kecil diberikan kebebasan jam untuk berbisnis. Ini merupakan adopsi paradigma redistribusi aset versi sosialisme.

China sebagai salah satu negara sosialis utama, pada akhir tahun 1990-an sudah membuka diri dengan ekonomi pasar, dimana investasi asing, perusahaan-perusahaan asing sudah bisa membuka cabangnya di China. Ini menandakan bahwa sosialisme sudah mengadopsi teori klasik yang mengatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan akumulasi modal. Dari informasi yang ada, Cina menyediakan suatu kawasan, sehingga dalam kawasan itu industri asing, dan perusahaan asing boleh menjalankan bisnisnya. Cina belum membuka pasar finansial, Cina hanya mau menerima investasi asing dalam bentuk investasi pada sektor riil, umpunya dalam pembangunan pabrik, pertambangan dan berbagai macam bidang usaha lainnya.

Negara kapitalisme menyadari bahwa ekonomi pasar memiliki eksternalitas negatif bagi kehidupan, seperti polusi udara, kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan informasi, kesenjangan maka pemerintah memiliki peran dalam penciptaan barang publik dan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin. Pemikiran ini mengadopsi pemikiran sosialisme tentang peran negara.

Beda halnya dengan Indonesia, yang kurang mampu menerapkan penegakan hukum secara pasti dan supremasi hukum dalam sistem perekonomian dan pelaku usaha. Faktanya usaha besar diberikan kesempatan seluas-luasnya mengambil aset-aset yang strategis, lokasi pasar yang strategis

seperti perkebunan besar oleh investasi asing sementara penduduk sendiri kesulitan untuk mendapatkan lahan pertanian. Pengusaha besar diberikan lokasi strategis di pusat kota untuk mendirikan mall dan supermarket pada hal di kota-kota besar ribuan pedagang kaki lima yang hidup di pinggir jalan.

Pelaku usaha jumlahnya tidak dibatasi dan diberikan kebebasan seluas-luasnya membuat usaha sehingga suatu bisnis amat cepat jenuh, dan memiliki keuntungan (*profit margin*) yang rendah. Umpamanya, untuk angkutan umum kota (angkot) pemerintah tidak membatasi jumlah angkot sehingga sopir angkot tidak lagi mendapatkan penghasilan yang layak, karena angkot sudah semakin banyak jumlahnya. Petani dibiarkan saja menanam sesuai dengan permintaan pasar sehingga pada saat panen, harga hasil pertanian langsung turun pada saat panen karena terjadi kelebihan pasokan di pasar. Pemerintah tidak memberikan informasi yang memadai kepada petani tentang estimasi permintaan dan potensi pasar sehingga petani amat mudah dipermainkan oleh pasar. Contoh, ketika harga komoditas cabe naik di pasar, semua petani mengalihkan penggunaan tanahnya ke tanaman cabe, namun ketika buah cabe sudah bisa dipanen harga cabe langsung turun karena cabe di pasaran jumlahnya melimpah.

Contoh lain juga bisa kita lihat, ketika bisnis wartel sedang menguntungkan, para pelaku usaha langsung menjadikan kios-kios atau rukonya menjadi bisnis wartel, selama ini ada aturan dari telkom misalnya, dibatasi jarak antar wartel, contoh : setiap 1 KM baru boleh didirikan 1 wartel. Namun, ketika diberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk membuka wartel, tumbuh bagaikan cendawan tumbuh, wartel berdiri setiap 100 meter, sehingga keuntungan pengusaha wartel menjadi hilang, karena terjadi kejenuhan pasar dan terpenuhinya teori *deminising return to scale*.

Untuk itu, perlu suatu paradigma baru, dimana setiap aliran pemikiran ekonomi ketika diterapkan menjadi sebuah sistem perekonomian memiliki titik kelemahan dan keunggulan. Ekonomi pasar berhasil menciptakan akumulasi modal, peningkatan motivasi pelaku ekonomi, pertumbuhan ekonomi namun gagal dalam membagi kekayaan agar lebih adil dan sering menimbulkan fluktuasi harga yang tajam sehingga terjadi krisis ekonomi. Pasar gagal karena ada dua

asumsi ekonomi pasar tidak terpenuhi yakni, semua pelaku usaha diasumsikan memiliki kekuatan finansial dan informasi yang sama sehingga persaingan bisa dilakukan secara fair. Namun sesungguhnya pelaku usaha memiliki kekuatan finansial yang berbeda dan informasi yang asimetris.

Ekonomi komando (sosialis) juga memiliki titik kelemahan, yakni kegagalan menciptakan pertumbuhan ekonomi, terjadi praktek korupsi di tingkat elit, akumulasi modal sulit untuk diciptakan, masyarakat secara luas tidak diberikan kebebasan beraktivitas dan berkarya sehingga motivasi individu semakin menurun. Akhirnya, titik temu antara ekonomi pasar dan ekonomi sosialis adalah, diberikannya kebebasan individu untuk memiliki kekayaan, namun pemerintah juga memiliki otoritas untuk mengurangi kegagalan pasar dan menciptakan barang publik sehingga lahirlah konsep negara kesejahteraan.

Pelaku usaha besar tidak boleh semena-mena terhadap pelaku usaha kecil dan pekerja. Pekerja dan pelaku usaha kecil juga perlu sinergi dengan usaha, besar untuk menjaga kesenambungan dan sustainabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi.

Pelaku ekonomi mesti memiliki kecerdasan dalam menggunakan alat tukar atau uang karena uang merupakan salah satu sumber kesejahteraan dan bisa juga uang menjadi salah satu sumber kemiskinan generasi berikutnya. Untuk menciptakan kesejahteraan dalam pendekatan sistem dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar : 1.3 Kesejahteraan Ekonomi Bangsa

BAB II

PARADIGMA PEMBANGUNAN

A. Asumsi

Ekonomi institusional merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan pendekatan idealistis yang bersumber dari hampir semua ilmu sosial, dengan konsep budaya, menggunakan data kualitatif, memberikan informasi pilihan, bersikap kolektif dan memfokuskan kajian pada kajian lebih komprehensif perilaku individu dan kemasyarakatan dengan metode ilmu ekonomi normatif (Paarlberg, 1993, dalam Yustika, 2006).

Ekonomi kelembagaan membangun beberapa asumsi yang menjadi dasar pengembangan keilmuan dan arah kebijakan, yakni :

1. Individu tidak memiliki informasi yang sempurna dan keterbatasan kapasitas mental karena ada ketidakpastian dan dampak yang tidak terduga sehingga diperlukan biaya transaksi untuk mendapatkan informasi tersebut, Menard dan Shirlley (2005).
2. Perlunya tindakan yang kolektif dari individu dan masyarakat (Samuels (1995, Yustika, 2006)
3. Lebih lanjut Samuels (1995) Yustika (2006) menjelaskan distribusi kekayaan yang terjadi sekarang ini merupakan alokasi yang dilakukan oleh kelembagaan masa lalu, sehingga pada saat distribusi itu tidak adil, pasar membuat perekonomian menjadi tidak adil. Untuk itu, perlu peran kelembagaan, struktur kekuasaan yang hidup di tengah masyarakat dan pemerintahan formal.

B. Paradigma Pembangunan

Pembangunan tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Ekonomi pasar meyakini bahwa tingkat bunga, dan harga menjadi tangan ajaib penarik dan pendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun keyakinan itu tentu saja tidak bisa dibenarkan. Negara maju yang telah mencapai titik masa kemapanan sekarang, sesungguhnya telah didahului oleh proses perkembangan yang panjang, yang diawali oleh sistem kelembagaan yang kuat. Setelah informasi tersedia dengan murah dan individu dalam negara memiliki tingkat kapasitas diri sudah semakin merata maka pasar mampu menciptakan suasana keseimbangan.

Di negara maju, sebagian besar rumah tangga sudah menggunakan sumber informasi yang memadai. Salah satunya adalah internet. Internet sebagai salah satu sumber informasi, masyarakat juga dengan mudah mendapatkan informasi harga, dimana ada lowongan kerja, dimana ada harga produk yang lebih murah, dengan kualitas tertentu. Tingkat pendidikan penduduk sudah hampir sama sehingga memiliki kompetensi yang relatif sama dan perbedaan upah kelas menengah dengan kelas bawah tidak terlalu tinggi. Artinya sistem pasar akan mampu menciptakan kesejahteraan yang optimal.

Akan tetapi, berbeda dengan negara berkembang, tingkat pendidikan penduduk masih amat berbeda dan setiap individu masih memiliki perbedaan dalam mendapatkan informasi. Untuk itu, diperlukan sistem hukum dan peran kolektivitas untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal. Sehingga memberikan leluasa pasar dalam menentukan arah pembangunan menjadikan sebagian masyarakat akan semakin miskin. Karena kekayaan negara akan terdistribusi kepada pemilik modal sementara rakyat hanya menjadi buruh di negerinya sendiri.

Sesuai cita-cita bangsa yang tertuang dalam konstitusi negara (pembukaan UUD 1945), kita ingin menciptakan suatu negara yang sejahtera adil dan makmur. Ini merupakan penegasan bahwa negara kita adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Inilah konsepsi dasar negara, bahwa kita ingin menciptakan suatu kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana manusia bisa mencapai tingkat kepuasan maksimal dalam memenuhi kebutuhannya (Pigou, 1952).

Pendekatan kebutuhan Maslow (1954, dalam Huitt, 2004) mengemukakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan (1) fisiologis: kebutuhan yang dasarnya, misalnya rasa lapar, haus, tempat berteduh, seks, tidur, oksigen, dan kebutuhan jasmani lainnya; (2) akan rasa aman: mencakup antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional; (3) sosial: mencakup kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki, kasih sayang, diterima-baik, dan persahabatan; (4) Kebutuhan akan penghargaan: mencakup faktor penghormatan internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi; serta faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian; (5) akan aktualisasi diri, mencakup hasrat untuk makin menjadi diri sepenuhnya kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya.

Ketika manusia mampu mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan pada tingkatan kelima oleh BKKBN (1983) bisa dinyatakan sebagai keluarga sejahtera III Plus. Namun dari hasil survey yang dilakukan oleh BPS pencapaian tingkat kesejahteraan yang diharapkan masih belum optimal. Jumlah orang miskin diperkirakan akan bertambah besar karena hilangnya daya beli masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam data statistik dimana pada masa orde baru, jumlah penduduk miskin pada tahun 1976 mencapai 54,2 juta (40,08%), tahun 1987 turun menjadi 30 jutaan (17,42%) dan sebelum krisis tinggal 22,5 juta (11,3%). Tetapi semenjak krisis terjadi diperkirakan sampai pertengahan 1998 saja jumlah orang miskin mencapai 79,8 juta (BPS, 1998 dalam Yustika, 2007). Hal ini kian diperparah lagi dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM yang terus memicu terjadinya inflasi

Kemampuan daya beli masyarakat merupakan salah satu ukuran yang biasa dipakai oleh lembaga survey untuk menentukan tingkat kemampuan ekonomi seseorang. Semakin tinggi kemampuan seseorang dalam membeli barang dan jasa, bisa dikatakan seseorang tersebut sebagai orang yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Dalam perhitungan daya beli seseorang bisa diilustrasikan sebagai berikut. Jika seseorang memiliki anggaran (*budget*) sebesar Rp 2.000,- untuk membeli beras perkilogram, namun harga beras di pasar mencapai Rp 4.000,- Artinya, daya belinya hanya $\frac{1}{2}$ dari harga pasar, atau daya beli masyarakat amat rendah, karena tidak mampu untuk membeli beras. Namun jika seseorang memiliki kebutuhan

beras perhari 2 kg, dengan harga Rp 4.000, perkilogram, sementara itu individu tersebut pendapatannya Rp 50.000-hari, dan mengalokasikan 20% untuk beras yakni senilai Rp 10.000,-, maka sebenarnya individu tersebut telah memiliki kelebihan anggaran Rp 2.000,-. Kelebihan tersebut juga bisa dikatakan sebagai kesejahteraan individu.

Untuk memudahkan kita menentukan apakah kita sudah masuk dalam kategori sejahtera, bisa diukur dengan anggaran (pendapatan) yang dimiliki, khususnya untuk mendapatkan barang dan jasa yang kita butuhkan. Jika kita merasa amat mahal harga-harga di pasar, ini berarti bahwa daya beli kita sudah rendah. Di Negara kita ada kecenderungan harga hampir setiap minggu mengalami kenaikan, sementara pendapatan dan produktivitas hampir tidak sama kenaikannya dengan harga di pasar, sehingga daya beli sebagian masyarakat cenderung selalu mengalami penurunan, khususnya masyarakat bawah (petani, nelayan dan pekerja).

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan individu mesti meningkatkan produktivitas kerja, investasi dan akumulasi kekayaannya. Namun sebagian besar rumah tangga terjebak pada lingkaran setan ketidakberdayaan ekonomi (*poverty*), oleh Nurkse (dalam Jhingan, 2003) dikatakan sebagai lingkaran kemiskinan, di mana produktivitas yang rendah disebabkan oleh rendahnya kekayaan (*capital*). Rendahnya kekayaan atau modal disebabkan karenanya rendahnya tingkat tabungan (*saving*). Rendahnya tabungan karena rendahnya tingkat pendapatan dan rendahnya tingkat pendapatan karena rendahnya keahlian (*human capital*). Rendahnya *human capital* karena rendahnya produktivitas.

Rendahnya produktivitas rumah tangga negara berkembang khususnya di Indonesia kuat dugaan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Soewardi (1999:76) mengemukakan bahwa kelemahan masyarakat Indonesia merupakan akibat dari budaya santai (*soft culture*) yang dicirikan sifat tidak adanya orientasi masa depan, tidak ada *growth philosophy*, cepat menyerah, berpaling dari akhirat dan lamban. Lebih lanjut Soewardi (1999) menemukan bahwa di kalangan rumah tangga yang berpenghasilan rendah dan tinggi ditemukan rendahnya karsa. Rumah tangga berpendapatan tinggi bersifat KKK (kuda lepas kandang) dan rumah tangga berpenghasilan rendah MKT (mobil kurang tenaga). Kedua

rumah tangga ini menambah penghasilannya bukan dengan pertumbuhan kuantitas produk dan jasa (*growth*). Akan tetapi, melalui perbesaran penghasilan "*Share*" atau pangsa dalam pembagian pendapatan. Dalam pertarungan itu lapisan ataslah yang mendapatkan pembagiaan (*share*) yang lebih besar. Akibatnya, kemudian lahir lah ketidakseimbangan pendapatan antara kelompok rumah tangga yang berpenghasilan tinggi dengan yang rendah. Fenomena ini bisa dilihat dari struktur kepemilikan aset produktif (*distribusi fungsional*). Sedikit orang tapi memiliki banyak aset, dan banyak orang memiliki sedikit aset. Orang dalam jumlah sedikit tersebut kadang-kadang amat menentukan keadaan ekonomi dan sosial di negeri ini, sementara orang dalam jumlah yang banyak, jadi buih di tengah lautan, di hempaskan oleh gelombang yang kuat.

Di sinilah sesungguhnya peran pemerintah dalam memotong lingkaran kemiskinan sebagai upaya untuk mempertinggi tingkat kesejahteraan penduduk. Berbagai upaya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Berbagai diskusi penulis dengan para pakar ekonomi, aktivis, birokrasi dan tim peneliti, diperoleh beberapa kesimpulan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia, diantaranya adalah pembangunan infrastruktur terutama luar pulau Jawa; pembangunan sektor pendidikan sebagai upaya membangun modal manusia; program *land reform* khususnya tanah yang dikuasi oleh pengusaha asing, dan bekas *erpach* penjajah Belanda ke petani, sehingga produktivitas petani meningkat; efisiensi penyelenggaraan birokrasi negara sehingga investasi untuk infrastruktur dan modal manusia lebih meningkat untuk mempertinggi produktivitas rakyat.

1. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi, alokasinya dana pembangunannya masih rendah, masih jauh rendah dari biaya rutin. Disamping rendah pembangunan infrastruktur juga dihadapkan dengan persoalan ketimpangan antardaerah sangat besar. Saat ini pembangunan infrastruktur terkonsentrasi di pulau Jawa. Fenomena ini sebenarnya tidak perlu disalahkan karena jumlah penduduk di negara kita ini terbesar di Pulau Jawa. Padahal

di Jawa sendiri juga terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur antara pesisir utara dan selatan, dibelahan selatan Jawa jauh tertinggal dibanding belahan utara. Pembangunan infrastruktur ini perlu dilakukan secara merata baik Jawa maupun luar Jawa, karena sarana jalan, jembatan, sekolah, pelabuhan, bandara udara mempunyai korelasi besar untuk membuka akses ekonomi suatu daerah. Apalagi di era globalisasi mobilisasi barang, orang dan jasa sangat cepat, kalau suatu daerah sarana infrastrukturnya belum memadai maka dapat dipastikan daerah tersebut akan tertinggal dibanding dengan daerah lain.

Pulau Jawa terhubung dengan sarana transportasi darat yang lebih baik, kereta api, jalan tol, jembatan, bahkan transportasi udara dan laut yang cukup baik. Di bidang pendidikan juga amat baik, banyak Perguruan Tinggi yang berkualitas. Infrastruktur pelabuhan dan bandar udara berskala internasional berada di Pulau Jawa, namun sebaliknya di luar Jawa masih sangat kurang. Faktor inilah yang menjadi daya tarik investasi industri di Pulau Jawa, faktor ini juga menarik penduduk luar Jawa merantau ke pulau Jawa sehingga pulau Jawa menjadi pulau terpadat di Indonesia bahkan di dunia.

Persoalan ini bukanlah persoalan kecemburuan individual masyarakat luar Jawa tetapi, lebih didasari oleh kesadaran untuk menciptakan keseimbangan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan bangsa dalam wadah negara kesatuan di masa mendatang. Ada kekhawatiran jika pola ini masih terus berlangsung maka solidaritas kebangsaan kita akan berkurang nilainya dan mempercepat proses desintegrasi bangsa. Dulu ketika dijajah oleh Belanda, ada kesadaran bersama bahwa bangsa asing ini harus diusir dari negeri ini. Kesadaran itu lahir dalam proses penjajahan selama 350 tahun dan setelah ada momentum perang dunia kedua. Sekarang konsesus itu masih terjaga dengan baik, namun ketika fungsi sosial negara dan peran negara menciptakan keadilan dan kesejahteraan tidak tercipta, semangat kebangsaan itu akan terus berkurang dan pada titik tertentu, semangat kedaerahan akan lebih kuat dibandingkan dengan nilai kebangsaan. Pada kondisi seperti itulah bangsa ini akan berakhir dan bubar.

Pengalokasian dana APBN, khususnya dalam pembagian dana alokasi umum (DAU) selama ini belum mencerminkan pada kebutuhan pengembangan potensi ekonomi dan sosial

masyarakat setempat. Sering kita jumpai bentuk pembangunan di suatu daerah tidak memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah itu. Ketika rakyat di daerah itu membutuhkan irigasi untuk pertanian yang diberikan adalah pembangunan kantor pemerintahan yang mewah. Artinya, karena kesalahan kebijakan pembangunan dapat dipastikan pertanian di daerah itu kurang berkembang. Sebaliknya pembagian dana alokasi pembangunan yang didasarkan pada formula luas wilayah, jumlah penduduk, indeks kemiskinan sebagai penentu jumlah anggaran yang dapat diperoleh oleh suatu daerah, sudah mencerminkan keadilan distributif, karena memang yang dibangun adalah rakyat di daerah tersebut, dan setiap pembangunan membutuhkan kecukupan anggaran, sumber daya manusia dan infrastruktur.

Akan tetapi, berbeda perlakuannya terhadap sumber keuangan negara yang berasal dari luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri khususnya pinjaman proyek (*loan*). Proses pinjaman luar negeri ini juga didorong oleh kepentingan pihak eksternal khususnya lembaga donor. Ketika suatu proyek dihitung dan dinilai kelayakan finansialnya (*feasibility study*), maka bisa dipastikan proyeksi pembangunan pulau Jawa akan lebih tinggi tingkat pengembalian investasinya (*rate of return*) dibandingkan dengan luar Jawa. Contoh, mana yang lebih layak membangun jalan tol antara Jakarta-Bandung atau Padang - Pekanbaru?, atau antara Surabaya - Jakarta dibanding antara Lampung-Aceh?, berdasar studi kelayakan pasti akan memilih lebih layak adalah Jakarta-Bandung dari pada Padang- Pekanbaru atau akan lebih layak Surabaya - Jakarta dari pada Lampung - Aceh. Alasannya, probabilitas kendaraan yang akan melewati jauh lebih besar dibandingkan dengan luar Jawa. Contoh lain, mana yang lebih layak membangun infrastruktur laboratorium di ITB Bandung atau di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh? Pertimbangan teoretis akan menjawab akan lebih layak ITB dibangun dibandingkan dengan Unsyiah. ITB mahasiswanya berasal dari siswa pilihan dari seluruh penjuru Indonesia, sedangkan di Unsyiah hanya berasal dari Propinsi NAD dan sebagian kecil Sumatera bagian Utara.

Dalam kondisi seperti ini, apabila pergantian hari, tahun, periode kepemimpinan nasional, pola kebijakan pembangunan masih mengandalkan *rate of return* dan kajian perbedaan *cost*

karena kebanyakan peserta belajar di perguruan tinggi berasal dari orang kaya. Berarti pemerintah mensubsidi pendidikan orang kaya. Padahal kalau ditelusuri lebih jauh mahasiswa kita terbesar adalah mereka yang termasuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, sebab orang kaya akan menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri, yang jelas standar dan mutu lulusannya.

Pemikiran yang keliru akibat "*pesanan*" donatur di atas tidak didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar mahasiswa di perguruan tinggi negeri adalah anak petani, nelayan dan pekerja. Virus itu sengaja disebarkan oleh kapitalis asing dengan maksud untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa kuli, dan tetap berada pada posisi negara terbelakang, miskin dan tidak punya daya saing. Sekarang sudah saatnya pemerintah tidak semerta-merta menjadikan pendidikan dasar sebagai tumpuan harapan untuk meningkatkan daya saing bangsa, tetapi mulai kembali ke jalan yang benar, meningkatkan anggaran pendidikan tinggi sebagai upaya untuk transfer teknologi dan meningkatkan nilai tambah produk masyarakat dan mempertinggi kesejahteraan. Seharusnya, peningkatan jumlah anggaran untuk pendidikan tinggi akan signifikan mengurangi kontribusi rumah tangga mendapatkan pendidikan dan penduduk yang berhasil menamatkan Pendidikan Tinggi akan semakin besar. Sehingga secara vertikal akan menjadi motor peningkatan mobilitas kemakmuran masyarakat karena semakin tingginya tingkat pendidikan rakyat akan semakin besar kemungkinan produktivitas masyarakat itu akan semakin meningkat.

Dalam ilmu ekonomi ada keyakinan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini Becker (1975) menjelaskan tentang peran modal manusia dan pembangunan. Becker (1975) merupakan salah satu ahli ekonomi yang mendalami kajian tentang pembentukan modal manusia, peran modal manusia dalam perekonomian. Beliau menjelaskan bahwa pembentukan modal manusia itu bisa dilakukan dengan 4 cara yakni : (1) pendidikan formal yang berjenjang (*Schooling*), (2) pendidikan dan latihan kerja (*job training*), (3) migrasi (*migration*) atau merantau, (4) proses mencari kerja atau mencari harga yang lebih kompetitif (*searching dan hunting*).

Kebijakan pendidikan sebenarnya secara lebih khusus bisa dikategorikan sebagai suatu kebijakan yang sistematis dilakukan untuk mempertinggi kompetensi anak bangsa dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Karena sumberdaya yang terbatas, biasanya mesti ditentukan apa yang menjadi pilihan alokasi anggaran yang harus dilakukan.

Tabel 2.1: Pilihan, Strategi, Manfaat dan Eksternalitas Kebijakan Pendidikan

Pilihan	Strategi	Manfaat dan Eksternalitas
Mempertinggi melek huruf	Pendidikan dasar	Mengurangi buta huruf masyarakat sehingga kemampuan masyarakat dalam membaca informasi akan semakin tinggi sehingga akan semakin rasional dalam bertindak. Namun produktivitas lebih rendah
Mempertinggi melek teknologi	Pendidikan menengah dan Perguruan Tinggi	Produktivitas rakyat akan meningkat, fleksibilitas generasi muda untuk masuk ke dunia kerja akan semakin tinggi

Psacharopoulos (1995) melakukan analisis di Venezuela pada tahun 1989, melihat perbandingan antara tingkat penghasilan yang diperoleh oleh individu berdasarkan tingkat pendidikan. Sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.1 Profil umur dan tingkat pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan (Sumber, Psacharopoulos, 1995)

Psacharopoulos (1995), juga menemukan tingkat pengembalian investasi berdasarkan tingkat pendidikan, baik yang diterima oleh individu maupun pengembalian investasi bagi masyarakat. Sebagai mana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2: Pengembalian Investasi Pendidikan Individu dan Sosial

Tingkat Pendidikan	Returns Pribadi	Returns Sosial
Pendidikan Dasar	29,4	19,5
Pendidikan menengah	10,2	7,9
Pendiidkan Tinggi	12,4	7,1

(sumber : Psacharopoulos, 1995)

Tingginya pengembalian investasi (*returns*) yang diperoleh dari pendidikan dasar karena investasi yang ditanamkan di tingkat pendidikan dasar lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan menengah, dan tinggi. Akan tetapi, nilai hasil yang diperoleh pendidikan tinggi lebih besar dibandingkan dengan tingkat pendidikan menengah dan dasar sebagaimana terlihat pada gambar 2.1.

Faktor manusia (SDM) merupakan faktor yang

dominan dalam penentuan kinerja dan produktivitas negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Kuantitas suatu produk yang akan dihasilkan dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, modal, tenaga kerja, teknologi dan lain-lain. Fungsi produksi ini disederhanakan dalam bentuk hubungan matematis antara output (Q) yang dihasilkan dengan input produksi. Dimana Q merupakan fungsi dari modal, tenaga kerja, lahan, teknologi dan lain-lain. Secara matematis bisa dituliskan $Q = f(K, L, M, \dots, N_i)$. Dalam analisis biasanya disederhanakan menjadi dua variabel saja yang mempengaruhi output, yakni output (Q), dipengaruhi oleh jumlah modal (K) dan tenaga kerja (L) dan faktor lainnya (N_i).

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan output ekonomi, sehingga analisis ekonomi yang dipelopori Adam Smith, Jhon Stuart Mill, Theodore Schultz, Hervey Leibenstein dan Garry S Becker (1960-an) Schultz (1960), Boli - Bernet (1977). Collins (1979) Robinson (1985), (Todaro, 2003) (dalam Sanderson, 2003), menguraikan bahwa faktor manusia atau tenaga kerja merupakan faktor yang amat penting dalam pembentukan output dalam perekonomian nasional termasuk dalam skala rumah tangga.

Kajian ekonomi tentang sumber daya manusia dalam perekonomian diletakkan fondasinya oleh Malthus, Gary S. Bekker (1962) dalam artikelnya berjudul "*Investasi in Human Capital: A Theoretical analysis*" yang diterbitkan oleh jurnal of polical economi LXX. Dan tahun 1964 Becker mempublikasikan tulisan itu dalam bentuk buku berjudul "*Human Capital 1 st ed*", yang diterbitkan di New York : Columbia University Press. Kemudian kajian tentang tenaga kerja juga ditelaah oleh Jacob Mincer (1962), Theodore W. Shultz (1963) *The Economic Value of Educatioan*. Selanjutnya Jacob Mincer (1974) juga memberikan kontribusi pemikiran tentang *educatioan, experience dan Earning* (1974) dan George Psacharopoulos (1975) tentang *Earning and Educatioan in OECD Countries*. Pada tahun 2002 Psacharopoulus juga memberikan kontribusi empiris pada penelitian "*Return to Investment in education: A Futher update*" yang diterbitkan oleh world bank.

Proses pendidikan akan memberikan bekal kepada manusia untuk lebih ahli, lebih cermat dan lebih teliti sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja di perusahaan dan

lapangan perekonomian lainnya. Sementara itu, dalam perekonomian, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk atau akumulasi modal manusia akan semakin tinggi tingkat output nasional suatu negara, termasuk juga semakin mapan suatu negara dalam mencapai tingkat pertumbuhannya.

Indonesia sebagai sebuah bangsa terlahir dalam sebuah perjuangan yang panjang. Lebih dari 350 tahun dibawa kendali bangsa Portugis, Inggris, Belanda, dan Bangsa Jepang. Selama itu pula proses eksploitasi ekonomi, politik, sosial dan budaya terjadi sehingga terjadi perubahan budaya dan etos kerja manusia Indonesia. Potensi positif yang telah ada dan berkembang ditengah komunitas masyarakat berubah menjadi potensi negatif sebagai akibat dari politik pecah belah penjajah sehingga menimbulkan budaya kerja yang kurang baik. Sebaliknya proses penjajahan itu efek baiknya bagi bangsa adalah terbangunnya nasionalisme dan rasa kebangsaan dan solidaritas sesama terjajah sehingga menjadi spirit untuk bangkit dan merdeka menjadi negara yang bermartabat.

Dengan demikian, rasionalisasi ekonomi pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan dan diperhatikan kualitasnya sehingga tetap menjadi modal dasar pembangunan. Program kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana semestinya adalah program prioritas yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga agar penduduk tetap menjadi potensi pembangunan dan modal dasar pembangunan untuk kejayaan dan kesejahteraan dan keadilan bersama, berbangsa dan bernegara. Disamping itu, perlu juga dikembangkan kembali semangat dan nilai-nilai sosiokultural sebagai dasar dan model pembangunan yang relevan untuk memperkuat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan sumberdaya manusia Indonesia ke depan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, khususnya mempertinggi kualitas modal manusia dalam usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan dan rendahnya daya saing bangsa merupakan persoalan utama dari perekonomian Indonesia. Rendahnya produktivitas rumah tangga di Indonesia kuat dugaan disebabkan oleh beberapa faktor, yang kita kenal dengan lingkaran kemiskinan. Rendahnya pendapatan karena rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas karena rendahnya modal. Rendahnya modal karena rendahnya nilai tabungan rendahnya nilai tabungan karena rendahnya pendapatan.

Membangun sistem pendidikan yang mapan, dengan berorientasi pada keunggulan bersaing merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM. Pendidikan merupakan usaha menciptakan manusia siap memasuki zaman yang selalu berubah. Potensi dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia membuat manusia bisa berpikir dan selalu belajar sebagai salah satu tugas kemanusiaannya. Ahli sosiologi dan antropologi membagi beberapa jenis aktivitas dan kemampuan manusia untuk bisa beradaptasi, transformasi kebudayaan dan evolusi kebudayaan, dengan lingkungan. Diantaranya adalah sosialisasi (*socialization*), internalisasi (*internalization*) dan enkulturasi (*enculturation*), (Koentjaraningrat, 2002).

Dengan demikian, perbaikan layanan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) itu merupakan kebijakan yang amat penting dilakukan, termasuk layanan pendidikan, kesehatan dan program lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM tersebut (Todaro, 2003)

Secara legal menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa beretika (beradab dan berwawasan budaya bangsa Indonesia) memiliki nalar (maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab), berkemampuan komunikasi sosial (tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, demokratis) dan berbadan sehat sehingga menjadi manusia mandiri.

Upaya pendidikan pada jenjang sekolah diharapkan bisa membangkitkan karsa generasi muda, mengurangi sifat kemalasan dan meningkatkan etos kerja dan semangat kerja yang tinggi dan meningkatkan melek huruf, informasi dan teknologi. Sistem pendidikan pada jenjang sekolah mestilah memiliki karakteristik lokal, nilai kebangsaan dan membangun paradigma pada kecerdasan finansial. Pembangunan paradigma kecerdasan finansial ini merupakan solusi atas rendahnya karsa, rendahnya produktivitas masyarakat dan terbiasanya generasi muda sekarang dengan kebiasaan konsumtif atau pola hidup hura-hura.

Pemimpin dunia, 189 negara yang tergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), tahun 2000 mencanangkan program *Millenium Development Goals* (MDGs) dengan visi sebagai berikut: (1) menanggulangi kemiskinan

dan kelaparan (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (4) menurunkan kematian anak (5) meningkatkan kesehatan ibu (6) memerangai HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan. Berguna sebagai salah satu upaya untuk mengurangi persoalan kependudukan.

3. Redistribusi tanah

Penguasaan tanah oleh petani rakyat di Indonesia relatif rendah, rata-rata rakyat yang memiliki tanah di atas 0,3 hektar di Indonesia hanya sekitar 40%. Rendahnya penguasaan tanah ini diyakini menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat penghasilan petani di Indonesia. Keyakinan yang dalam sesungguhnya semakin tinggi tingkat penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian oleh petani, probabilitas untuk mendapatkan penghasilan akan lebih meningkat. Karena tanah merupakan salah satu faktor pembentukan hasil pertanian.

Kalau dicermati penguasaan tanah di Indonesia, sebagian besar lahan yang produktif dan lahan yang subur dikuasai oleh pemilik modal termasuk BUMN. Penguasaan ini tidak terlepas dari momentum nasionalisasi aset nasional pada saat konflik dengan Belanda sebelum kemerdekaan dan pada saat, semua bekas penguasaan tanah milik pengusaha Belanda dinasionalisasi pada saat perjuangan trikorra merebut Irian Barat.

Pada masa dahulu, tanah-tanah ini merupakan tanah yang dikuasai oleh Belanda dan perusahaan-perusahaan Belanda dalam bentuk *erpach*. Pemerintah Hindia Belanda memiliki hak untuk menguasai dan peruntukkan namun setelah Indonesia merdeka tanah-tanah ini menjadi penguasaan negara (pemerintah Republik Indonesia) dan sekarang dijadikan sebagai aset Badan usaha milik negara (BUMN) dan sebagiannya di peruntukkan bagi pengusaha melalui HGU (hak guna usaha).

Pertanyaannya sekarang benarkah penguasaan BUMN itu akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi petani? Secara teoritis sebenarnya dapat dikatakan semakin tinggi penguasaan lahan oleh pengusaha maka akan *trade off* dengan kepemilikan

petani, sehingga bisa dikatakan semakin tinggi luas lahan yang dimiliki oleh pengusaha maka akan mengurangi tingkat pendapatan petani.

Pertanyaan inilah yang pernah dilontarkan oleh penggerak petani di awal tahun 1960-an sampai meletusnya pemberontakan G 30 S PKI. PKI menjadikan isu ini menjadi salah satu bahan materi kampanye dan perjuangan untuk merebut hati petani namun karena momentum dan idiologi perjuangannya tidak tepat dan sebagian ajaran-ajarannya tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keyakinan syariah akhirnya perjuangan ini menjadi kandas. Sejak itu perjuangan untuk melakukan *land reform* amat hati-hati dilakukan oleh para penggerak sosial karena bisa jadi akhirnya mati atau dipenjarakan karena divonis sebagai antek-antek komunis. Pada hal perjuangan untuk melakukan *land reform* sebenarnya adalah sesuatu yang amat mulia, artinya bagaimana tanah yang sudah dikuasi oleh pemilik modal dan negara kembali diserahkan kepada rakyat sehingga produktivitas dan kesejahteraannya meningkat, khususnya petani penggarap.

4. Efisiensi Anggaran Birokrasi

Efisiensi penyelenggaraan birokrasi negara sangat perlu dilakukan. Jika anggaran birokrasi bisa dikurangi maka peluang untuk mengalokasikan anggaran yang dihemat untuk investasi sumberdaya manusia dan infrastruktur bisa ditingkatkan, untuk mempertinggi produktivitas rakyat. Akan tetapi pemikiran ini selalu bertentangan dengan pemikiran sebagian ekonom newklasik yang meyakini upaya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat adalah meningkatkan anggaran negara khususnya peningkatan kesejahteraan aparatur negara dengan berbagai model kebijakan salah satunya adalah meningkatkan anggaran rutin sehingga konsumsi pemerintah meningkat sehingga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi.

Terjadi perdebatan yang panjang antara pemikiran ini dengan kelompok yang lebih cenderung melakukan efisiensi birokrasi dan melakukan investasi dan pembangunan infrastruktur ekonomi. Mana yang lebih baik, mari kita rasakan

bersama, jika pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan upaya meningkatkan biaya rutin, benar disisi lain juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun dalam jangka panjang produktivitas penduduk tidak bisa ditingkatkan karena penduduk tidak memiliki sarana produksi yang memadai termasuk infrastruktur sebagai urat nadi perekonomian.

BAB III

PEMBANGUNAN EKONOMI, PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA (Kajian Makro)

Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1966 mencatat sektor pertanian berkontribusi lebih dari 53% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Data tersebut menandakan kalau Indonesia merupakan salah satu negara agraris. seiring perubahan zaman, kontribusi sektor pertanian kian menurun, sehingga pada akhir tahun 1992 kontribusinya tinggal 36%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor industri, yang mencapai 350 % lebih besar dari tahun dekade 1960-an. Kontribusi sektor industri, jasa dan perdagangan memang cukup signifikan terhadap pembentukan PDB. Sebagai contoh, pada akhir tahun 1981 tercatat kalau kontribusi total ketiga sektor tersebut mencapai sebesar 62,7 %. Pola perubahan ini kemudian dinilai sebagian kalangan sebagai jalur transformasi yang baik bagi Indonesia.

Kenaikan nilai tambah sektor industri, jasa dan perdagangan di satu sisi memberikan dampak pada penurunan nilai tambah pada sektor pertanian. Berkurangnya kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan *output* nasional diperkirakan disebabkan dua faktor, yakni : 1) meningkatnya kuantitas unit dan rupiah *output* sektor industri dan jasa dan 2) berkurangnya perhatian dan alokasi sumber daya terhadap sektor pertanian.

Selanjutnya, perubahan struktur ekonomi belum tentu memberikan manfaat ekonomi secara langsung terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Bahkan ada kecenderungan justru memicu mencuatnya persoalan kesenjangan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan antarsektor dan daerah semasa transisi stuktur ekonomi menjadi persoalan baru dalam dinamika ekonomi Indonesia. Pembangunan sektor industri di

perkotaan menarik penduduk melakukan migrasi (*rural urban migration*) dari desa ke kota. Dalam jangka panjang urbanisasi tersebut membuat kepadatan penduduk di perkotaan semakin tinggi, dan pertumbuhan penduduk perkotaan yang bersumber dari perpindahan penduduk pedesaan (*rural urban migration*) berikut tingginya tingkat kelahiran, membuat pertumbuhan perekonomian kota tidak sebanding dengan kuantitas angkatan kerja, akibatnya terjadi pengangguran perkotaan.

Dampak lain dari pembangunan sektor industri ini adalah terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan di daerah-daerah, yang ironisnya tidak diiringi dengan pembangunan industri-industri baru pada daerah tersebut sebagai turunan produk dari input yang dieksploitasi. Unit bisnis atau industri tidak berlaku di daerah tersebut, namun cenderung bisnis unit terjadi di perkotaan atau menjadi komoditi ekspor. Bisnis unit atau entitas ekonomi sebagai usaha pengolahan bahan baku (pabrik) dan rantai distribusi atau kegiatan perdagangan terjadi di luar Indonesia. Produk primer (*Primer product*) yang diekspor tersebut relatif memberikan nilai tambah yang lebih rendah pada perekonomian Indonesia dan tidak memberikan *multiflier effect* yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Dengan demikian, potensi ekonomi sumber daya alam daerah terkuras habis dan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat lokal.

Pada dekade tahun 1970-an hingga 1990-an dikenal dengan masa kejayaan ekonomi Indonesia dengan data BPS menunjukkan pertumbuhan rata-rata mencapai 7% pertahun. Data-data makro yang dikeluarkan BPS selalu memunculkan data statistik yang mengembirakan. BPS mempublikasikan pada tahun 1976, persentase penduduk miskin di daerah urban dan pedesaan berjumlah sepertiga dari total penduduk yang kemudian berkurang lebih dari separuhnya pada tahun 1993. Sebagian peneliti yang lebih cermat menilai bahwa angka-angka tersebut masih kabur dan membingungkan. Studi Ravallion dan Hippi tahun 1991 (dalam, Hill: 1999) menemukan bahwa kemiskinan agregat diukur dari sisi pendapatan memang menurun drastis antara tahun 1984 sampai 1987. Tetapi kajian Edmunson (1994), Hardjono (1993) dan Singarimbun (1993) membantah penelitian tersebut karena meskipun ada peningkatan standar hidup proses pemiskinan (*impovershment*)

dan peningkatan kesenjangan juga kian masif. Indikasinya tergambar dengan masih rendahnya pendapatan masyarakat atas standar hidup normal dan penyebaran kekayaan yang belum adil, khususnya pada sektor non pertanian. Meskipun begitu, ketiga penelitian yang terakhir juga menemukan pada kasus sektor pertanian, distribusi kekayaan relatif merata di masyarakat.

Upaya negara dalam usaha meningkatkan perekonomian Indonesia adalah dengan melakukan perubahan struktur perekonomian. Dari sektor pertanian sebagai sektor yang dominan ke sektor industri dan jasa sebagai sektor unggulan. Pemerintah memberikan perhatian serius pada peningkatan sektor nonpertanian terutama sektor industri, pertambangan dan jasa.

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah benarkah perubahan struktur ekonomi nasional dari sektor pertanian ke sektor industri akan berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan yang lebih adil. Faktanya menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi sektor industri, perdagangan dan jasa dalam pembentukan PDB sebagai proses transformasi ekonomi tidak memberikan pengaruh langsung terhadap distribusi pendapatan yang lebih baik di Indonesia

Peningkatan produk domestik bruto yang bersumber dari sektor industri, perdagangan dan jasa memberikan pengaruh langsung terhadap pendapatan per kapita. Transformasi ekonomi yang terjadi dari tahun 1970 - 2003 melalui 4 fase, yakni fase kejayaan minyak bumi, resesi ekonomi, pertumbuhan ekspor dan krisis moneter. Selama tahun pengamatan sektor industri dan sektor perdagangan dan jasa mengalami peningkatan yang cukup berarti dari sebesar 36,92% dan 33,89% pada tahun 1970, dan pada tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi 45,11% dan 39,69%. Pembangunan sektor pertanian dan transformasi pertanian tetap harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah karena sektor ini memberikan sumbangan kesempatan kerja yang banyak dan distribusi pendapatan yang lebih adil di Indonesia. Peningkatan sektor industri dan perdagangan memang memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan per kapita namun tidak memberikan pengaruh langsung terhadap

distribusi pendapatan. Dalam bidang industri sesungguhnya subsektor industri pengolahan barangkali yang memberikan pertumbuhan kesempatan kerja yang cukup memadai dalam rangka perbaikan distribusi pendapatan. Dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan nasional yang lebih adil yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia sebagai peningkatan *human capital*, kepemilikan lahan produktif yang lebih merata (*land reform*), dan peningkatan investasi pada industri pengolahan substitusi impor dan orientasi ekspor

A. Transformasi Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Transformasi ekonomi di Indonesia bisa dikatakan konsisten dan relatif cepat berlaku. Hal ini terlihat dari perkembangan ekonomi. Di pertengahan tahun 1960-an sumbangan sektor pertanian mencapai 53% namun sepuluh tahun kemudian berkurang lebih dari setengahnya. Pada tahun 1970 sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDB berkurang menjadi 29,18%. Selama periode pengamatan sejak tahun 1970 hingga tahun 2003 rata-rata penurunan sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan PDB sebesar minus 0,18 %, hingga akhir tahun 2003 sektor pertanian memberikan sumbangan tinggal sebesar 15,20%. Penurunan ini diimbangi dengan kenaikan sumbangan sektor Industri, perdagangan dan jasa. Pada periode tahun 1970 - 1981 sumbangan sektor industri mengalami kenaikan dari 36,92%. Pada tahun 1970 naik menjadi 39,30% pada tahun 1981. Peningkatan sumbangan sektor industri ini terjadi sampai pada tahun akhir tahun 1980-an ketika terjadi resesi ekonomi dan kenaikan harga minyak bumi dunia. Dan pada awal tahun 1990-an sektor industri pengolahan mulai mengalami peningkatan secara berlahan dimulai sebesar 21,58% pada tahun 1990 dan mengalami peningkatan menjadi 28,17% pada tahun 2003. Selama tahun pengamatan rata-rata sektor industri mengalami peningkatan sebesar 0,15%. Peningkatan ini seiring dengan mulai berhasilnya program pengembangan industri nonmigas yang berorientasi ekspor dan peningkatan eksploitasi pertambangan hasil alam dan minyak bumi di Indonesia.

Beriring dengan peningkatan sektor industri, sektor perdagangan dan jasa juga mengalami peningkatan. Pada

akhir tahun 1970 sektor ini memberikan sumbangan sebesar 33,89% dan sepuluh tahun kemudian yakni pada tahun 1981 naik menjadi sebesar 39,03%. Kenaikan sumbangan sektor perdagangan dan jasa ini berhenti sementara pada tahun 1997 pada saat terjadinya krisis moneter di Indonesia yakni menjadi 41,00%, dan mulai tahun 1998 turun menjadi 38,44% dan terus merangkak naik, hingga pada akhir tahun 2003 sumbangan sektor perdagangan dan jasa menjadi 39,69%. Secara rata-rata selama tahun pengamatan, yakni periode 1970 - 2003 sektor perdagangan dan jasa ini mengalami peningkatan sebesar 0,36 % sumbangannya terhadap pembentukan PDB (gambar : 2.1)

Gambar 3.1 : Grafik Perubahan Struktural , 1970 - 2003

Sumber: BPS, di ukur berdasarkan harga berlaku, grafik diolah

Hasil riset yang dilakukan oleh Hill (2003) ada dampak yang signifikan dari fluktuasi harga minyak bumi terhadap gerak perubahan struktural yang terjadi. Kenaikan harga minyak bumi sangat memperbesar kenaikan sumbangn sektor industri dan mempercepat turunnya sumbangan sektor pertanian. Dengan mengabaikan sumbangan sektor pertambangan. Penurunan sektor pertanian sesungguhnya lebih lambat. Sebaliknya pada periode fase keberhasilan industri nonmigas berorientasi ekspor pada periode akhir tahun 1980-an sampai pertengahan tahun 1990-an sektor industri lebih cepat jika dikesampingkan sumbangan sektor pertambangan. Periode pertumbuhan ekonomi tinggi pada akhir tahun 1970-an hingga awal tahun

1990-an merupakan dorongan dari bantuan dan hutang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur dan investasi energi khususnya pada minyak bumi. Pada pertengahan tahun 1990-an hutang luar negeri Indonesia hanya \$ 2,4 Milyar USD namun pada awal tahun 1990-an naik menjadi \$ 84,385 Milyar USD.

Disatu sisi perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian yang dominan menjadi sektor industri dan jasa yang dominan memberikan dampak yang baik dalam penyerapan angkatan kerja. Akan tetapi, muncul pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dampak perubahan struktur perekonomian tersebut keadilan distribusi pendapatan di Indonesia?

Selama periode pengamatan mulai dari tahun 1970 hingga 2003, rasio gini yang diperoleh dari hasil publikasi BPS sebagai sensus sosial ekonomi nasional (Susenas) menunjukkan tidak ada perubahan yang berarti. Pada akhir tahun 1970 rasio gini terletak pada besaran 0,35 dan pada tahun 2003 berubah menjadi 0,32 dan secara rata-rata gerakan rasio gini berada pada besaran 0,34. Sementara itu kondisi pemerataan yang terbanyak terjadi pada kondisi 0.33 dan kondisi yang paling merata berada pada posisi 0.32, yakni pada tahun 1987, 1990 dan 2003. Kondisi yang paling tidak merata terjadi pada tahun 1978, yakni berada pada kondisi 0,40. Ketidakerataan perekonomian pada tahun 1978 karena kenaikan harga minyak bumi tidak sepenuhnya dinikmati oleh seluruh penduduk, tetapi dinikmati oleh kelompok elit saja, khususnya kalangan pemerintah dan pengusaha. Kuznets mengatakan bahwa, di awal pertumbuhan ekonomi ada kecenderungan distribusi pendapatan memburuk namun pada tahap berikutnya hal ini akan membaik. Jika diamati dengan perjalanan perekonomian Indonesia dari tahun 1970 - 2003, hal ini tidak terlalu sama dengan hipotesis Kuznets. Namun demikian, dari data yang diamati ada kecenderungan distribusi pendapatan di Indonesia akan semakin membaik, seperti terlihat dalam gambar 3.2 berikut ini.

Gambar 3.2 Grafik Hipotesis Kuznet antara PDB Perkapita dan Gini Rasio, Tahun 1970 -2003 *Sumber: BPS, Grafik diolah*

Dengan demikian, peningkatan sektor industri dan sektor perdagangan dan jasa tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Secara statistik diperoleh hasil f hitung sebesar 1,248 dan T tabel pada n 17 dan α 0,05 adalah sebesar 1,746. Artinya hipotesis nol yang dibangun pada awal penelitian ternyata ditolak. Transformasi ekonomi dari sektor pertanian yang dominan dalam perekonomian nasional ke sektor industri, perdagangan dan jasa tidak memberikan dampak langsung terhadap distribusi pendapatan yang merata.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bruton (1977), Hsia dan Chau (1978), Morawetz (1974) (dalam Bigsten :1992) bahwa industrialisasi atau perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke sektor industri tidak memberikan pengaruh langsung terhadap distribusi pendapatan dan secara statistik bisa dikatakan kabur. Penelitian Arief (1983) tentang pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada penyedotan minyak bumi dan pembangunan perkebunan besar, karena itu, maka ketimpangan hampir pasti naik, sejalan dengan angka rasio gini pada tahun kebangkitan

minyak bumi tahu 1970 - 1980 dimana rasio gini berkisar pada angka 0,35 hingga 0,40 (gambar 2.3)

Gambar 3.3 : Trend Gini Rasio Pengeluaran Rumah Tangga, 1970 - 2003 . Sumber: BPS, 2003, grafik diolah

Distribusi pendapatan yang tidak membaik sejak tahun 1970 diperkirakan disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya pertama pasar faktor produksi (*pasar input*) adalah meningkatnya penawaran tenaga kerja mengakibatkan terjadinya kelebihan tenaga kerja, upah buruh yang rendah dan keterbatasan kesempatan kerja di perkotaan mengakibatkan terjadinya pengangguran dan daerah kumuh perkotaan. Ketika sektor formal perkotaan tidak bisa menampung penduduk migrasi dari desa (*rural urban migration*), sektor informal menjadi alternatif untuk hidup bagi rakyat. Sukernas 2002 mempublikasikan bahwa 69,63% bekerja pada sektor informal dan hanya 30,37% pada sektor formal. Penduduk yang bekerja pada sektor informal ini lebih dari 73,5% adalah penduduk yang berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah sementara itu yang tamatan SLTP sebesar 16%.

Data tahun 1998, menunjukkan bahwa jenis pekerjaan

yang banyak dilakukan oleh pekerja sektor informal adalah 58 % bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, diikuti oleh perdagangan besar, eceran dan rumah makan 21,77 %, industri pengolahan 6,84 %, angkutan, pergudangan dan komunikasi 4,82 %. Mencermati tingkat pendidikan yang rendah dan bidang pekerjaan sektor informal, pendapatan yang diperoleh tentu rendah. Karakteristik pekerjaan di Indonesia pada tahun 1971 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian yakni 65,8%, sektor industri 13,3%, jasa dan perdagangan 24 % dan tahun 1990 sektor pertanian yakni 50,1 %, sektor industri 17,0 %, jasa dan perdagangan 32,9 %

Kedua, kepemilikan lahan. Data dari sukernas menunjukkan bahwa kepemilikan lahan di Indonesia hanya 49% rumah tangga yang mengelola lahan lebih dari 0,2 hektar. Sejalan dengan penelitian Quan dan Koo (1985) (dalam Bigsten: 1992) distribusi lahan adalah determinan utama distribusi pendapatan dan luasnya kemiskinan.

Ketiga, Pemilikan modal manusia (*human capital*), manusia sesungguhnya adalah modal yang aktif dalam pembangunan, peningkatan produktivitas dan *benefit* modal manusia sangat ditentukan oleh keahlian dan pendidikan yang dimiliki oleh individu. Secara *agregate* kemampuan modal manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya dan angkatan kerja. Ukuran keberhasilan pembangunan manusia yang lebih dikenal dengan HDI (*Human development index*) menunjukkan pada tahun 1999 angka harapan hidup orang Indonesia adalah 66,2 tahun, angka melek huruf 88,44%, rata-rata lama bersekolah 6,7 tahun (rata-rata tamat sekolah dasar). Lama bersekolah atau tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk merupakan salah satu ukuran produktivitas penduduk, dengan pemikiran bahwa semakin tinggi pendidikan individu kemungkinan mendapatkan penghasilan lebih tinggi semakin besar. Kalau dihubungkan dengan orang yang bekerja, data sakernas tahun 2002 pada sektor formal dan informal yang sebagian besar yakni sebesar 60,9% pekerja berpendidikan tamat SekolahDasar (SD) ke bawah sementara tamatan SLTP hanya 16,7%, tamat SLTA 15,7% dan pekerja yang tamat perguruan tinggi hanya 4,7%.

B. Kesimpulan

4. Peningkatan sumbangan sektor industri, perdagangan dan jasa dalam pembentukan PDB sebagai proses transformasi ekonomi tidak memberikan pengaruh langsung terhadap distribusi pendapatan yang lebih baik di Indonesia.
5. Peningkatan produk domestik bruto yang bersumber dari sektor industri, perdagangan dan jasa memberikan pengaruh langsung terhadap pendapatan per kapita.
6. Transformasi ekonomi yang terjadi dari tahun 1970 -2003 melalui 4 fase, yakni fase kejayaan minyak bumi, resesi ekonomi, pertumbuhan ekspor dan krisis moneter. Selama tahun pengamatan sektor industri dan sektor perdagangan dan jasa mengalami peningkatan yang cukup berarti dari sebesar 36,92% dan 33,89% mengalami peningkatan menjadi 45,11% dan 39.69% pada tahun 2003.

BAB IV

ANALISIS IMPOR, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

A. Perkembangan Nilai Impor Indonesia (1996 - 2005)

Impor merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Berbagai produk yang belum bisa dihasilkan di dalam negeri dibeli ke luar negeri melalui proses impor. Jenis produk-produk tersebut dalam statistik perdagangan Indonesia digolongkan pada tiga (3) jenis barang ekonomi, yakni barang konsumsi, barang bahan baku penolong, dan barang modal. Perkembangan nilai impor setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat lokal di Indonesia.

Persentase nilai GDP (*gross domestic product*) Indonesia yang digunakan untuk impor mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada tahun 1998 dan 1999 atau di saat terjadi krisis ekonomi terhadap perekonomian Indonesia dan kemudian pada tahun 2001. Selanjutnya sampai pada tahun 2005 persentase nilai GDP yang digunakan untuk pembiayaan impor selalu terus mengalami kenaikan yang nilainya lebih dari 10% atau sekitar 13,94%. Hal ini berarti bahwa Indonesia masih membutuhkan beberapa jenis barang yang belum dihasilkan di dalam negeri atau ada kecenderungan masyarakat Indonesia menyukai barang-barang impor, dengan berbagai pertimbangan konsumen di Indonesia.

Perkembangan nilai impor dan persentasenya dalam nilai GDP (*gross domestic product*) atau Produk domestik Bruto (PDB) di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 : Perkembangan Impor di Indonesia (1996 - 2005)

Tahun	Impor (Juta US \$)	GDP (Milyar)	Persentase dari GDP
1996	42.928,5	1.749.546,9	2,45
1997	41.679,8	1.656.825,7	2,52
1998	27.336,9	1.577.171,3	1,73
1999	24.003,3	1.505.216,4	1,59
2000	33.514,8	411.753,5	8,14
2001	30.962,1	398.016,9	7,78
2002	31.288,9	379.352,5	8,25
2003	32.550,7	376.374,9	8,65
2004	46.542,5	433.245,9	10,74
2005	57.700,9	413.797,9	13,94

Sumber : Statistik Indonesia, 1996 - 2005/2006

Secara lebih rinci sesungguhnya nilai impor Indonesia didominasi oleh barang-barang kebutuhan industri dalam negeri, khususnya bahan baku penolong. Hal ini bisa dilihat dalam gambar 4.1 berikut ini.

Gambar 4.1: Struktur Ekspor dan Impor Indonesia, tahun 2005 Sumber : Bank Indonesia, 2006

Jika diperhatikan struktur ekspor dan impor Indonesia pada tahun 2005, terlihat bahwa nilai impor Indonesia lebih didominasi oleh bahan baku industri atau bahan penolong industri, diikuti oleh setengah produk (*intermediate Product*) jadi dan produk jadi (*demand product*). Jika dilihat dari data sejak tahun 2002 nampak terlihat barang penolong memang menjadi produk yang banyak diimpor oleh Indonesia, khususnya pada

jenis bahan baku industri atau bahan penolong untuk industri dalam negeri. Secara lebih rinci sejak tahun 2002 hingga tahun 2006, nampaknya bahan-bahan kebutuhan industri dalam bentuk bahan baku penolong merupakan produk impor yang paling banyak didatangkan ke Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, nilai rata-ratanya mencapai 77% dari total impor yang dilakukan. Sementara itu, barang modal dan konsumsi hanya 23% dari total impor yang dilakukan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada grafik 4.2 berikut ini.

Gambar 4.2 : Struktur Barang Impor antara Bahan konsumsi, Bahan Penolong dan Barang Modal, tahun 2002,2003,2004,2005 dan 2006 Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik, dan Departemen Perdagangan 2007

Kegiatan impor merupakan salah satu aktivitas perdagangan yang dicatat dalam perekonomian, kontribusi sektor perdagangan luar negeri netto (impor dikurangi dengan ekspor) Indonesia mencapai 30% dalam pembentukan PDB. Data tahun 2001 hingga 2006 menunjukkan sebagian besar nilai impor Indonesia merupakan bahan baku penolong untuk industri dalam negeri yakni rata-rata berada pada kisaran 77% dari nilai impor, dan barang modal rata-rata 14%/tahun sementara itu barang konsumsi hanya 8%. Artinya, sebagian besar nilai impor Indonesia adalah mendukung kebutuhan industri dalam negeri. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 : Nilai Total dan Presentase Impor berdasarkan Golongan Barang, Ekonomi, tahun 2002-2006(JUTA US\$)

NO	Uraian	2002	2003	2004	2005	2006	Trend (%)	Perub (%)
I.	Total	31.288,90	32.550,70	46.524,50	57.700,90	61.065,50	21,04	5,83
I.	% Barang konsumsi	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	17,83	2,55
II.	% Bahan Penolong	0,77	0,78	0,78	0,78	0,77	20,88	5,31
III.	% Barang Modal	0,14	0,13	0,14	0,14	0,15	23,89	10,47

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Departemen Perdagangan 2006

Pada tahun 2002, nilai impor barang Indonesia berjumlah \$ 31.288,90 milyar. Dari sejumlah itu hanya 8%, impor untuk produk jadi (*demand Product*), 77% adalah bahan baku penolong untuk input industri dalam negeri, dan 14% adalah barang modal dalam bentuk alat angkutan. Komposisi ini tidak jauh berubah hingga tahun 2005. Barang impor untuk dikonsumsi diantaranya adalah makanan dan minuman (belum diolah) untuk rumah tangga, makanan dan minuman (olahan) untuk rumah tangga, bahan bakar dan pelumas (olahan), mobil Penumpang, alat angkutan bukan untuk industri, barang konsumsi tahan lama, barang konsumsi setengah tahan lama, barang konsumsi tidak tahan lama, dan barang yang tidak diklasifikasikan.

Sementara itu, bahan impor produk setengah jadi atau bahan penolong untuk bahan baku industri ini digunakan untuk berbagai jenis industri, terdapat 9 item jenis barang yang diimpor mulai dari makanan hingga logam dasar. diantaranya adalah: makanan dan minuman (belum diolah), untuk industri makanan dan minuman (olahan) untuk industri, bahan baku (belum diolah), untuk industri bahan baku (olahan) untuk industri, bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas (olahan), dan suku cadang dan perlengkapan barang modal suku cadang dan perlengkapan alat angkutan

Tabel 4.3. Nilai dan Presentase Impor berdasarkan Golongan Barang Ekonomi

NO	URAIAN	2002	2003	2004	2005	2006	TREND(%) 02-06	PERUB (%) 06/05
I.	BARANG KONSUMSI	2.650,5	2.862,8	3.786,5	4.620,4	4.738,2	17,83	2,55
1	Makanan Dan Minuman (Belum diolah) Untuk Rumah Tangga	364,5	345,1	451,7	419,3	600,4	12,66	43,18
2	Makanan Dan Minuman (Olahan) Untuk Rumah Tangga	719,4	797,7	827,6	1.085,7	1.215,7	14,54	11,98
3	Bahan Bakar Dan Pelumas (Olahan)	499,6	432,6	757,0	1.294,9	836,4	23,70	-35,41
4	Mobil Penumpang	49,4	141,5	290,3	293,0	227,5	45,94	-22,36
5	Alat Angkutan Bukan Untuk Industri	30,1	25,6	43,5	44,3	84,1	29,70	89,91
6	Barang Konsumsi Tahan Lama	211,7	256,6	314,6	342,1	351,4	13,90	2,72
7	Barang Konsumsi Setengah Tahan Lama	266,6	312,3	357,7	395,9	591,9	20,11	49,53
8	Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama	468,9	472,2	673,7	727,1	812,3	16,54	11,72
9	Barang Yang Tidak Diklasifikasikan	40,2	79,0	70,5	18,3	18,6	-25,99	1,64
II.	BAHAN BAKU PENOLONG	24.227,5	25.496,3	36.204,2	44.792,0	47.171,4	20,88	5,31
1	Makanan dan Minuman (Belum Diolah) Untuk Industri	1.096,5	1.127,3	1.456,7	1.325,3	1.352,2	5,98	2,03
2	Makanan dan Minuman (Olahan) Untuk Industri	441,2	531,6	568,6	830,4	909,1	20,83	9,48
3	Bahan Baku (Belum Diolah) Untuk Industri	1.758,6	1.697,9	2.236,3	2.064,4	2.438,7	8,86	18,13
4	Bahan Baku (Olahan) Untuk Industri	10.541,7	10.570,8	15.357,8	17.407,0	18.050,7	17,05	3,70
5	Bahan Bakar Dan Pelumas (Belum Diolah)	3.218,9	4.033,2	5.847,0	6.810,7	7.866,9	26,00	15,51
6	Bahan Bakar Motor	608,9	1.023,2	1.455,9	2.814,9	3.243,1	54,61	15,21
7	Bahan Bakar Dan Pelumas (Olahan)	2.308,2	2.244,2	3.828,4	6.679,7	7.061,1	39,47	5,71
8	Suku Cadang Dan Perlengkapan Barang Modal	2.205,2	2.089,2	2.815,2	3.653,0	3.507,6	16,03	-3,98
9	Suku Cadang Dan Perlengkapan Alat Angkutan	2.048,3	2.178,9	2.638,3	3.206,6	2.742,0	10,18	-14,49
III.	BARANG MODAL	4.410,9	4.191,6	6.533,8	8.288,4	9.155,8	23,89	10,47
1	Barang Modal Kecuali Alat Angkutan	3.768,0	3.526,9	5.411,1	6.470,2	6.220,7	17,46	-3,86
2	Mobil Penumpang	49,4	141,5	290,3	293,0	227,5	45,94	-22,36
3	Alat Angkutan Untuk Industri	593,5	523,2	832,3	1.525,2	2.707,7	50,76	77,53

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Departemen Perdagangan 2006

Pada tahun 2002 hingga tahun 2006, komposisi jenis barang yang diimpor tidak mengalami perubahan. Nilai dan presentase impor berdasarkan golongan barang ekonomi, dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut. Data pada Tabel 4.3 di bawahini dapat dilihat, bahwa ada tiga jenis barang yang

diimpor yakni barang konsumsi, barang bahan baku penolong dan barang modal. Pada tahun 2002, barang konsumsi yang diimpor berjumlah \$ 2.650,5, milyar dan pada tahun 2006 naik menjadi \$4.738,2 dan rata-rata dari tahun 2002- 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 17,83% selama 6 tahun terakhir. Barang bahan baku penolong pada tahun 2002 diimpor berjumlah \$ 24.227,5 rata-rata dari tahun 2002- 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 20,88%, dan pada akhir tahun 2006 nilai impor berjumlah \$ 47.171,4 milyar. Barang modal pada tahun 2002 nilai impor sebesar \$ 4.410,9 milyar rata-rata dari tahun 2002- 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 23,89%, dan pada akhir tahun 2006 nilai impor berjumlah \$ 9.155,8 milyar.

Barang-barang impor berupa bahan baku penolong pada umumnya dibutuhkan untuk beberapa industri dalam negeri seperti makanan dan minuman, tekstil, kertas dan barang cetakan, kimia dan barang dari karet, semen dan barang galian bukan logam, logam dasar, besi dan baja, alat angkutan, mesin dan peralatan. Beberapa industri memiliki ketergantungan lebih dari 20% dari input impor yakni alat angkutan, mesin dan peralatan ketergantungan input impornya 33,11%, kertas dan barang cetakan 26,60%, dan tekstil, barang kulit dan alas kaki 22,20%.

Sementara itu, kalau diperhatikan tujuan pasar (orientasi pasar) produk-produk hasil industri dalam negeri, paling besar dipasarkan di dalam negeri yang digunakan untuk bahan baku industri dalam negeri (*domestic intermediate demand*), dan konsumsi dalam negeri (*domestic final demand*) dan kebutuhan konsumsi luar negeri (*export final demand*). Tujuan pasar luar negeri (*export*) atas industri dalam negeri lebih dari 30%, diantaranya adalah barang kayu dan hasil hutan lainnya sebesar 58,76%, tekstil barang kulit dan alas kaki sebesar 33,42%, kertas dan barang cetakan 30,87% dan alat angkut, mesin dan peralatannya 37,17%. Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4 Orientasi Pasar dan Ketergantungan Industri Bahan Baku Impor, 2003

No	Subsektor	Persentase			Jumlah Industri
		Importasi	Domestik	Ekspor	
1	Makanan, minuman dan tembakau	25,24	22,48	7,47	100,00
2	Tekstil, pakaian, kulit, alas kaki	11,78	11,47	11,73	100,00
3	Industri logam, logam dasar, logam	13,71	10,13	11,15	100,00
4	Mesin dan barang mesin	22,88	16,75	12,87	100,00
5	Kertas dan barang kertas	53,38	10,42	22,93	100,00
6	Industri kimia, barang kimia, obat-obatan	16,88	14,87	11,64	100,00
7	Industri logam dasar, logam	17,52	7,88	7,47	100,00
8	Industri logam dasar, logam	17,52	7,88	7,47	100,00
9	Industri logam dasar, logam	17,52	7,88	7,47	100,00
10	Industri logam dasar, logam	17,52	7,88	7,47	100,00

Sumber : BPS, dan Bank Indonesia, 2007

Di samping berorientasi ekspor, industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki juga menggunakan bahan baku impor yang cukup signifikan. Hasil survei juga menunjukkan bahwa selain subsektor industri tekstil, subsektor industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya juga berbahan baku impor yang tinggi dengan orientasi ekspor. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua subsektor industri tersebut relatif kurang sensitif terhadap gejolak nilai tukar. Sementara itu, berdasarkan SPSE I, subsektor industri kertas, barang cetakan, dan subsektor logam dasar mempunyai kerentanan yang tinggi terhadap fluktuasi nilai tukar, mengingat, industri tersebut mempunyai kandungan impor yang tinggi dengan orientasi pasar domestik (keduanya terletak pada kuadran II). Sementara itu, subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau serta subsektor industri kimia dan barang dari karet sangat diuntungkan apabila terjadi depresiasi nilai tukar rupiah karena industri tersebut mempunyai kandungan impor yang rendah dengan orientasi pasar ekspor yang tinggi

B. Perkembangan Jumlah Pengangguran tahun 1996 - 2005

Pengangguran merupakan tingkat penduduk usia produktif yang tidak bekerja baik secara sukarela tidak bekerja maupun yang terpaksa tidak bekerja. Tingkat pengangguran di Indonesia cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari tahun pengamatan yang dilakukan sejak tahun 1996 - 2006, rata-rata pertumbuhan pengangguran sebesar 11,11%, rata-rata 5,9% dari usia produktif penduduk Indonesia tidak

bekerja setiap tahunnya.

Perkembangan jumlah pengangguran di Indonesia dan persentasenya terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia produktif) di Indonesia dapat dilihat melalui Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 : Perkembangan Jumlah Pengangguran di Indonesia (1996 - 2005)

Tahun	Pengangguran (orang)	Penduduk Usia Produktif (orang)	Persentase dari usia produktif
1996	4.407.769	154.464.763	2,85
1997	4.275.155	157.393.266	2,72
1998	5.062.483	138.556.198	3,65
1999	6.030.319	141.096.417	4,27
2000	5.813.231	141.170.805	4,12
2001	8.005.031	144.033.873	5,56
2002	9.132.104	148.729.934	6,14
2003	9.531.090	152.649.981	6,24
2004	10.251.351	153.948.922	6,66
2005	10.854.254	155.549.724	6,98

Sumber : BPS Indonesia, 1996 - 2005/2006

Data pada Tabel 4.5 di atas memperlihatkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Persentasenya terhadap jumlah usia produktif yang ada di Indonesia juga mengalami kenaikan. Artinya, jumlah pengangguran menjadi bagian yang terus meningkat dari total jumlah angkatan kerja atau jumlah penduduk usia produktif. Apabila jumlah usia produktif cenderung meningkat jumlah pengangguran juga akan mengalami kenaikan dan begitu juga sebaliknya.

Berbagai persoalan ketenagakerjaan juga mendorong terjadinya pengangguran diantaranya adalah faktor, produktivitas yang rendah sebagai akibat dari rendahnya keahlian yang dimiliki, ketentuan perundang-undangan yang

kurang tegas dalam penerapannya, tingkat upah minimum yang tinggi ditetapkan oleh pemerintah dan sebagian besar perusahaan tidak memenuhi tingkat upah minimum regional tersebut, tingkat pendidikan yang tidak relevan dan persoalan-persoalan lainnya. Berikut ini hasil survey Bank Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2006, yang menggambarkan permasalahan tenaga kerja, sebagai mana digambarkan dalam gambar 4.3 berikut ini :

Gambar 4.3 Permasalahan Tenaga Kerja di Indonesia Sumber : Bank Indonesia, 2006

Persoalan relevansi tingkat pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja juga menjadi salah satu persoalan dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Data yang dimiliki oleh Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa angkatan kerja berdasarkan status pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini :

Data statistik menunjukkan bahwa tamatan SLTA merupakan kategori pencari kerja yang banyak menganggur secara konsisten nilainya berada pada 36% setiap tahunnya, diikuti oleh tingkat SLTP, tamat SD, tidak tamat SD, dan tamatan Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6 : Jumlah Pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan, 2001, 2002, 2003, 2004 and 2005*)

No	Tingkat Pendidikan	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Tidak lulus SD	851 426	868 308	1 036 048	1 004 296	1 012 711
2.	SD	1 893 565	2 353 330	2 452 805	2 275 281	2 540 977
3.	SLTP	1 786 317	2 146 495	2 426 393	2 690 912	2 680 810
4.	SLTA	2 933 490	3 244 130	3 456 099	3 695 504	3 911 502
5.	Diploma I/II	-	86 567	79 583	92 788	107 516
6.	Diploma III	251 134**)	163 859	123 226	144 463	215 320
7.	Universitas/PT	289 099	269 415	245 857	348 107	385 418
	Total	8.005. 031	9.132.104	9.820. 011	10 .251. 351	10. 854. 254

Sumber : Sumber survey tenaga kerja BPS, 2001, 2002, 2003, 2004 and 2005

C. Impor dan Pengangguran

Pada awalnya penulis mencoba merenungi ada hubungan antara impor dan pengangguran. Diduga ada hubungan positif antara jumlah nilai impor dengan tingkat pengangguran. Hipotesis yang dibangun menunjukkan bahwa semakin banyak impor diperkirakan tingkat pengangguran semakin tinggi. Pemikiran ini didasarkan pada logika. Jika barang-barang kebutuhan dalam negeri diimpor dari luar negeri maka kegiatan industri di dalam negeri tidak akan berjalan dan kesempatan kerja juga tidak ada, sehingga terjadi pengangguran.

Namun logika itu ternyata tidak cukup data empiris untuk menerima hipotesis tersebut. Hasil penelitian ini secara empiris menjawab bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan impor terhadap pengangguran. Selanjutnya penulis perlu menelusuri secara teoretis dan hasil penelitian yang relevan kenapa hipotesis ini ditolak. Ternyata, nilai impor Indonesia yang paling dominan adalah bahan baku penolong untuk mendukung industri dalam negeri. Data menunjukkan lebih dari 77% nilai impor merupakan bahan penolong untuk input industri dalam negeri, dan 15% barang modal dan hanya 8% nilai impor Indonesia yang merupakan barang konsumsi

(Deperindag, 2006)

Dampak krisis moneter dan ekonomi telah menimbulkan kelesuan ekonomi di semua sektor. Perusahaan yang semula diharapkan akan tumbuh dan berkembang menyerap angkatan kerja baru, terpaksa tertunda dalam kurun waktu 3-5 tahun mendatang. Sementara itu, sudah mulai banyak perusahaan yang sedang mempersiapkan pemutusan hubungan kerja bagi sebagian pekerjanya.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan, yaitu faktor permintaan dan penawaran. Faktor permintaan dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk. Sesuai dengan *Konvensi International Labour Organization (ILO)*, batasan penduduk usia kerja yang digunakan di sini adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak aktif secara ekonomi dengan kegiatan antara lain, sekolah, dan mengurus rumah tangga.

Dengan menggunakan estimasi data PDB untuk tahun 1998, yaitu -15%, pengangguran terbuka akan meningkat menjadi 17,0 juta atau 18% dari seluruh angkatan kerja, setengah pengangguran akan meningkat dua kali lipat dari tahun 1996, menjadi 18 juta orang pada tahun 1998. Dengan sendirinya total pengangguran pada tahun 1998 sekitar 35 juta orang atau 37,9% dari seluruh angkatan kerja.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang merupakan salah satu dampak dari krisis moneter sangat ditakuti oleh para pekerja belakangan ini. Pada awalnya ketakutan ini hanya dirasakan terutama oleh para pekerja tidak terdidik (*unskilled labor*) di sektor konstruksi dan bangunan, para buruh industri-industri padat karya seperti tekstil dan sepatu, yang memang rawan dari krisis dan sekaligus tindakan PHK secara sepihak. Akan tetapi, ternyata, dalam perkembangannya, hampir seluruh pekerja di sebagian sektor usaha terkena stres, terutama

ketika pemerintah secara tiba-tiba menutup operasi bank-bank swasta yang dinilai bermasalah

Salah satu tujuan yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, lebih-lebih bagi negara berkembang, terutama Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut lebih menonjol atau penting bagi negara berkembang. *Pertama*, pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi, sehingga cenderung melebihi pertumbuhan kapital. *Kedua*, demografi profil lebih muda, sehingga lebih banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja. *Ketiga*, struktur industri di negara berkembang, yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi rendah, serta tingkat keterampilan penduduk yang belum memadai, membuat usaha penciptaan lapangan kerja menjadi semakin kompleks. Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (di atas 8%) penciptaan lapangan kerja baru mampu memenuhi tambahan angkatan kerja, ini yang terjadi di Indonesia sebelum tahun 1990 s.d. 1997.

Dengan adanya krisis moneter, dimana tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif, yaitu menurut perkiraan BPS, tahun 1998 pertumbuhan antara -13,6% s.d. -15% dan tahun 1999 pertumbuhan antara -2% s.d. -5,1%, akan membuat industri yang ada tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang baru untuk menampung tambahan-tambahan angkatan kerja. Ada beberapa faktor yang membuat industri mengalami kesulitan dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja. *Pertama*, naiknya suku bunga pinjaman membuat investor menunda untuk melakukan investasi baru. *Kedua*, krisis keuangan yang diikuti dengan ketidakstabilan politik membuat kepercayaan investor atau depositor terhadap industri perbankan di Indonesia mencapai titik terendah. Terjadilah *capital flight*. *Ketiga*, meskipun turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya, mampu meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional, namun kenyataannya nilai ekspor Indonesia tidak mengalami peningkatan yang tajam.

Akibat dari hal tersebut adalah *capital formation* tidak

terbentuk, bahkan cenderung negatif. Penciptaan lapangan kerja tidak terjadi, bahkan yang terjadi adalah meningkatnya pengangguran, mengingat banyak perusahaan yang mengurangi aktivitas produksinya atau bahkan menutup usahanya. Perkembangan penyerapan tenaga kerja sebelum dan sesudah/pasca krisis dapat digambarkan bahwa sejak 1997 tingkat penyerapan tenaga kerja terus menurun dan kondisi paling parah terjadi pada tahun 2000 dimana tingkat penyerapan tenaga kerja hanya tumbuh sebesar 0,02% (Makmun:2003)

Pengangguran merupakan salah satu persoalan pokok dalam perekonomian, khususnya Indonesia. Secara makro, sebelum tahun 1997, banyak analisis ekonomi yang percaya bahwa terdapat hubungan negatif (*trade off*) antara tingkat pengangguran (*unemployment rate*) dengan inflasi, sebagai mana penelitian Philips di Inggris tahun 1861 - 1957. Penelitian yang sama kemudian di lanjutkan oleh Samuelson dan Solow untuk data Amerika Serikat dengan menggunakan data time series tahun 1900 - 1960.

Replikasi penelitian ini membuktikan kebenaran penemuan Philips sehingga kemudian dinamakan dengan Kurva Philips (*philips curve*), Blanchard tahun 1997 (dalam Yustika:2007). Akan tetapi, sejak tahun 1970 kurva Philips mulai tidak berlaku lagi karena ditemukan fakta baru pengangguran yang tinggi diiringi dengan inflasi yang tinggi. Fakta ini, kemudian diteliti oleh para analisis, faktor apa yang menyebabkan tidak berlakunya kurva philips. Hasil analisis di Eropa menjelaskan bahwa pengangguran yang tinggi disebabkan karena kekakuan pasar kerja (*labor market rigidities*), yakni perlakuan restriksi sehingga perusahaan sulit menyesuaikan dengan perubahan lingkungan ekonomi dan ekonomi biaya tinggi yang pada muaranya berujung pada pengangguran. Lebih lanjut Blanchard (dalam Yustika, 2007) mengemukakan inflasi terjadi bersumber dari pertumbuhan uang beredar yang disebabkan oleh defisit anggaran yang tinggi di negara-negara maju. Gangguan ekonomi membuat pemerintah tidak mampu membiayai pengeluaran kecuali dengan mencetak uang (*money creation*).

Persoalan pengangguran di Indonesia sesungguhnya

telah ada sejak negara ini didirikan, bahkan pemerintahan kolonial Belanda juga menjelaskan tentang kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Hindia Belanda sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Masalah pengangguran memang menjadi masalah utama dalam perekonomian makro di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan selama ini ternyata tidak mampu mengurangi secara keseluruhan. Akibat dari pengangguran ini tidak hanya akan menciptakan masalah dalam variabel ekonomi makro lainnya tetapi juga menciptakan kondisi buruk dalam kehidupan sosial seperti meningkatnya kriminalitas dalam kehidupan masyarakat (Azhar, 1999).

Secara konseptual persoalan pengangguran di Indonesia disebabkan karena lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran kemiskinan itu dijelaskan sebagai berikut ini. Pendapatan yang rendah mengakibatkan rendahnya daya beli dan tabungan masyarakat. Rendahnya tabungan masyarakat mengakibatkan juga rendahnya akumulasi modal, dan rendahnya penguasaan teknologi sehingga rendahnya produktivitas penduduk. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pertumbuhan output, dan rendahnya pertumbuhan output nasional tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga terjadilah pengangguran.

Upaya untuk memutus lingkaran kemiskinan ini merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah. Banyak pilihan kebijakan yang bisa dilakukan, diantaranya adalah dalam meningkatkan investasi, kebijakan fiskal melalui APBN/APBD dan membuka pasar ekspor produk primer dalam negeri termasuk program yang tidak kalah penting adalah program alih teknologi dan pembangunan sumber daya manusia (Todaro, 2004). Upaya-upaya tersebut dimaksudkan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik memprediksi kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi rata-rata bisa menyerap angkatan kerja 250.000 orang sebelum tahun 2003, namun pada tahun 2004-2005 kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap rata-rata 80.000 orang.

Sebagian besar kita sudah mengetahui bahwa kenaikan investasi akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

kesempatan kerja, atau *trade off* dengan pengangguran. Artinya, semakin tinggi tingkat investasi yang dilakukan akan mengurangi tingkat pengangguran. Namun Blanchard tahun 1997 (dalam Yustika, 2007) mengemukakan bahwa investasi tidak serta merta akan meningkatkan lapangan kerja, bila jenis investasi tersebut tidak ramah terhadap penyerapan tenaga kerja (padat karya) atau dilakukan dengan padat modal maka investasi yang dilakukan tidak akan menyerap angkatan kerja. Fenomena ini berlaku di Indonesia seperti terlihat dalam data februari 2005 – februari 2006, data ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi 1 %, hanya mampu menyerap lapangan kerja 40.000 orang, hal ini berbeda dengan data sebelum tahun 2003, dimana pertumbuhan ekonomi 1% mampu menyerap lapangan kerja 250.000 orang. Lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7 : Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Periode	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tambahan Angkatan Kerja (juta)	Penciptaan lapangan kerja netto (juta) C	Rasio $D = C / A$
(A)	(B)			
Agust 2002- Agust 2003	4,61	1,97	1,16	252.634
Agust 2003- Agust 2004	4,94	1,22	0,91	184.403
Agust 2004- Agust 2005	6,81	1,88	0,24	34.767
Agust 2005- Agust 2006	5,43	0,48	0,23	42.181

Sumber : Sakernas dan Susenas, dan Yustika, 2006

Sumber dari pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dalam perhitungan pendapatan nasional, yakni bersumber dari 9 sektor usaha, yakni pertanian, industri dan pengolahan yang meliputi (pertambangan, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan), perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa pers dan jasa-jasa lainnya. Secara historis, kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan pendapatan nasional (*gross domestic product*) dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8 : Perkembangan Sumbangan Sektor Ekonomi terhadap PDB Pada Fase Kejayaan Minyak dan Resesi Ekonomi dan Reformasi

Lapangan Usaha	Kejayaan Minyak Bumi (%)					Resesi Ekonomi (%)			2005 (%)
	1970	1976	1978	1980	1981	1984	1986	1987	
Pertanian	29.18	25.55	23.45	22.18	21.67	21.63	21.27	20.57	13,41
Pertambangan	26.29	26.98	25.41	21.88	18.50	17.84	15.53	14.84	10,44
Industri Pengolahan	10.24	10.42	11.36	14.25	14.80	16.45	18.27	19.24	28,05
Listrik Gas dan air bersih	0.11	0.13	0.13	0.16	0.20	0.20	0.24	0.26	0,92
Bangunan	0.28	4.23	5.02	5.25	5.80	5.25	5.03	4.99	6,35
Industri	36.92	41.76	41.92	41.54	39.30	39.74	39.07	39.33	37,76
Perdagangan, hotel dan restoran	14.73	14.13	13.80	14.46	15.70	15.02	15.57	15.88	15,74
Pengangkutan dan komunikasi	2.35	2.81	3.46	3.72	4.08	4.14	3.97	4.00	6,63
Keuangan, persewaan, jasa pers	5.2	6.14	7.33	7.63	8.31	8.77	9.22	9.19	8,36
Jasa-Jasa lainnya	11.60	9.62	10.03	10.47	10.94	10.70	10.90	11.02	10,10
Perdagangan dan jasa	33.89	32.70	34.63	36.28	39.03	38.63	39.66	40.10	40,83
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100
Pertumbuhan Ekonomi (PDB Riil)		6,7	6,8	9,9	7,9	7,0	5,9	4,9	

Sumber : BPS dan data di olah, 2007

Data yang digambarkan dalam Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian pada akhir tahun 1970 mampu memberikan kontribusi sebesar 29,18%, secara terus-menerus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2005 tinggal 13,41%, sektor industri selalu meningkat dari 36,92% pada tahun 1970, meningkat menjadi 37,76% pada tahun 2005, dan sektor perdagangan dan jasa juga mengalami peningkatan dari 33,89% pada tahun 1970 meningkat menjadi 40,83%, pada akhir tahun 2005. Artinya adalah sektor pertanian secara konsisten mengalami penurunan dan diringi dengan

peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam pendapatan nasional.

Hill (1996) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi makro ekonomi Indonesia yang cukup baik pada masa pemerintahan orde baru namun terdapat beberapa fakta yang perlu menjadi catatan untuk dikritisi diantaranya adalah 1) pencapaian pertumbuhan yang tinggi disebabkan oleh adanya pergerakan keuntungan nilai tukar (*term of trade*) 2), pertumbuhan ekonomi bersumber dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 3) pertumbuhan ekonomi dikarenakan meningkatnya utang luar negeri yang tinggi 4) Kelompok penduduk kaya (elit) menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang berpenghasilan rendah (miskin). Disamping itu terdapat keganjilan pembangunan ekonomi di Indonesia diantaranya adalah perubahan struktur ekonomi yang begitu cepat dari sektor pertanian yang dominan menjadi sektor industri dan perdagangan/jasa tidak diikuti oleh terjadinya proses pengalihan tenaga kerja. Sektor industri naik begitu cepat namun tidak diiringi dengan kesempatan lapangan kerja pada sektor itu, sektor pertanian pada tahun 2005 hanya memberikan kontribusi sebesar 13,41% terhadap PDB, mampu menyerap lapangan kerja sebesar 44,6%, namun sektor industri memberikan kontribusi 28,05% pada pembentukan PDB hanya mampu menyerap angkatan kerja 12,4%. Secara implisit hal ini berarti memperlihatkan produktivitas pada sektor pertanian sangat rendah, namun sektor industri memperoleh nilai tambah atau keuntungan yang besar namun dinikmati oleh sekelompok kecil penduduk. Termasuk sektor perdagangan, sektor perdagangan mampu memberikan kontribusi sebesar 15,74% dalam pembentukan PDB namun hanya mampu menyerap kesempatan kerja 20,2%.

Memperhatikan data impor Indonesia yang didominasi oleh bahan-bahan penolong untuk bahan baku industri dalam negeri dengan sendirinya kegiatan impor justru penopang kegiatan industri di dalam negeri. Persoalannya apakah industri dalam negeri itu ramah terhadap tenaga kerja atau tidak?, Secara *agregatif* nampaknya perkembangan industri dalam negeri tidak selalu meningkatkan daya serap terhadap angkatan kerja. Berikut ini disajikan jenis industri yang

memiliki kemampuan untuk menyerap angkatan kerja yang lebih besar sebagai mana terlihat dalam tabel 4.9 .

Tabel 4.9: Kesempatan kerja menurut sektor Ekonomi Tahun 2003 - 2005

Sektor	2003	2004	2005
Pertanian, kehutanan dan perikanan	46,2	43,3	44,6
Pertambangan	0,8	1,1	0,9
Industri Pengolahan	12,0	11,8	12,4
Listrik Gas dan air bersih	0,2	0,2	0,2
Bangunan	4,5	4,8	4,7
Perdagangan, hotel dan restoran	18,5	20,4	20,2
Pengangkutan dan komunikasi	5,5	5,8	5,9
Keuangan, persewaan, jasa pers	1,4	1,2	1,1
Pelayanan public	10	11,2	11,3
Lainnya	0,7	0,0	0,0
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, 2005

Industri Padat Tenaga Kerja dan Padat Modal

Gambar 4.4: Jenis Industri Padat Tenaga Kerja dan Padat Modal, 2006

Gambar 4.4 di atas menggambarkan bahwa industri makanan dan minimum memiliki peran yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, diikuti oleh barang kayu dan hasil hutan, kertas dan cetakan, kimia dan barang karet, semen dan bukan logam dan tekstil dan alas kaki. Sementara itu, industri yang hemat tenaga kerja adalah alat angkut dan mesin-mesin, kimia dan barang karet, dan logam dasar, besi dan baja serta elektronika.

Kalau diperhatikan selama 5 tahun terakhir struktur nilai bahan baku industri yang diimpor sebagian besar adalah pada bahan baku (olahan) untuk industri. Pada tahun 2002 nilainya 43,51% dari total impor bahan penolong dan pada tahun 2006 turun menjadi 38,27%, tetapi jenis bahan baku untuk industri ini tetap menjadi barang yang paling banyak diimpor. Barang kedua yang paling banyak diimpor adalah bahan bakar dan pelumas (belum di olah) tahun 2002 nilainya mencapai 13,29% dan kecenderungannya selalu mengalami kenaikan sehingga pada tahun 2006 naik menjadi 16,68%, termasuk juga bahan bakar dan pelumas yang telah diolah, suku cadang dan perlengkapan barang-barang modal dan alat angkutan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10 : Komposisi Bahan Baku Penolong yang Di Impor, 2002- 2006

BAHAN BAKU PENOLONG	2002 (%)	2003 (%)	2004 (%)	2005 (%)	2006 (%)
Makanan dan Minuman (Belum Diolah) Untuk Industri	4,53	4,42	4,02	2,96	2,87
Makanan dan Minuman (Olahan) Untuk Industri	1,82	2,09	1,57	1,85	1,93
Bahan Baku (Belum Diolah) Untuk Industri	7,26	6,66	6,18	4,61	5,17
Bahan Baku (Olahan) Untuk Industri	43,51	41,46	42,42	38,86	38,27
Bahan Bakar Dan Pelumas (Belum Diolah)	13,29	15,82	16,15	15,21	16,68
Bahan Bakar Motor	2,51	4,01	4,02	6,28	6,88
Bahan Bakar Dan Pelumas (Olahan)	9,53	8,80	10,57	14,9	14,97
Suku Cadang Dan Perlengkapan Barang Modal	9,10	8,19	7,78	8,16	7,44
Suku Cadang Dan Perlengkapan Alat Angkutan	8,45	8,55	7,29	7,16	5,81
	100	100	100	100	100

Sumber : Data diolah dari Deperindag, 2007

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang tertera pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut yaitu :

1. Ternyata tidak ada pengaruh yang berarti antara kegiatan impor terhadap jumlah pengangguran di Indonesia. Pengangguran dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk dalam variabel penelitian ini termasuk, investasi, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat keahlian yang relevan.
2. Kegiatan impor pada tahun yang diamati sebagian besar didominasi oleh bahan-bahan kebutuhan industri, khususnya bahan penolong, yakni sebesar 78%, dan sisanya adalah barang konsumsi dan barang modal.
3. Pengangguran di Indonesia pada tahun yang diamati selalu mengalami peningkatan sebagai akibat dari rendahnya daya serap pertumbuhan ekonomi atas penambahan penduduk.

E. Implikasi

Persoalan pokok dalam penyerapan angkatan kerja pada adalah tingkat investasi yang rendah dan rendahnya kenaikan *output* nasional. Kegiatan impor ternyata mampu menjaga sektor industri dalam negeri dan memberikan kontribusi yang cukup memadai untuk menyerap angkatan kerja, khususnya pada jenis industri yang padat karya. Disarankan agar kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada aktivitas impor:

1. Perlu kemudahan impor untuk bahan-bahan penolong bidang industri makanan dan minuman karena mampu menyerap lapangan kerja yang banyak dalam kegiatan industri dan perdagangan
2. Pemerintah perlu mendorong agar kebutuhan bahan baku industri bisa diproduksi di dalam negeri sehingga ketergantungan atas input luar negeri bisa dikurangi khususnya pada produk makanan, bahan bakar dan bahan olahan industri sehingga kesempatan kerja pada bidang industri akan lebih terbuka.
3. Pemerintah perlu mendorong dan membangkitkan kegiatan usaha pada sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan sebagai usaha untuk mengurangi tingkat pengangguran

BAB V

WACANA PENGURANGAN KEMISKINAN

A. Pendidikan untuk Anak Keluarga Miskin

Kemiskinan merupakan persoalan yang rumit. Pada kondisi miskin, seseorang merasa resah dan gelisah. Para guru menjelaskan kemiskinan itu dicirikan dengan orang yang tidak memiliki penghasilan tetap, hidup di jalanan, hidup di tepi pantai, hidup di bawa kolong jembatan, hidup di hutan, hidup di rumah kumuh di tepi-tepi sungai, di bawah kolong jembatan tol yang megah. Orang miskin identik dengan orang yang tidak bersekolah, memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan kebanyakan tidak tamat Sekolah Dasar, mengkonsumsi makanan kurang dari 2000 kalori perhari. Guru kita juga mengajarkan negara miskin itu ciri-cirinya adalah negara yang memiliki penduduk banyak yang tidak makan (kelaparan), terjerat oleh hutang luar negeri yang tinggi, penduduk banyak, produktivitas nasional rendah, pemerintahan, lembaga sosial politik dan bisnis korup, masyarakatnya selalu membudayakan hidup dalam budaya konsumerisme, produktivitas rendah, kemampuan masyarakat untuk menabung hampir tidak ada, sehingga akumulasi modal rendah akibatnya investasi rakyat tidak ada. Pada akhirnya memberikan dampak pada terbatasnya kesempatan kerja.

Pemerintahan di negara-negara miskin termasuk Indonesia telah berjuang sekuat tenaga untuk mengatasi kemiskinan ini, namun hasilnya juga belum menunjukkan hasil sebanding dengan kemajuan negara lain seperti Malaysia, Korea Selatan atau China. Kenapa ini terjadi..? Secara teoretis jawabannya, secara mendasar sesungguhnya keseriusan kita menentukan keberhasilan program-program tersebut, dan kita bisa dikategorikan termasuk bangsa yang kurang serius dan tidak konsisten menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Orang-orang bijak mengungkapkan sebuah

sistem kalau dijalankan secara konsisten akan menampakkan hasil, namun jika tidak dilaksanakan secara konsisten hasilnya juga tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Namun kebiasaan sistem pengelolaan negara kita justru banyak yang tidak konsisten. Setiap pergantian pimpinan puncak selalu diiringi dengan perubahan sistem dan cenderung tidak konsisten seperti yang terjadi dalam pengelolaan pendidikan, ekonomi dan prioritas pembangunan sehingga banyak pekerjaan yang terbengkalai dan tidak memberikan kemanfaatan yang berarti termasuk soal penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan jumlah orang miskin sejak orde lama, orde baru dan orde reformasi, nampaknya tidak mengalami perubahan. Pada masa orde baru penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan program inpres desa tertinggal dalam bentuk bantuan dana tunai kepada masyarakat untuk berusaha. Hasilnya tentu saja ada, namun tidak sebanding dengan pengeluaran dana yang telah dikeluarkan. Program tersebut memberikan kenikmatan sesaat pada sekelompok orang-orang yang dekat dengan kekuasaan hari itu. Ibarat orang haus ketika diberikan segelas air, hausnya lepas pada saat itu, namun beberapa waktu kemudian haus datang sedangkan air sudah habis. Pada masa orde reformasi program pengentasan kemiskinan dilakukan dengan berbagai usaha salah satunya adalah program KUT (kredit usaha tani) Program itu diklaim oleh mantan menternya (Adi Sasono) waktu itu telah berhasil meningkatkan produksi padi nasional. Dalam aspek pengembalian kredit tani tersebut nampaknya masih rendah. Hasil penelitian dari lembaga independen tahun 2004 menunjukkan tingkat pengembalian kredit KUT paling tinggi hanya 13% ke bank pelaksana. Orde pasca reformasi (saat ini) penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan usaha membantu biaya hidup keluarga miskin sehingga mampu untuk hidup lebih baik dalam bentuk: bantuan tunai langsung subsidi BBM, operasi pasar, layanan kesehatan (Askeskin) dan lain-lain. Hasilnya sebagian masyarakat telah mendapatkan tunjangan tunai langsung dengan sejumlah rupiah. Di sisi lain ada kasus kepala desa atau jorong yang tewas karena tidak tepat waktu membagikan bantuan tunai langsung.

Penulis kira usaha-usaha pemerintah untuk mengurangi

kemiskinan itu ada baiknya, namun kita semua mengetahui bahwa program-program itu tidak pernah mencapai target yang ingin dicapai, yakni "mengurangi kemiskinan". Apa persoalannya? Dalam konteks 62 tahun kemerdekaan kita semua mesti merenungi secara jernih apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan. Sebagian kalangan mengatakan bahwa tidak mungkin kemiskinan itu terhapus karena itu sudah sunatullah. Karena itu Allah menganjurkan membayar zakat dan sedekah. Orang miskin merupakan lahan ibadah bagi orang kaya sebagai bekal untuk masuk surga. Sebaiknya apakah kita lupa bahwa Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk berusaha. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, tidak meninggalkan anak dan cucu dalam keadaan yang lemah, dan lain-lain. Penulis kira semua kita sepakat bahwa kekurangan pangan, rendahnya standar hidup kemanusiaan sebagian keluarga kita mesti kita perbaiki. Persoalannya bagaimana cara memperbaikinya? Intervensi pemerintah telah dilakukan...sudah triliyunan rupiah dana publik dikeluarkan untuk mengurangi kemiskinan namun belum juga berhasil. Kalau kita sedikit mengarifi sesungguhnya kita harus membaca alam sekitar, sebagai mana falsafah kita mengajarkan "*alam takambang jadi guru*". Kenapa negara kita miskin? Jawabannya karena produktivitas kita rendah. Kenapa produktivitas kita rendah? Karena modal dan teknologi kita juga rendah. Kenapa modal dan teknologi kita rendah? Karena akumulasi modal kita rendah. Kenapa akumulasi modal kita rendah? Karena tabungan kita rendah. Kenapa tabungan kita rendah? Karena produktivitas kita rendah. Inilah yang dikatakan sebagai lingkaran setan...kemiskinan.

Fakta lain yang menggambarkan kondisi kita adalah struktur kepemilikan aset produktif kita tidak adil (*distribusi fungsional*). Struktur ekonomi nasional diakui terjadi ketidakadilan, dimana kesenjangan kepemilikan aset-aset produktif, sedikit orang yakni sebesar 0,01% (21 ribu) memiliki 57% aset produktif namun banyak orang yakni sebesar 99,9% hanya memiliki 43% aset produktif nasional (data diolah dari BPS, 2002). Kenyataan ini berdampak terhadap ketidakseimbangan kehidupan ekonomi, sosial, politik dan keamanan di negeri ini. Merupakan sesuatu yang biasa kita dengar sehari-hari : teror bom, demonstrasi, penjarahan aset produktif negara secara terbuka di depan pemimpin negeri

ini, BUMN dijual. Pendek kata, orang yang jumlahnya sedikit itu bisa berbuat apa saja di negeri ini. Ketika momen politik seperti pemilu, proses voting, pemilihan kepala daerah dan pemilihan pimpinan nasional terjadi mereka bisa berbuat apa saja, dan sangat menentukan arah kebijakan publik dan siapa pemimpin yang akan lahir dalam proses demokrasi tersebut. Baik mereka yang berada pada elit kapitalis lokal maupun elit kapitalis nasional dan multinasional. Termasuk juga momen ekonomi. Kelompok ini dengan kekuatan akses/jaringan dan uang yang dimiliki bisa mempengaruhi pasar dan kebijakan negara dalam usaha menguntungkan bisnis mereka termasuk kebijakan pemotongan hutang pengusaha besar, Kredit BLBI Bank Indonesia, penjualan/pembelian aset BPPN, dan penjualan/privatisasi BUMN, jaminan kredit termasuk kartu kredit. Fee-fee usaha dan proyek publik dan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam (tambang, kebun besar dll).

Kasus, pembukaan tambang-tambang seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Pasaman dengan bangga memamerkan keberhasilan telah berhasil mendatangkan investor untuk mengesplotasi tambang timah hitam. Akan tetapi, sesungguhnya siklus ekonomi apa yang terjadi atas pembukaan tambang tersebut?, batu yang memiliki kandungan timah, ditambang, diangkat dari perut bumi, dimasukkan alam truk lalu dibawa ke Belawan dan diekspor ke China untuk bahan baku industri di China. Lalu efek ganda ekonomj (*multiflier*) dari kegiatan tersebut tidak terjadi di Pasaman tapi di China karena yang kita ekspor hanya batu yang memiliki kandungan timah. Jika industri dari hulu dan hilir dilakukan di Sumatera Barat, tentu kemanfaatan ekonomi akan dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia secara umum. Kesempatan kerja akan terbuka dan roda perekonomian dan nilai tambah ekonomi akan terjadi di Indonesia. Namun jika dengan model sekarang kita hanya akan memiskin penduduk Indonesia, menjadikan lahan 598,8 Ha di kemudian hari sebagai daerah kritis, dan akan mendatangkan banjir dan menghanyutkan penduduk Koto Rajo, Languang dan Lubuk Layang, seperti kasus tambang Lapindo di Sidoarjo.

Termasuk puluhan bahkan ribuan tambang yang ada di Indonesia hanya memberikan kemanfaatan bagi negara lain dan sekelompok kecil pemilik modal dan memiskinkan penduduk

sendiri. Ketika kepemilikan kekayaan produktif telah dimiliki oleh sekelompok kecil orang, tentu sekelompok besar orang tidak bisa lagi menikmati. Apa yang terjadi kemudian ketika fakta ini ada..? Sekelompok besar orang yakni rakyat terpaksa, mengais-ngais rezki di ladang, di trotoar, di bukit-bukit, di tempat pembuangan sampah, mengemis di pasar, mengamen dan jadi tukang batu, dan jadi tukang angkat. Pendek kata rakyat banyak hanya bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang rendah. Hasil penelitian Todaro (2004) menunjukkan di negara-negara berkembang sektor informal perkotaan mampu menampung angkatan kerja sebesar 30 % - sampai 60 %. Sektor informal ini diantaranya adalah menjual makanan-makanan di jalanan, pedagang osongan, pengunting rambut, tukang ojek, dan lain-lain.

Mencermati kepemilikan aset produktif yang tidak adil itu sebagian kalangan menawarkan ide perlunya *redistribusi aset produktif*, akan tetapi sekelompok orang yang mapan menilai pemikiran ini, sebagai ide yang nyeleneh dan bisa jadi kemudian divonis komunis. karena terlanjur kelompok komunis secara berani melakukan gerakan radikal pada tahun 1960-an, mencoba mengambil alih tanah-tanah yang dikuasai oleh militer (*pancang merah*) bekas *erpacth* Hindia Belanda. Pada hal pada masa Belanda tanah-tanah itu merupakan tanah yang disewa oleh perusahaan Belanda kepada penduduk lokal (*adat*) dan diberikan hak *erpach* (Hak guna usaha). Penulis kira ketika kepemilikan aset nasional ini tidak adil tetap saja negeri ini tidak akan lebih baik dari sekarang. Tatkala sebagian kecil kelompok elit negeri ini mendiskusikan redistribusi aset nasional, penulis menawarkan gagasan redistribusi aset yang lebih elegan dan familiar, yakni bantuan anak orang miskin bersekolah. Gagasan ini bukanlah hal yang baru, sudah banyak, kita yang meyakini ini benar dan tepat dilakukan. Gagasan ini belumlah secara sungguh-sungguh kita lakukan. Sekelompok kecil rakyat yang kebetulan berada pada tingkat elit pasti menjawab, Hal ini kita sudah lakukan dengan program wajib belajar sembilan tahun, beasiswa, subsidi, dana BOS dan lain-lain". Walaupun UUD hasil amandemen mengharuskan 20% dari total APBN/D harus dialokasi untuk pendidikan, namun sampai sekarang amanat UUD itu belum bisa juga terwujud karena keterbatasan sumber penerimaan negara. Pemerintah mengatakan alokasi 20% belum bisa dilaksanakan karena

semua anggaran departemen atau lembaga negara akan dipangkas atau anggaran untuk 5 Kementerian Negara akan hilang. Artinya. Tatkala sektor pendidikan dibangun, sebagian kecil kelompok elit tadi akan hilang kesempatan finansialnya karena dana pendidikan akan naik dari sekitar 45 triliyun sekarang menjadi 112 triliyun.

Inilah pilihan negara dalam hal ini pemerintah, apakah mempertahankan badan negara atau mau membangun pendidikan dan kesejahteraan penduduk? Jawabannya, tentu ada di sekelompok kecil elit tadi, karena merekalah sesungguhnya yang berkuasa atas negeri ini. Walaupun kita menganut system demokrasi yang memungkinkan semua warga negara berpartisipasi dalam proses suksesi kepemimpinan dan lembaga perwakilan (legislative) tetap saja kemudian yang menang dalam pertarungan itu adalah orang yang punya duit. Ini bisa dilihat dari hasil pemilu 2009, hanya sedikit orang yang memperoleh kursi legislatif yang mengeluarkan dana yang kecil. Sehingga bisa dikatakan bahwa demokrasi yang kita anut sekarang adalah demokrasi finansial (*Liberal capitalism democracy*), terlebih lagi Mahkamah konstitusi meloloskan permohonan uji materi tentang penetapan calon jadi menjadi suara terbanyak. Dengan model suara terbanyak ini para caleg berjuang sekuat finansialnya untuk mendapatkan kursi, karena di kursi tersebut ada sejumlah harapan atas benefit yang akan diperoleh baik dalam bentuk gaji yang telah dialokasikan maupun bagi-bagi kue pembangunan dalam bentuk pengadaan barang publik (*project fee*)

Tetapi kemudian, ketidakmampuan pemerintah untuk mencapai harapan rakyat tersebut sedikit diobati oleh adanya bantuan tunai langsung sehingga hati yang luka, kepedihan, keresahan dan kesengsaraan bisa diobati oleh sejumlah rupiah. Disamping itu rakyat di obati dengan suguhan acara televisi yang membangkitkan selera humor dan gelak tawa, seperti *extravaganza*, konser KDI, *Mama Mia*, *Empat Mata*, *Indonesian Idol*, dan lain-lain.

Barangkali, hanya sedikit orang yang menyetujui mempertahankan kondisi kemiskinan ini, kenapa? Karena kemiskinan ini sangatlah meresahkan, menyedihkan dan menyakitkan. Penulis termasuk sebagian warga negara yang

tidak menyetujui kemiskinan ini dipertahankan. Dalam kesempatan ini izinkalah penulis mencoba menawarkan solusi yang praktis untuk mengurangi kemiskinan secara nyata. Caranya adalah pemerintah mesti memotong lingkaran kemiskinan itu sendiri. Apa yang bisa dilakukan? Negara dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana publik untuk mengubah profesi anak keluarga miskin menjadi generasi cerdas, kreatif dan inovatif dan sehat. Pemerintah cukup memfokuskan anggaran negara pada upaya untuk merubah nasib anak keluarga miskin khususnya perempuan.

Keluarga miskin seperti yang penulis amati, pelajar dan rasakan adalah keluarga yang berasal dari keluarga yang berprofesi sebagai nelayan, petani, kelompok pekerja non-formal di perkotaan, buruh (pekerja). Setiap profesi memiliki karakteristik yang berbeda. Nelayan di tepi pantai memiliki laut yang luas untuk mencari ikan di perairan Indonesia, namun mereka dibatasi oleh sarana penangkatan ikan dan keterampilan (*skills*) dalam hal menangkap ikan, terlebih lagi terjatuh dalam jeratan hutang dalam ekonomi *patron client*. Upaya pemerintah dalam merubah nasib kaum nelayan nampaknya juga masih belum berhasil secara maksimal baik karena berbagai faktor termasuk soal kompetensi nelayan.

Keluarga petani di pedesaan (*nagari*) dihadapkan dengan persoalan keterbatasan lahan, rata-rata petani memiliki lahan kurang dari 0,5 ha perkeluarga. Mereka dihipit oleh hutang, keterbatasan teknologi yang dimiliki. Sementara itu, para pekerja di perkotaan dibatasi oleh rendahnya gaji yang diberikan oleh majikan karena mereka memiliki modal manusia yang rendah dan pekerja nonformal di perkotaan dibatasi oleh tempat berusaha dan manajemen usaha yang terbatas.

Kembali ke solusi sekolahkan anak orang miskin atau sebagian besar rakyat, sehingga mereka punya pengetahuan, informasi, pemahaman hidup, dan keterampilan hidup sehingga produktivitasnya akan lebih baik. Orang yang telah sekolah akan bisa membaca, akan bisa membaca peluang, akan bisa mengolah produk primer menjadi produk yang bisa dipakai oleh orang (*demand produk*). Orang sekolah akan bisa membaca komposisi pupuk, akan bisa membaca koran,

akan bisa mengakses internet. Orang sekolah akan bisa membedakan antara yang buruk dan yang baik. Penulis kira untuk memperbaiki struktur distribusi pendapatan nasional yang kurang adil tadi, dimana penduduk miskin lebih banyak dari penduduk kaya solusinya adalah memperbaiki status sosial penduduk miskin dengan cara "bersekolah (*Pendidikan*)"

Pendidikan merupakan layanan pembelajaran bagi orang dewasa dan usia muda. Pendidikan bertujuan untuk mendewasakan orang muda, mengubah sikap, prilaku, pengetahuan dan keterampilan warga belajar ke arah yang lebih baik. Peningkatan akses, mutu dan pemerataan pendidikan telah menjadi pilar pembangunan pendidikan di Indonesia namun ketika dana yang dialokasikan tidak memadai untuk memberikan layanan pendidikan tetap saja pilar pembangunan pendidikan di Indonesia tidak akan tercapai. Upaya peningkatan akses pendidikan bagi kelompok besar rakyat Indonesia yang berada di tepi pantai, di pedalaman, daerah kumuh perkotaan membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan dan sumber belajar siswa. Kesemua kebutuhan unsur pendidikan itu mesti disediakan oleh pemerintah. Jika pemerintah masih setengah hati mengalokasikan dana untuk itu, tetap saja akses pendidikan tidak bisa ditingkatkan termasuk, tenaga kependidikan dan sumber belajar siswa.

Bagi keluarga yang kurang mampu, anak dijadikan sebagai sumber penghasilan di jalan-jalan. Anak menjadi pembantu di rumah, anak yang lebih tua menjadi pengasuh bagi adik-adiknya. Akibatnya amat sulit diharapkan anak keluarga miskin setelah tamat SD dan SLTP bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalau kondisi ini tetap berlaku, anak keluarga miskin akan tetap menjadi keluarga miskin baru dan jumlahnya akan semakin besar setiap tahunnya. Ini menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang akan semakin kompleks di kemudian hari, dan menjadi potensi besar untuk kehancuran bangsa. Penulis kira pemerintah mesti membebaskan biaya dan memberikan tunjangan pendidikan kepada keluarga miskin seperti halnya para praja IPDN. Bagi rakyat banyak barangkali sekarang kita secara bersama perlu mendorong tunjangan pendidikan bagi anak sekolah secara umum, sehingga akan banyak anak-anak kita yang bersekolah sehingga bangsa ini akan lebih baik dan bukan lagi bangsa kuli

dan bangsa yang dihina oleh bangsa lain, tapi bangsa yang produktif dan bermartabat. Intervensi pemerintah untuk mengubah keluarga pada kelompok marginal ini telah banyak dilakukan, seperti pemberian modal kerja, alat produksi, kredit usaha tani, kredit dana bergulir, subsidi pupuk, pembangunan tempat berdagang, namun kenyataan program ini belum secara signifikan merubah nasib keluarga miskin. Barangkali, kita perlu memfokuskan pada generasi muda yang dilahirkan oleh keluarga miskin. Pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih tepat dengan mengubah nasib anak keluarga miskin dengan cara "*menyekolahkan anak keluarga miskin*", sehingga mereka memiliki keahlian, pengetahuan, dan nilai baru dalam berpikir, dan sikap yang memadai untuk mengubah nasib mereka, intervensi ini bisa dilakukan dengan proses pendidikan.

Pemerintah mesti secara lebih konkret mengalokasikan dana publik untuk membantu keluarga miskin bisa mengakses pendidikan secara layak demi kemanusiaan, minimal sampai pada tingkat perguruan tinggi (diploma). Untuk tahap awal pemerintah perlu mengalokasikan 5% APBN/APBN untuk menyekolahkan anak keluarga miskin ke perguruan tinggi, khususnya pada bidang-bidang keahlian teknis dan manajerial.

Kenapa harus 5%. Untuk tahap awal cukuplah 5%, karena kalau terlalu besar pemerintah akan kesulitan untuk membiayai sektor pembangunan yang lain. Angka lima juga mengandung nilai dan kuantitas yang cukup untuk program membiayai anak miskin ke perguruan tinggi. Lima persen dari mana? 5% dari APBN/D di seluruh Indonesia. Dengan program ini akan lahir generasi baru yang bersekolah, yang lebih cerdas dan tidak lagi menjadi kuli di negeri sendiri, tapi menjadi kelompok menengah yang lebih cerdas di masa mendatang. Jika APBN negara sekarang mencapai Rp 500 Triliyun Rp 2,5 Triliyun telah bisa dialokasikan untuk menyekolahkan anak bangsa sebanyak 160.000 orang dengan asumsi masing-masing mendapatkan beasiswa Rp 15.000.000. Dalam 5 tahun ke depan sudah bisa 1 juta serjana baru dan calon kelas menengah baru yang lahir dengan dana APBN belum lagi APBD Propinsi dan kota di seluruh Indonesia, sehingga dengan program ini kita harapkan Indonesia bangkit menjadi Negara yang maju yang

bermartabat bukan Negara kuli.

B. Upaya Makro dan Mikro

Biaya krisis ekonomi 1997 amatlah mahal, Indonesia mengeluarkan ratusan triliyun dana rakyat kepada para pelaku ekonomi usaha besar dalam bentuk BLBI, (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan sebagian besar dibawa kabur ke luar negeri negeri. Jutaan penduduk kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, ribuan usaha jatuh bangkrut, dan jatuhnya sebuah pemerintahan orde baru yang selama ini berkuasa secara dominan. Kini, krisis itu masih meninggalkan beban yang amat berat bagi rakyat, "kemiskinan". Atau ketidakmampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidup. Krisis menyebabkan berkurangnya modal finansial Indonesia secara signifikan, dampak langsungnya memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, turunnya adalah produktivitas nasional menjadi turun. Rendahnya produktivitas, mengakibatkan rendahnya pendapatan, rendahnya pendapatan sehingga kemampuan untuk membeli barang dan jasa juga rendah, hal ini menjadikan lingkaran kemiskian semakin kokoh di Indonesia.

Data susenas yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2001 menunjukkan bahwa penduduk miskin 15,16% dan pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 13,5%. Data terbaru bulan Maret tahun 2006 menunjukkan total penduduk miskin mencapai 39,05 juta. Artinya naik menjadi 17,75 % dari total penduduk 222 juta jiwa. Ukuran miskin ditentukan dengan penghasilan penduduk kecil dari Rp152.847/kapita/bulan. Dalam 5 tahun terakhir angka kemiskinan ini selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2007 BPS mencatat penduduk miskin masih berada pada angka 16,5%, Aspek lain dalam indikator pembangunan yang biasa dipakai oleh UNDP adalah *Human Development Index* (HDI), ternyata HDI Indonesia masih selalu di bawah negara-negara tetangga, Malaysia, Singapura bahkan Vietnam sekalipun. Indonesia berada dalam peringkat yang rendah yakni 107 dari 157 negara dalam hal ini dikategorikan sebagai salah satu negara miskin dengan pendapatan perkapita US \$ 3.834 (PPP)

Dalam pendekatan mikro, rumah tangga miskin perkotaan terdiri dari kelompok pekerja, dan pekerja informal yang tinggal di pinggiran kota, kolong jembatan, pinggiran sungai dan daerah kumuh perkotaan lainnya. Kelompok ini miskin karena rendahnya keterampilan dan keahlian yang dimiliki, dan rendahnya kemampuan *entrepreneurship* serta modal kerja yang dimiliki. Sementara itu, di pedesaan, penduduk miskin memiliki pekerjaan sebagai petani dan nelayan, berada di bawah garis kemiskinan disebabkan oleh rendahnya kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian, rendahnya keahlian mengolah lahan dan rendahnya tingkat penguasaan teknologi. Pada dasarnya, inti dari kemiskinan rendahnya modal manusia (*human capital*) yang dimiliki oleh individu dalam rumah tangga tersebut (berupa: pendidikan, pengalaman, keahlian). Kedua pemahaman kemiskinan ini memudahkan pihak yang memiliki kepedulian dalam melakukan intervensi dalam mengurangi kemiskinan. Pertanyaannya? Usaha apakah yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemiskinan perkotaan dan pedesaan.

Kemampuan menabung rumah tangga di Indonesia amatlah rendah, rata-rata lebih dari 65% pendapatan rumah tangga digunakan untuk makanan dan 35% lainnya untuk rumah, transportasi, rokok, pakaian, kesehatan dan kebutuhan konsumsi lainnya sehingga rumah tangga di Indonesia rata-rata tidak memiliki tabungan. Namun dibalik itu Nurkse (dalam Jhingan, 2003) menjelaskan faktor pola konsumsi rumah tangga di dunia berkembang bukan karena pemenuhan kebutuhan pangan saja, tetapi menyangkut budaya meniru pola perilaku konsumsi orang yang lebih tinggi status ekonominya oleh. Budaya ini dikenal dengan istilah "*demonstration effect*"

Rendahnya produktivitas rumah tangga negara berkembang khususnya di Indonesia kuat dugaan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, Soewardi (1999:76) mengemukakan bahwa kelemahan masyarakat Indonesia merupakan akibat dari budaya santai (*soft culture*) yang dicirikan sifat tidak adanya orientasi masa depan, tidak ada *growth philosophy*, cepat menyerah, berpaling dari akhirat dan lamban.

Tingkat pendidikan yang baik dan kemampuan

membaca informasi, dan keahlian yang memadai menjadi kunci keberhasilan pengurangan kemiskinan individu dan rumah tangga. Tiada jalan lain selain mempertinggi tingkat produktivitas individu dan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang cenderung selalu naik. Sementara itu untuk mempertinggi produktivitas itu hanya bisa dilakukan dengan mempertinggi kekayaan modal manusia individu dan rumah tangga. Modal manusia itu tidak akan lahir begitu saja tapi melalui proses kehidupan yang dimulai dari pendidikan formal dan nonformal yang terjadi dalam lingkungan pendidikan, baik rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Kalau lingkungan pendidikan ini mendukung dalam proses pembentukan modal manusia ini kemiskinan akan cepat bisa diatasi di Indonesia. Dengan kata lain, perlu ada sinergi dan usaha pemerintah dan upaya rumah tangga dalam mempertinggi dan meningkatkan keahlian, keterampilan dan kebugaran individu dan rumah tangga. Mesti ada alokasi anggaran publik dan rumah tangga yang memadai untuk menciptakan modal manusia itu sehingga produktivitas bisa ditingkatkan.

Apa yang yang bisa dilakukan, untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara makro di Indonesia dan apa upaya mikro yang bisa dilakukan oleh rumah tangga? Upaya makro yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah *pertama* meningkatkan produktivitas individu, rumah tangga, perusahaan (*firm*) dan pemerintah, dengan cara mempertinggi kualitas kecakapan, keahlian dan keterampilan individu untuk berintegrasi dengan lingkungan bisnis, sosial, ekologis dan kemanusiaan. *Kedua*, mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada sektor pendidikan, infrastruktur dan mengurangi pemborosan anggaran negara pada aktivitas non produktif. *Ketiga*, perlu adanya pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk, karena pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja yang ada. Beberapa program yang efektif bisa dilakukan untuk mengurangi pertumbuhan penduduk diantaranya adalah program keluarga berencana, insentif pada anak perempuan yang meningkatkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, sehingga usia menikah perempuan bisa ditingkatkan dan produktivitas anak juga bisa dikurangi, sehingga memberikan benefit dan manfaat sosial bagi kaum perempuan dan masyarakat dalam jangka

panjang.

Keempat, pemerintah harus secara khusus meningkatkan status sosial rumah tangga miskin dengan pemberian sekolah gratis bagi anak rumah tangga miskin paling tidak ke jenjang pendidikan menengah dan kejuruan sehingga dimasa mendatang tidak muncul rumah tangga miskin baru, sehingga Indonesia akan bangkit dan menjadi jaya di kemudian hari.

C. APBN 5% untuk Pendidikan Anak RT Miskin

Krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 memberikan hikmah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Banyak makna pembelajaran yang bisa dipetik dan dijadikan sebagai suatu nilai-nilai baru untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih maju dan bermartabat. Krisis ekonomi disadari memang menimbulkan biaya belajar yang amat mahal. Ratusan triliyun dana negara hilang dibawa oleh para pelaku ekonomi usaha besar ke luar negeri (*capital flight*). Jutaan pekerja kehilangan pekerjaan (PHK). Ribuan usaha yang berbasis pada input impor dan sumber pembiayaan dollar hancur (*pailit*), dan jatuhnya sebuah pemerintahan orde baru yang selama ini berkuasa secara dominan.

Biaya sosial, ekonomi, dan politik yang tinggi pada saat krisis, diimbangi dengan kemanfaatan dan eksternalitas positif dalam perekonomian nasional hari ini, lahirnya harapan yang lebih baik. Hal ini bisa terlihat dari kondisi makro perekonomian, di antaranya adalah devisa negara yang semakin baik yang diakibatkan oleh keseimbangan neraca pembayaran internasional yang *surplus*. Sistem pemerintahan sudah mulai demokratis, dan prinsip-prinsip *good governance* serta usaha-usaha untuk mengurangi distorsi pasar semakin giat dilakukan. Akan tetapi, dibalik kabar gembira indikator makro ekonomi itu, Indonesia masih dihadapkan dengan persoalan yang kompleks, yang membutuhkan usaha dan pekerjaan yang serius dalam penyelesaiannya. Di antaranya adalah usaha-usaha untuk mengurangi kemiskinan, mempertinggi harapan hidup, mempertinggi tingkat melek huruf dan melek teknologi bagi penduduk usia sekolah, dan mempertinggi masa bersekolah anak-anak bangsa.

Pekerjaan untuk mengurangi kemiskinan ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Usaha-usaha untuk mengurangi kemiskinan ini sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Kolonial Belanda, namun hasilnya sampai sekarang belumah menggembirakan kita bersama. Data sensus nasional yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), 2001 penduduk miskin dari 15,16% dan pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 13,5%, tetapi data terbaru bulan Maret tahun 2006 menunjukkan total penduduk miskin mencapai 39,05 juta. Artinya naik menjadi 17,75% dari total penduduk 222 juta jiwa. Ukuran miskin ditentukan dengan penghasilan penduduk kecil dari Rp152.847/kapita/bulan. Dalam 5 tahun terakhir angka kemiskinan ini selalu mengalami kecenderungan kenaikan. Aspek lain dalam indikator pembangunan yang biasa dipakai oleh UNDP adalah HDI, ternyata HDI Indonesia masih selalu di bawah negara-negara tetangga, Malaysia, Singapura, bahkan Vietnam sekalipun. Indonesia berada dalam peringkat yang rendah yakni 117 dari 157 negara, dalam hal ini dikategorikan sebagai salah satu negara miskin

Persoalan kemiskinan ini juga sudah menjadi wacana nasional. Semua pihak sepakat bahwa persoalan ini perlu mendapat perhatian yang sangat serius, perlu dikurangi, dan perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk pemberdayaan keluarga miskin. Pilihan-pilihan kebijakan publik sesungguhnya banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintahan memiliki visi kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dengan tiga cara. *Pertama*, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin. Pada periode setelah krisis, berkurangnya penduduk miskin lebih banyak disebabkan karena membaiknya stabilitas ekonomi dan turunnya harga bahan makanan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan lebih jauh lagi, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi merupakan suatu keharusan. *Kedua*, Pelayanan sosial bagi masyarakat miskin harus ditingkatkan. Indonesia harus dapat menyelesaikan masalah dalam bidang pelayanan sosial agar manfaat dari pembangunan lebih dirasakan. Peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan sosial, dapat dicapai dengan mengusahakan perbaikan dalam sistem kelembagaan dan kerangka hukum, termasuk dalam

aspek-aspek yang terkait dengan desentralisasi. Hal ini akan membuat penyedia jasa mengenali tanggung jawab mereka dalam menjaga kualitas pelayanan yang diberikan, disamping memberikan kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi aktivitas tersebut. *Ketiga* Perlindungan bagi si miskin perlu di beri pelatihan khusus. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Hampir 40 persen dari penduduk hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari US\$2 per hari. Perubahan sedikit saja dalam tingkat harga, pendapatan dan kondisi kesehatan, dapat menyebabkan mereka berada dalam kemiskinan, setidaknya untuk sementara waktu. Program perlindungan sosial yang ada tidaklah mencukupi dalam menurunkan tingkat resiko bagi keluarga miskin, walaupun memberikan manfaat pada keluarga yang lebih berada. Kondisi ini dapat diperbaiki dengan menyediakan program perlindungan sosial yang lebih bermanfaat bagi penduduk miskin serta masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.

Ketiga pemikiran tersebut saya kira positif, namun strategi ini tidaklah menguntungkan karena dana publik banyak terpakai untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) pada layanan publik sehingga di masa mendatang dikhawatirkan masyarakat tidak memiliki modal produktif. Penulis justru memiliki keyakinan bahwa pemerintah lebih baik memfokuskan perhatian pada satu program pengentasan kemiskinan, khususnya untuk memutuskan lingkaran setan kemiskinan itu sendiri. *Pertama* mengubah profesi kaum miskin dari petani, nelayan, dan buruh menjadi pelaku usaha produktif (*wirusaha*). *Kedua* menyelenggarakan program pendidikan bagi keluarga miskin sehingga anggota keluarga penduduk miskin memiliki kompetensi masa depan yang lebih baik dan memiliki modal sosial yang kuat.

Keluarga miskin biasanya berprofesi sebagai petani di pedesaan, nelayan di tepi pantai, para pekerja di perkotaan dan para pekerja informal di perkotaan. Untuk itu, usaha-usaha mengatasi kemiskinan pada level kaum miskin ini adalah bagaimana upaya agar mereka bisa mengubah profesi mereka menjadi pedagang atau pelaku usaha produktif baik di pedesaan maupun perkotaan. Usaha-usaha ini merupakan

usaha-usaha untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan, memberikan kesempatan berusaha yang sama antara pelaku usaha kecil, menengah dan besar. Untuk itu, perlu diciptakan kondisi berusaha yang kondusif, dimana pelaku usaha besar tidak semena-mena terhadap pelaku usaha kecil dan sebaliknya pelaku usaha kecil dan menengah juga tidak boleh merugikan usaha besar, namun saling sinergis dan berusaha saling menguntungkan dengan model kemitraan. Banyak model yang telah dikembangkan dan menemukan titik keberhasilan katakanlah model kemitraan plasma dan inti pada usaha-usaha perkebunan atau model kemitraan dalam bentuk kerjasama kontrak kerja antara petani (pemasok) input industri atau petani dengan pelaku usaha supermarket di perkotaan. Disamping model kemitraan pelaku usaha besar dan usaha kecil, cara lain juga bisa dikembangkan dengan model pemagangan, seperti yang dilakukan oleh suku Minang Kabau (Sumatera Barat), para pelaku usaha pemula diberikan kesempatan bekerja pada induk semang dan kemudian jika anak semang (pekerja) telah cukup pengalaman dan telah memiliki keberanian usaha maka boleh berdiri sendiri (*tagak surang*). Hasil dari model ini bisa terlihat hampir diseluruh Indonesia berdiri rumah makan Padang.

Pengentasan kemiskinan yang lebih konkret adalah dengan memberikan kesempatan yang luas kepada anak keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Usaha-usaha ini bisa dilakukan dengan model pengalokasian keuangan negara yang lebih besar terhadap proses pembelajaran di sekolah sehingga biaya sekolah ditetapkan oleh sekolah menjadi kecil dan bisa dibayar oleh keluarga miskin. UUD 1945 yang telah diamandemen memberikan kewajiban konstitusi dana pendidikan harus minimal 20% dari total anggaran negara, namun sekarang dana pendidikan rata-rata berada pada range 10% sampai 13% dari total APBN. Contoh dalam Rancangan Anggaran Penerimaan negara RAPBN tahun 2008, total RAPBN sebesar Rp 564,6 triliyun anggaran pendidikan sebesar 61,4 triliyun atau sekitar 10,8%. Kondisi ini masih belum memenuhi tuntutan konstitusi, ketidakmampuan negara dalam memenuhi angka 20% banyak faktor diantaranya adalah banyak beban negara pada pembayaran angsuran hutang dan bunga hutang luar negeri. Menurut penulis, pemerintah perlu mengefektifkan program

pengentasan kemiskinan pada departemen-departemen dan memfokuskan pada pengentasan kemiskinan pada program pendidikan dengan cara penambahan anggaran pendidikan minimal sebesar 5% dari APBN untuk menyekolahkan anak keluarga miskin ke jenjang perguruan tinggi. Jika dipakai anggaran tahun 2008 diperoleh anggaran sebesar Rp 28,23 triliyun. Nilai ini bisa digunakan untuk menyekolahkan anak keluarga miskin ke perguruan tinggi sebesar 1.411.500 orang dengan asumsi masing-masing diberikan sebesar Rp 20.000.000,-, sehingga keluarga anak keluarga miskin dari kelompok kelas bawah tadi naik status sosialnya ke kelompok menengah atau kaum profesional, dan secara hipotesis 5 tahun ke depan anak keluarga miskin yang masuk dalam status sosial menengah bisa mencapai 7.05 juta orang. Jika para sarjana yang telah disekolahkan oleh anggaran negara ini bisa menyekolahkan adik-adiknya dikemudian hari maka program ini lebih konkret mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin ke jenjang kemanusiaan yang lebih baik.

D. Investasi Modal Manusia dan Pengurangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan utama di negeri ini, lebih dari 39,2 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan, Data itu diperoleh dari perkiraan konsumsi pangan dan nonpangan kurang dari Rp 159.000,-/bulan. Kemiskinan merupakan persoalan yang sejak lama meliliti perekonomian Indonesia, para ahli ekonomi dunia mengemukakan kemiskinan itu disebabkan karena rendahnya produktivitas rumah tangga sebagai akibat dari rendahnya kepemilikan lahan dan modal kerja. Namun khusus untuk Indonesia asumsi itu tidakenuhi, Indonesia memiliki luas laut yang luas, daratan yang luas, tanah yang subur di suhu udara tropis dan memiliki penduduk yang jumlahnya banyak sebagai pasar barang dan jasa dihasilkan, sehingga berpotensi menjadi negara sejahtera. Sampai pada awal tahun 2008, peluang itu belum bisa tercapai. Dalam laporan UNDP 2007/2008, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara miskin dengan pendapatan perkapita \$ 3.834 (PPP), dan peringkat 107 dari 157 negara. Pertanyaannya kenapa bisa miskin? Padahal memiliki peluang yang amat besar untuk menjadi negara kaya.

Jawaban dari pertanyaan ini banyak sekali, kalau kita bisa memandang dari berbagai sudut pandang dan pendekatan akademis. Para ahli ekonomi mengatakan kemiskinan kita disebabkan karena rendahnya akumulasi modal bangsa sehingga produktivitas kita rendah, dan kita terjebak dengan lilitan hutang luar negeri sehingga potensi finansial habis terkuras untuk membayar hutang luar negeri. Sementara itu ahli sosiologi mengutarakan rendahnya modal sosial dan modal manusia menjadi penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk. Rendahnya kemampuan bekerjasama, saling mempercayai sesama warga negara, dan terhadap pemimpin, jaringan dan daya juang menjadi penyebab rendahnya pembentukan modal sosial anak bangsa. Sementara itu keahlian dan kecakapan penduduk pada bidang pekerjaan masing-masing juga menjadi penyebab rendahnya pendapatan atau upah yang diterima oleh warga negara. Satu orang yang bekerja menanggung 3 sampai 5 orang yang tidak bekerja sehingga standar hidup kita juga menjadi rendah karena produktivitas rumah tangga yang rendah.

Dalam pandangan demografis penduduk kita yang besar, di satu sisi menjadi salah potensi pasar yang besar dalam pemasaran produk-produk dalam negeri, namun penduduk kita yang besar tidak diimbangi dengan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan persoalan pengangguran yang besar. Rata-rata penduduk Indonesia tumbuh 1,7% pertahun atau sekitar 3,74 juta orang se tahun. Sementara itu perekonomian kita tumbuh 6,5% per/tahun. Jika 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 250.000 pekerja baru 6,5% hanya mampu menyerap 1.625 juta orang, artinya setiap tahunnya pengangguran bertambah 2.115 juta orang. Jika 1% pertumbuhan mampu menyerap 250 ribu pekerja baru, namun dari penelitian terbaru sekarang 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu menyerap 45 ribu angkatan kerja baru. Artinya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 15% jika ingin mencapai titik keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk.

Besaran 15%, itu sesuatu yang sulit untuk dicapai. Jangankan sebesar itu 6,5% saja sudah membutuhkan anggaran minus lebih dari 45 Triliyun, sehingga tiada cara lain yang mudah adalah mengendalikan pertumbuhan

penduduk. Dimensi pembangunan yang memfokuskan pada manusia sesungguhnya telah dianjurkan sejak lama oleh para pemikir seperti Malthus 1930-an, Becker (1950-an), Mincer, Schultz (1970-an) dengan pandangan pembangunan sumber daya manusia (*human capital*). Sayangnya, kita tidak serius melakukan usaha tersebut, dulu pada awal tahun 1980-an kita telah berhasil mengurangi jumlah penduduk dengan program KB nasional, namun sekarang program itu hilang perhatiannya karena kita lebih cenderung membangun sistem politik dan pola demokrasi yang berbiaya mahal yang kemudian disadari akhirnya ini menjadi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan rakyat.

Membangun sistem politik yang adil, fair dan saling mempercayai barangkali akan menimbulkan biaya politik yang murah sehingga pengematan dana pemilihan umum itu bisa digunakan untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan penduduk sehingga modal manusia bisa ditingkatkan dan kualitas kesejahteraan juga bisa ditingkatkan. Pembangunan berdimensi penduduk atau manusia diyakini merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh suatu negara jika negara itu ingin mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Jika hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam dalam bentuk pertambangan dan minyak bumi, maka itu juga menjadi pertanda bangsa itu akan hancur di kemudian hari. Bisa saja hari ini bangsa itu mendapatkan benefit finansial dari eksploitasi sumber daya alam tersebut namun jika dibandingkan dengan dampak negatifnya (*externalitas*) akhirnya benefit finansial tersebut habis oleh bencana alam yang terjadi. Kasus ini bisa dilihat dari kasus lumpur lapindo, polusi udara diperkotaan dan lain-lain.

Jika para pemimpin hari ini menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan, hal yang amat tepat adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk dan seiring dengan itu mempertinggi kualitas sumberdaya manusia sebagai usaha untuk meningkatkan daya saing bangsa dan produktivitas individu dalam berekonomi.

Beberapa penelitian menunjukkan pengurangan pertumbuhan penduduk paling efektif dilakukan adalah dengan cara meningkatkan tingkat pendidikan perempuan.

Cara ini memiliki dua sisi mata uang yang saling mengisi dan memberikan benefit individu kepada kaum perempuan dan benefit sosial. Tingginya tingkat pendidikan perempuan menyebabkan usia menikah perempuan juga akan semakin lebih tinggi. Jika anak perempuan bisa mencapai diploma atau perguruan tinggi rata-rata baru menikah pada saat berumur 25 tahun, sehingga satu perempuan hanya berpotensi memiliki anak 4 orang, dan semakin tinggi tingkat perempuan juga peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga akan semakin tinggi dan dengan sendirinya peluang untuk hidup sejahtera juga bisa ditingkatkan. Implikasi kebijakannya adalah pemerintah perlu memberikan insentif kepada anak-anak perempuan yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan memberikan beasiswa kepada anak perempuan keluarga miskin untuk bisa mendapatkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

E. Upaya Rumah Tangga dan peran Pemerintah dalam Memperbaiki Standar Hidup Orang Miskin

Kalau kita amati rumah tangga miskin memiliki ciri-ciri rumah yang sangat sederhana, beratapkan dedaunan kayu, berdindingkan kulit kayu (bambu) dan beralaskan lantai tanah atau kayu. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga pada umumnya tidak tamat sekolah dasar, anak lebih dari 4 orang dan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga lebih dari 80% digunakan untuk membeli makanan dan sisanya untuk pakaian, transportasi, rokok, pendidikan dan kesehatan.

Rumah tangga miskin berasal dari orang tuanya juga miskin. Disamping itu rumah tangga miskin karena kepala rumah tangga kena pemutusan hubungan kerja (PHK), tua atau sakit atau meninggal sehingga beban keluarga di tanggung oleh istri yang menjadi tumpuan sumber penghasilan keluarga. Dilihat dari sisi kekayaan rumah tangga juga relatif tidak memiliki kekayaan yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan, kepala rumah tangga tidak memiliki keahlian.

Bagi keluarga miskin, keluar dari kemiskinan merupakan hal yang amat sulit, walaupun diberikan perhatian yang khusus oleh pemerintah namun kecil peluang mengangkat

status sosial rumah tangga miskin untuk menjadi kelas menengah. Penulis menawarkan dua pendekatan yang bisa digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan rumah tangga miskin. *Pertama*, mendorong rumah tangga beralih profesi menjadi pedagang dan cara *kedua*, mendorong dan membantu kepala rumah tangga mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan hidupnya termasuk akses pendidikan bagi anak-anaknya.

Kalau kita perhatikan juga sumber penghasilan kepala rumah tangga miskin pada umumnya bersumber dari jerih payah dalam bentuk upah atau hasil pertanian, ikan atau sampah yang berhasil diperoleh setiap hari. Alih profesi merupakan pilihan, dari awalnya sebagai tenaga upahan, pemulung atau petani non lahan atau buruh nelayan menjadi pedagang butuh proses. Kepala rumah tangga miskin jangan diberikan uang di muka tapi di motivasi dan diberikan jalan atau jaringan, kemitraan dengan pelaku usaha lain. Cara ini membutuhkan proses pendidikan terlebih dahulu, sehingga pendidikan masyarakat menjadi pilihan yang tepat untuk memperbaiki kehidupan keluarga miskin.

Kelaparan, kematian karena kelaparan yang terjadi dalam rumah tangga bukan hanya dikarenakan ketidakmampuan fisik rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan namun pengalokasian penghasilan yang tidak tepat. Sehingga diperlukan pendidikan kepala rumah tangga yang memungkinkan kepala rumah tangga memiliki kecerdasan finansial.

Kecerdasan finansial diartikan sebagai kemampuan kepala rumah tangga dalam mengatur keuangan termasuk menyusun prioritas pembelanjaan rumah tangga. Uang yang jumlahnya sedikit harus dialokasikan dengan prinsip hidup hemat, investasi pada pendidikan anak, kesehatan dan mengurangi pembelanjaan pada pemenuhan barang yang tidak penting seperti rokok. Para peneliti mengungkapkan konsumsi rokok rumah tangga miskin 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan biaya pendidikan anak, maka bagi kepala rumah tangga yang berniat untuk memperbaiki standar hidup jangka panjang maka pola pengeluaran uang juga mesti perlu diperhatikan dengan baik.

Hidup hemat sejak lama dianjurkan oleh orang-orang tua kita, hanya dengan menyisihkan sebagian pendapatan adalah cara yang tepat agar dikemudian hari keluarga miskin bisa membeli sarana produksi dan investasi produktif lainnya bisa dilakukan. Rumah tangga miskin dari latarbelakang buruh, petani dan nelayan merupakan struktur sosial paling rendah di dunia, ahli sosiologi biasanya mengkategorikan ini dengan kelas bawah (*gross rote*) atau dalam bahasa politisi kelas bawah ini dikatakan sebagai "*wong cilik*", upaya untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga hanya mampu dengan menaikkan status sosial ekonomi rumah tangga ke kelas menengah yakni pada pekerjaan profesi seperti akuntan, dokter, guru, dosen, dan kaum professional lainnya. Jika kepala rumah tangga sudah berumur lebih dari 40 tahun, merubah profesi itu hal yang amat sulit maka tiada jalan lain selain mengusahakan naiknya status anak ke kelas menengah.

Menyekolahkan anak adalah salah satu cara yang masuk akal bisa dilakukan oleh kepala rumah tangga untuk memperbaiki standar hidup di kemudian hari. Namun pertanyaannya bagaimana cara rumah tangga menyekolahkan anak jika biaya sekolah dan biaya hidup dan opportunity cost anak tidak mampu ditanggung oleh kepala rumah tangga. Maka jawabannya ada di peran pemerintah. Pemerintah harus mengecangkan ikat pinggang dan mengalokasikan dana APBN/D yang lebih besar terhadap pendidikan sehingga anak keluarga miskin mampu bersekolah dan juga diperlukan insentif tambahan kepada orang tua untuk operasional sekolah anak khususnya pada biaya hidup dan transportasi.

Penulis hanya dengan cara itu kemudian kemiskinan absolute yang terjadi bisa dihilangkan. Kalau tidak pengurangan kemiskinan hanyalah menjadi issue politik untuk dijual agar suara partai politik besar dalam pemilihan umum. Pemerintah perlu konsisten dengan pembangunan sektor pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia, paling tidak bisa mencapai tuntunan UUD sebesar 20% digunakan untuk membiayai pendidikan. Pemerintah perlu mengurangi syahwatnya dalam mempertinggi benefit kebijakan publik untuk kepentingan elit. Hal ini menjadi penting tatkala negara ini masih perlu juga di pertahankan dalam bentuk kesatuan NKRI. Kenapa penulis utarakan itu, karena ada kecurigaan

rakyat bahwa kekuasaan yang ada sekarang lebih banyak memberikan benefit finansial kepada kelompok lingkaran elit tapi rakyat banyak hanya diobati dengan tunjangan tunai dan pernyataan subsidi di atas kertas. Namun sesungguhnya tetap saja rakyat tidak mendapatkan banyak manfaat dari kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah.

Pemerintah lebih cenderung meningkatkan modal politik menjelang pemilu 2009-2014 untuk melanggengkan kekuasaan dibandingkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini dilakukan untuk menjaga agar kepentingan elit tidak terganggu oleh perubahan suksesi kepemimpinan tersebut.

F. Memberdayakan Keluarga Miskin

Kemiskinan merupakan bentuk nyata dari ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan minimal kehidupannya. Dalam pandangan syariah kita sesungguhnya dilarang miskin oleh rasulullah dengan haditsnya yang mengingatkan kita "*Kannal Fikru Anyukunul Kufron*" Sesungguhnya kemiskinan itu mendekati pada kekufuran. Ajaran syariah kita juga menganjurkan agar kita bekerja dengan giat dan melaksanakan fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi Dalam surat Al A'raaf ayat 74. Allah menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kekuasaan untuk mengelola bumi, namun jangan sampai keseimbangan bumi rusak oleh manusia. Allah menegaskan :

Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan (Q.S, 7; 74)

Ada sebagian umat yang mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah sunnatullah, dia ada ketika manusia ada, dan orang miskin adalah wahana ibadah bagi orang kaya, dan kemiskinan adalah bentuk ujian Allah SWT bagi umatnya, bagi yang sabar dan tawakkal maka akan dibalas dengan sorga di kemudian hari. Persepsi itu juga ada benarnya, bahwa orang

miskin perlu kearifan dan kesabaran dalam kehidupan namun jangan sampai kemudian penafsiran itu menjadi penafsiran yang dangkal, bahwa kemiskinan ada betul, bahwa kemiskinan kita hanya bisa pasrah tidak betul. Bahwa kemiskinan memang betul adanya tetapi itu tidak membuat kita hanya bisa pasrah menerimanya.

Kalau kita perhatikan dalam kehidupan nyata, orang miskin itu bisa kita lihat adalah orang yang baru dipecat dari tempat bekerja sehingga hilang penghasilannya, orang tua yang habis tenaganya sementara itu tidak memiliki kekayaan produktif yang bisa menjadi sumber penghasilan dihari tua, orang miskin juga adalah anak putus sekolah atau tamatan dari jenjang pendidikan yang sedang mencari pekerjaan. Orang miskin juga adalah janda yang ditinggal mati oleh suami atau diceraikan oleh suami tanpa mewariskan kekayaan yang cukup. Orang miskin juga merupakan kepala rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian, atau alat tangkapan ikan di tepi pantai. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi kemiskinan keluarga? Yang pasti, orang yang miskin adalah orang yang lemah dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Untuk mengatasi kemiskinan itu maka peran pihak luar adalah hal yang amat penting, siapa itu? Siapa saja yang memiliki kekuatan yang sanggup untuk membantu orang miskin, bisa jadi tetangga, bisa jadi sanak saudara sendiri, bisa jadi orang kaya, dan tidak kalah penting adalah pemerintah.

Orang kaya memiliki kewajiban syariah untuk mengalokasikan minimal 2,5% dari penghasilan untuk diberikan kepada orang miskin, jika penghasilan itu berasal dari pendapatan normal namun jika mendapatkan harta Qarun atau harta yang tidak disangka-sangka dan melebihi dari usaha normal, seperti hadiah, bonus dan lain-lain, maka mesti dikeluarkan zakat yang lebih besar yakni 20% atau $\frac{1}{5}$ dari penghasilan yang diperoleh. Pemerintah memiliki tanggung jawab permanen terhadap peningkatan keberdayaan orang miskin, pemerintah atau orang-orang yang memiliki otoritas kekuasaan termasuk partai yang memiliki hati nurani rakyat harus memberikan perhatian yang serius untuk pemberdayaan keluarga miskin. Jangan sampai program yang disusun akhirnya membuat ketergantungan orang miskin sangat

berlebihan terhadap bantuan itu, pemerintah perlu memikirkan bahwa program yang dibuat betul-betul memberdayakan atau mempertinggi tingkat kemandirian rakyat miskin dalam lain perkataan program yang dibentuk membuat produktivitas keluarga miskin meningkat secara berkelanjutan (*sustainable*), bukan hanya membuat keluarga miskin kenyang sesaat namun kemudian selanjutnya kembali lapar.

Prinsip pemberdayaan adalah dimana lahirnya kekuatan individu dalam menentukan dan memilih sesuatu yang diinginkan dan bisa menunjukkan jati dirinya sebagai manusia yang memiliki akal sehat dan hatinurani yang luhur. Manusia memiliki kemampuan dan berdaya untuk mengembangkan dirinya, mengendalikan dirinya dan menggunakan potensi dirinya secara maksimal untuk berintegrasi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang selalu berubah.

Orang yang lemah, adalah orang yang sulit beradaptasi dengan lingkungan yang berubah sehingga kemampuan bertahan hidup (*survival*) juga rendah sehingga dalam ekonomi *besar pasak dari pada tiang*. Artinya lebih besar hasrat keinginan berkonsumsi dibandingkan dengan kemampuan ekonominya sehingga disitulah ketidakberdayaannya secara ekonomi.

Ketidakberdayaannya secara ekonomi, dibuktikan dengan ketidakmampuan orang miskin memiliki akses dengan pekerjaan, dengan usaha-usaha perdagangan, dengan sumber pembiayaan eksternal (bank) dan dengan akses pemasaran. Ketidakmampuannya inilah yang perlu diperhatikan oleh pihak luar ketika ingin melakukan intervensi terhadap orang miskin.

Hal utama yang paling diperhatikan untuk mengurangi ketidakberdayaan itu adalah, membebaskan individu dari keterjajahan akal dan hatinurannya. Individu yang miskin cenderung terkungkung oleh penyakit malas, dan tidak menggunakan potensi akalnya secara maksimal sehingga dia tidak rasional. Maka langkah pertama adalah membebaskan cara berfikir ke arah kemerdekaan berfikir. Baru kemudian dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yakni: Ketika individu anggota rumah tangga tidak bisa akses dengan lapangan kerja, bisa jadi disebabkan karena keahlian yang dimiliki tidak

cukup dengan kebutuhan kerja maka *outsider* memberikan pelatihan keahlian khusus kepada orang lemah (miskin), ketika petani tidak memiliki akses dengan lahan pertanian dan tidak memiliki lahan, maka pemerintah dan *outsider* lainnya perlu membantu kepemilikan lahan yang memadai dengan banyak pilihan alternative kebijakan. Ketika orang lemah tidak memiliki kemampuan atau akses dengan lembaga keuangan (bank) maka *outsider* perlu membantu mempertemukan orang lemah (miskin) dengan jaringan pembiayaan tersebut dengan berbagai model: seperti penjaminan pemerintah, pendampingan, sertifikasi lahan dll. Ketika orang lemah tidak memiliki akses pemasaran, maka *outsider* perlu memfasilitasi kepada pasar : seperti jalan, join marketing board dan lain-lain. Ketika orang lemah tidak memiliki informasi yang memadai tentang produk dan jasa yang laku di pasaran maka *outsider* perlu menyediakan informasi yang akurat tentang itu.

Kalaupun pihak luar (*outsiders*) memiliki keseriusan dalam menangani kemiskinan maka saya yakin kemiskinan itu bisa dikurangi secara signifikan dan harapan itu tetap terbentang luas tatkala ada orang yang memiliki akal sehat dalam memimpin negeri ini. Mari kita gunakan modal sosial, hati nurani dan bersatu untuk mempertinggi kesejahteraan dan kejayaan bangsa.

G. Re-distribusi Sebagai Solusi untuk Mengatasi Kemiskinan

Kegagalan pasar dalam mendistribusikan kekayaan finansial dan fisik ternyata terbukti secara empiris di Indonesia, ada dugaan semakin liberal ekonomi suatu negara, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonomi dan semakin tinggi tingkat kemiskinan. Fakta itu ditunjukkan oleh ekonomi Amerika Serikat dan Ekonomi Indonesia. Para ahli ekonomi pembangunan (Todaro, 2003) mengutarakan 2/3 kekayaan dunia di nikmati oleh penduduk 1/3 dunia yang hidup dengan standar konsumsi tinggi di negara-negara utara : yakni Eropa Barat, Amerika Utara dan Jepang. Sementara itu negara berkembang yang jumlah penduduknya 2/3 dari penduduk dunia hanya memiliki 1/3 kekayaan dunia.

Mekanisme pasar oleh sebagian ekonom di agungkan sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan

efisiensi karena terjadi persaingan untuk mencapai keunggulan, namun di Indonesia dua asumsi mekanisme pasar itu tidak berlaku yakni pelaku ekonomi dianggap memiliki kemampuan finansial yang sama dan memiliki informasi yang memadai.

Ketika diterapkan di Indonesia dua asumsi ekonomi pasar itu tidak terpenuhi sehingga ekonomi pasar yang diterapkan di Indonesia menyebabkan menurunnya kedaulatan ekonomi negara, termarginalkannya pelaku usaha dalam negeri dan terjadinya kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Pasar bebas merupakan alat kapitalisme global untuk melakukan penjajahan baru bagi ekonomi negara berkembang : oleh individu, group dan korporasi multinasional. Kenyataan ini tidak lagi bisa kita pungkiri karena globalisasi ekonomi pada tahap 3 seperti yang diungkapkan oleh Tom Fredman, sejak tahun 1992 ini memang ditandai dengan penguasaan ekonomi dan politik pada sebuah bangsa dengan beberapa ciri diantaranya adalah pelaku ekonomi merupakan perusahaan multinasional, group dan individu yang menguasai teknologi dan komunikasi dan menempatkan usahanya di Negara berkembang dalam bentuk cabang, *franchising*, jaringan lembaga swadaya masyarakat internasional dan hampir batas antar negara tidak ada

Selama ini para pelaku ekonomi negara asing cenderung mengambil potensi ekonomi kita yang bernilai tinggi, katakanlah letak ruang perkotaan yang strategis untuk dijadikan Mall. Yustika (2007) mengutarakan secara gamblang dalam bukunya perekonomian Indonesia Pasca krisis tentang fenomena ini "Pemerintah kota menganggap pelaku sektor informal sebagai penyebab munculnya kekacauan kota dan kriminalitas kota. Dan lebih nyaman dengan pelaku besar dan formal yang sudah tentu mendatangkan pendapatan yang tinggi terhadap penerimaan asli daerah (PAD) dan tidak menampakkan kesan jorok. Kota didikte oleh kemauan usahawan yang besar yang berkolaborasi dengan pengambil kebijakan tingkat daerah, pola ini hampir seragam diseluruh Indonesia". Pola ini menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha kecil di sekitar lokasi itu ribuan yang kemudian gulung tikar karena segmentasi pasar supermarket dengan pasar usaha kecil mikro di Pasar itu hampir sama. Pada saat yang sama pelaku usaha kecil digusur oleh petugas ketertiban

kota dan kabupaten dari lokasi trotoar.

Termasuk juga sektor pertanian dan perkebunan, petani kita terpaksa menebangi hutan lindung atau menanam tanaman pada lahan-lahan kritis dan kemiringan tinggi. Inilah dampak langsung dari tindakan kebijakan yang memprioritaskan pelaku usaha besar. Dengan lain perkataan bahwa tindakan kebijakan pembangunan akhirnya menjaga agar kemiskinan masyarakat kita tetap terjaga dengan kokoh. Mudah-mudahan hal ini kita bisa sadari namun jika belum barangkali perlu direnungi dan dipikirkan secara benar. Pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan naluri hati nurani kemanusiaan sebagai tugas kekhalifan di muka bumi. Dan kemudian jika kebenaran itu belum juga ditemukan maka perlu pendekatan rasional dan mencoba memikirkan fenomena ini dalam perspektif kemanusiaan dan keadilan. Artinya adalah kelompok lemah dan miskin itu adalah kelompok yang perlu dibantu sebagaimana perintah Tuhan kita dalam Q:s Al-Maa-uun, 107 ayat 1 - 7, Al-Ra'du ayat 11...bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya. Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya tugas memakmurkan bangsa ini adalah menjadi tanggung jawab kita sendiri bukan diserahkan kepada kaum konglomerasi internasional. Sejarah juga mencatat sejak penjajahan di masa dahulu, sampai penjajahan model baru (*new kolonialisme*) dalam bentuk penguasaan pasar dan potensi ekonomi negara ini oleh kelompok group korporasi internasional selalu saja merugikan bangsa kita.

Mencermati faktor lingkungan eksternal yang begitu kuat mempengaruhi perekonomian kita tentu saja kita berusaha agar pencapaian pembangunan kita haruslah unggul, benefit di atas rata-rata, harga diri dan mempertinggi standar kelayakan hidup kemanusiaan penduduk. Alangkah mulianya pimpinan kita hari ini jika berusaha untuk mengurangi hastrat untuk menguasai sejumlah rupiah untuk mempertinggi standar hidup dan prestise diri dan keluarganya. Dan merubahnya menjadi mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan suku-suku di daerah dalam konteks Republik Indonesia. Banyak usaha-usaha yang mulia bisa dilakukan secara ekonomi diantaranya adalah :

Pertama, mesti ada komitmen pimpinan dan para pemegang kekuasaan untuk memperankan dirinya sebagai pengontrol Negara dan penggerak Negara ke arah jalan yang tepat. Mengontrol keinginan dan hasrat untuk memiliki kesenangan yang berlebihan sebagai mana dilarang dalam ajaran oleh kitab suci kita, membelanjakan dana publik pada pembelanjaan barang modal yang produktif termasuk alokasi dana pendidikan yang memadai untuk anak usia sekolah dan perguruan tinggi termasuk beasiswa 5 % dari total dana publik untuk anak keluarga miskin ke Perguruan Tinggi.

Kedua, Perlunya pengakuan yang lebih nyata atas modal yang dimiliki oleh rakyat dalam bentuk hak kepemilikan (*property right*) atas tanah ulayat, bangunan dalam bentuk *representative aset* dengan pemberian sertifikat lahan, ijin bangunan dan surat resmi usaha secara gratis, sehingga bisa digunakan dalam pemberian kredit usaha kepada pelaku usaha kecil. perlunya *land reform* atas kepemilikan lahan *erpach* bekas penjajah belanda dan tanah-tanah yang kosong.

Ketiga, Lalu kemudian masyarakat yang akan makmur perlu disiapkan suatu sistem pembelajaran masyarakat yang memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk selalu membelanjakan uang-uangnya untuk aset yang nilainya akan selalu bertambah dan bukan berkurang. Perlunya komitmen yang kuat dari masyarakat untuk mengurangi konsumsi yang tidak penting seperti merokok namun menggunakan kekayaan (uang) yang dimiliki untuk membeli buku anak sekolah atau bibit-bibit tanaman bagi petani, biaya pendidikan menambah keterampilan bagi pekerja dan biaya penambahan modal kerja bagi pedagang kaki lima

H. Pembangunan (Wacana Pembangunan Ranah Minang)

Sumatera Barat merupakan merupakan salah satu Propinsi yang berada di Pulau Sumatera. Menurut Data BPS tahun 2006 penduduk Sumatera Barat pada tahun 2005 berjumlah 4.528.242, jiwa dengan komposisi 2.225.847 laki-laki dan 2.302.395 orang perempuan. Sumatera Barat dihuni oleh penduduk sebagian besar etnik Minang, Mandahiling, Mentawai, Jawa, China dan suku nusantara lainnya.

Minangkabau (Sumatera Barat) dikenal sebagai salah satu suku yang dinamis dan tersebar diseluruh nusantara hingga dunia internasional, dikenal gigih, ulet, cerdas, berjiwa wirausaha, religi dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan daerah rantau.

Jawaban atas pertanyaan ini barangkali kita semua bisa memahami dengan melihat fakta-fakta sosial yang terjadi di lingkungan kita berada. Mestika Zed (2002) seorang Analis sosial Universitas Negeri Padang mengungkapkan bahwa kemunduran masyarakat Indonesia dikarenakan karena menurunnya kepercayaan diri, menurunnya budaya belajar ditingkat nagari, lahirnya perilaku konsumtif dikalangan generasi muda, dan memburuknya lingkungan sosial kemasyarakatan. Hal inilah yang menjadi penghambat proses perubahan dan pembangunan di Sumatera Barat khususnya pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia.

Kepercayaan diri (*self confidence*), kepercayaan diri berhubungan aspek psikologis, merasa rendah diri, merasa tidak mampu, merasa orang lain lebih hebat, merasa tidak mampu mengerjakan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri sesungguhnya berasal dari kompetensi diri dan konsep diri yang mantap (*self concept*). Kita mengetahui potensi diri dan mengetahui kelemahan diri. Rencahnya kepercayaan diri ini terjadi karena bebera hal, ada orang yang mengatakan kepercayaan diri warga Sumatera Barat berkurang karena kalah perang dalam perjuangan PRRI, ada juga yang mengatakan bahwa memang masyarakat Sumatera Barat memiliki kemampuan (*competency*) yang rendah dan konsep diri yang rendah. Pembuktian diri masyarakat Sumatera Barat dalam iven-iven nasional sampai hari ini belum berhasil mengangkat harga diri masyarakat Sumatera Barat. Ada kecenderungan hal-hal yang baik jarang kita dengar dari publikasi media bahkan masyarakat kita sering disuguhi dengan berita-berita yang menurunkan kepercayaan diri itu sendiri, seumpama, kasus busung lapar yang melanda Sumatera Barat pada tahun 1998-an, rendahnya nilai hasil belajar siswa-siswa Sumatera Barat, rendahnya human development indeks, rendahnya kemandirian keuangan daerah dan lain-lain.

Hal yang kedua yang menjadi sebab kemunduran

Sumatera Barat adalah : menurunnya budaya belajar di tingkat basis yakni nagari. Pada masa dahulu datuk-datuk kita bercerita, bagaimana surau berfungsi sebagai tempat belajar, sistem belajar dan lingkungan belajar yang kondusif di masyarakat Nagari. Ada peran ninikmamak dan alim ulama yang besar untuk menghidupkan sistem pembelajaran berbasis nilai masyarakat. Sekarang budaya itu hilang, walaupun kemudian tahun 1999, pemerintah propinsi Sumatera Barat berusaha untuk menghidupkan kembali sistem tersebut dengan komitmen kembali ke pemerintahan Nagari namun nampaknya usaha-usaha tersebut tidaklah berkelanjutan dan tidak terukur. Apa persoalannya? Banyak hal diantaranya adalah kuatnya virus eksternal yang masuk dalam fikiran anak-anak nagari melalui media televisi, hampir sebagian besar waktu anak nagari berada di depan televisi termasuk orang-orang tua, ibu-ibu rumah tangga dan para anak gadis kita.

Kita pahami bahwa siaran televisi hari ini, digunakan oleh para pedagang lokal dan dunia untuk memasarkan produknya. Hal ini mendorong budaya konsumerisme, dan yang paling menyedihkan kita adalah siaran-siaran televisi lebih memberikan pengaruh terhadap imeg dan pemikiran anak nagari dibandingkan dengan arahan orang tuanya, guru bahkan kitab sucinya sekalipun. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa pada zaman hari ini sesungguhnya sebagian dari masyarakat kita digerakkan oleh media TV, dan tidak lagi berpedoman kepada cara kehidupan lama yang kita yakini.

Persoalan ini merupakan persoalan globalisasi, ketika tidak ada lagi batas yang jelas dari negara, ruang dan waktu, mengakibatkan terjadinya model penjajahan baru--yang diterapkan oleh sekelompok orang--group, perusahaan multinasional dan bangsa-bangsa yang maju. Sehingga muncullah budaya konsumerisme dan memburuknya lingkungan sosial. Banyak rumah tangga membeli barang dan jasa sesungguhnya tidak perlu dibeli atau justru ketika dimiliki tidakmemilikinilaiambahatautidakmeningkatkanpendapatan rumah tangga. Tetapi, hanya akan berkurangnya nilainya antar waktu karena penyusutan dan biaya pemeliharaan barang-barang dan jasa tersebut. perilaku ekonomi yang konsumtif ini mengakibatkan semakin menurunnya produktivitas masyarakat, berkurangnya aset yang dimiliki, tereksplotasinya

potensi modal untuk berproduksi dan semakin meningkatnya biaya hidup (*living cost*) harian rumah tangga, dan kemiskinan semakin kuat dalam kehidupan masyarakat kita. perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh rumah tangga (mikro) namun juga memasuki perilaku publik di pemerintahan. Terlihat nyata pimpinan daerah dan pejabat publik baik di eksekutif, legislative dan badan usaha Negara/daerah belum merasa nyaman (barangkali) ketika belum memiliki dan menaiki mobil-mobil seri terbaru, atau lampu-lampu hias yang indah, atau gedung kantor yang megah. Pada hal sesungguhnya perilaku kita ini hanya akan memiskinkan kita secara bersama di kemudian hari.

Mencermati fakta-fakta ini apa yang mesti kita lakukan untuk kemakmuran di masa mendatang ? Jawaban pertanyaan ini sangatlah muda, anak-anak kita saja di sekolah dasar sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi bisakah diwujudkan, entahlah tapi yang pasti kalau kita secara bersama keluarga besar masyarakat Sumatera Barat memahami kenyataan ini, dan menyadari kita berada di jurang kehancuran tentu mari kita buat komitmen untuk berbenah diri dengan usaha-usaha :

Pertama, Mesti ada komitmen pimpinan dan para pemegang kekuasaan untuk memperankan dirinya sebagai pengontrol Negara dan penggerak Negara ke arah jalan yang tepat. Usaha tersebut diantaranya adalah mengontrol media televisi membuat siaran-siaran yang tidak berdimensi keburukan dan kesesatan seperti apa yang terjadi hari ini, mengontrol keinginan dan hasrat untuk memiliki kesenangan yang berlebihan sebagai mana dilarang dalam ajaran oleh kitab suci kita, membelanjakan dana publik pada pembelanjaan barang modal yang produktif termasuk alokasi dana pendidikan yang memadai untuk anak usia sekolah dan perguruan tinggi termasuk beasiswa 5 % dari total dana publik untuk anak keluarga miskin ke Perguruan Tinggi.

Kedua, Perlu ada sistem pembelajaran masyarakat yang memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk selalu membelanjakan uang-uangnya untuk aset yang nilainya akan selalu bertambah dan bukan berkurang.

Ketiga, Perlunya komitmen yang kuat dari masyarakat

untuk mengurangi konsumsi yang tidak penting seperti merokok dan menggunakan kekayaan (uang) yang dimiliki untuk membeli buku anak sekolah atau bibit-bibit tanaman bagi petani, biaya pendidikan menambah keterampilan bagi pekerja dan biaya penambahan modal kerja bagi pedagang kaki lima.

Keempat, perlunya komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan publik yang lebih harmonis dan bersahaja dengan saling menghargai kedudukan masing-masing dan saling memberikan penghargaan kemanusiaan bagi kelompok-kelompok sosial yang riskan dengan penyakit sosial dan cacat tubuh, orang tua renta dan lain-lain. Mudah-mudahan Sumatera Barat lebih manusiawi, lebih bermartabat dan lebih makmur di masa mendatang. Amin

Pendapat Se-orang Guru tentang Pengurangan Kemiskinan

Responden :

Syafri, S.Pd. Guru - Tinggal di Kampung Padang- Padang Gelugur- Pasaman

Lebih dari 20 tahun saya berkecimpung dalam dunia pendidikan, mengabdikan diri sebagai pendidik. Saya pertama sekali ditempatkan di sebuah sekolah yang terpencil di Kabupaten Pasaman tepatnya di SD Muaro Sei Lolo tahun 1985. Jarak SD dengan jalan raya lebih kurang 80 Km dan bisa ditempuh dengan jalan kaki selama 2 hari perjalanan kaki. Setelah itu saya mengabdikan diri di SD Makmur Padang Gelugur yang berada di jalan lintas Sumatera.

Saya banyak bergaul dengan masyarakat, merasakan bagaimana susahnyanya hidup pada saat harga-harga selalu naik sementara itu sumber penghasilan tidak bertambah. Disekitar lingkungan saya tinggal penduduk bermata pencarian sebagai petani padi dan ikan, saya melihat rumah tangga yang berkekurangan relatif tidak memiliki lahan untuk digarap dan juga jika kita telusuri lagi lebih mendalam ternyata kepala rumah tangga berlatarbelakang pendidikan rendah bahwa tidak tamat Sekolah Dasar. Dua hal yang menjadi penyebab kemiskinan itu menurut saya yakni terbatasnya lahan keluarga yang akan

diolah oleh kepala rumah tangga untuk menghasilkan padi dan yang kedua kepala rumah tangga tidak menggunakan waktu senggang, atau waktu dimana tidak bekerja pada musim sawah karena kepala rumah tangga tidak memiliki keahlian bekerja. Rata-rata rumah tangga miskin memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar sehingga lahan yang dimiliki tidak bisa menghasilkan produksi pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dengan keterbatasan lahan tersebut, petani berusaha meningkatkan penghasilannya dengan model tumpang sari atau diversifikasi, petani mensiasati optimalisasi penggunaan lahan dengan melakukan produksi silang dan bergantian. Satu periode tanam digunakan untuk padi dan setelah padi di panen, lahan digunakan untuk kolam ikan dan setelah 3 bulan atau panen ikan dilakukan diganti dengan palawija dan seterusnya. Pola ini bisa dilakukan dengan catatan bahwa tersedia air yang memadai untuk mengalir lahan, namun selama ini petani sering bermasalah dengan air ini, sehingga model ini hanya bisa dilakukan pada saat musim hujan tetapi jika musim panas/cerah, hampir tidak bisa dilakukan. Dan dari bincang-bincang penulis dengan petani cara itu cukup membantu meningkatkan penghasilan rumah tangga. Namun dalam proses bertani sawah (3 bulan), kolam ikan (3 bulan), palawija (3 bulan) dan kembali bertani padi (3) bulan. Kepala rumah tangga sesungguhnya tidak setiap hari di sawah atau ditempat lahan itu bekerja, ketika habis tanam 1 bulan kemudian baru proses menyiangi sawah dan pemupukan sementara 26 hari itu rumah tangga tidak memiliki pekerjaan sampingan, termasuk juga dalam proses berkolam ikan dan bertanam sayuran.

Intinya adalah bahwa ada waktu tidak bekerja (senggang) yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh kepala rumah tangga untuk melakukan pekerjaan sampingan namun karena keterbatasan keahlian, beberapa pekerjaan yang membutuhkan skills tidak bisa dilakukan. Penulis kira inilah persoalan kemiskinan yang perlu ditanggulangi, yakni ketidakmampuan kepala rumah tangga meningkatkan pendapatan karena keterbatasan keahlian dan pola hidup yang tidak memiliki semangat kerja dan semangat berubah yang tinggi. Kepala rumah tangga akhirnya terjebak dengan mimpi merubah nasib dengan cepat (*instan*), seperti judi, memasang

nomor berhadiah (togel) dan membeli sejumlah pulsa untuk ikut kuis SMS di stasiun televisi swasta nasional.

Perilaku ini menyebabkan kemampuan ekonomi rumah tangga menjadi lemah akhirnya daya beli rumah tangga terhadap kebutuhan pokok dan investasi pendidikan anak menjadi turun. Dari pengalaman saya menjadi pendidik, saya melihat beberapa murid saya yang belajar dari keluarga miskin banyak yang sukses, walaupun orang tuanya tidak memiliki cukup dana untuk biaya pendidikan namun semangat dan motivasi belajar anak mendorong motivasi kepala rumah tangga untuk bekerja lebih giat dalam mencari uang untuk menyekolahkan anak mereka. Kekuatan motivasi ini menjadi daya dukung yang amat kuat untuk maju dalam keluarga miskin, namun tentu saja motivasi itu tidak lahir begitu saja tapi merupakan proses sosialisasi yang kami lakukan di sekolah dan kunjungan-kunjungan ke rumah orang tua siswa.

Beberapa murid saya telah banyak yang berubah nasibnya, dari orang tuanya yang petani miskin, anaknya sudah menjadi guru, polisi, tentara, dosen, dokter, bidan bahkan beberapa orang sudah melanjutkan pendidikan ke program doktor.

Pendek kata, saya berkesimpulan bersekolah atau menyekolahkan anak adalah jalan yang tepat untuk memperbaiki status ekonomi keluarga miskin. Namun pada umumnya keluarga miskin selalu bertanya dari mana kami mendapatkan uang untuk meningkatkan pendidikan anak, jangankan menyekolahkan anak, kebutuhan untuk makan saja kami kesulitan?, Inilah pertanyaan umum yang selalu kami hadapi dalam memotivasi orang tua murid dalam menyekolahkan anak. Jika pemahaman orang tua tinggi terhadap makna pendidikan biasanya tingkat prestasi belajar anak juga cukup memadai untuk melanjutkan pendidikan dasar ke tingkat menengah dan tingkat yang lebih tinggi. Tingkat pemahaman orang tua juga biasanya dilatarbelakangi oleh tingkat rasionalitas orang tua yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan kepala rumah tangga yang rasional akan mampu mencari solusi terhadap biaya pendidikan anaknya. Namun persoalannya adalah pada keluarga miskin, sudahlah miskin prestasi belajar anaknya juga rendah. Gejala ini hampir

menjadi gejala umum, anak yang berasal dari keluarga miskin juga memiliki prestasi belajar yang rendah, sehingga dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena semakin tinggi tingkat pendidikan persaingan untuk masuk pada sekolah yang berkualitas juga semakin ketat, dan pada saat persaingan itulah anak dari keluarga miskin tidak mampu bersaing. Rendahnya prestasi hasil belajar anak keluarga miskin bukan karena potensi akademik yang rendah (IQ) tapi di rumah, anak tidak memiliki sarana dan prasarana belajar yang memadai, dan waktu yang memadai untuk belajar. Anak keluarga miskin biasanya setelah pulang sekolah harus membantu orang tua bekerja disawah, ladang dan mengasuh adik-adiknya sehingga waktu belajar hampir tidak ada.

Saya kira inilah peran pemerintah yang bisa dilakukan untuk membantu rumah tangga miskin, perlu ada beasiswa khusus yang diberikan kepada anak keluarga miskin untuk penyediaan sarana dan prasarana belajar di rumah dan tunjangan pendidikan bagi anak keluarga miskin sehingga mendorong prestasi belajar anak meningkat sehingga hidupnya bisa berubah dikemudian hari menjadi kelompok profesional, dan walaupun menjadi petani tapi sudah menjadi kepala rumah tangga yang rasional dalam bertindak.

Pendapat, Aktivis Kemasyarakatan

**Responden : Resmiati, Tokoh Masyarakat Mapattunggul
Pemuda Pelopor Pembangunan Nasional 2003**

Mengurangi Kemiskinan dengan Cara Membangun Sarana Ekonomi Rakyat

Saya adalah ibu rumah tangga, yang sedang asik membesarkan kedua anak saya, yang masih berumur 3 tahun dan 9 bulan, umur saya 27 tahun. Saya hanya tamat SLTA, ingin sekali kuliah namun apa daya tangan tak sampai, orang tua tak mampu menyekolakan. Setelah menamatkan pendidikan di SMEA Negeri Lubuksikaping, saya kembali ke kampung halaman di Mapattunggul sebuah kecamatan terpencil di Pasaman. Setelah tamat 1998, saya mengajar di SD Tombang, saya hanya terpanggil karena waktu itu guru-guru jarang datang ke sekolah. Sambil menyedap karet pada

pagi hari, siangya saya mengajar di Sekolah Dasar tempat saya tinggal. Pada tahun 2001, ketika pemerintah melakukan program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) saya melamar menjadi Fasilitator Desa (FD) dan diterima oleh tim Fasilitator Kecamatan menjadi staff fasilitator desa, lebih dari 6 bulan saya di FD saya terpilih menjadi bendahara di UPK (unit pelayanan kecamatan) di Kecamatan Rao Mapattunggul, dan karena dianggap bisa bekerja, saya diangkat menjadi Asisten FK (fasilitator Kecamatan) di program Kecamatan Mapattunggul hingga tahun 2005. Pada tahun 2004, saya juga diberi kesempatan pemerintah daerah untuk mengikuti lomba pemuda pelopor pembangunan, di Kabupaten Pasaman saya terpilih menjadi pemuda pelopor dan juga di Propinsi Sumatera Barat saya juga memperoleh juara 1 dan akhirnya saya terpilih menjadi pemuda pelopor pembangunan tingkat nasional, dalam bidang kesukarelaan, juara Ketiga. Dan Alhamdulillah saya menikmati indahnya ibu kota Republik Indonesia, ketika saya lihat di Jakarta, satu jembatan layang saja saya hitung-hitung sudah cukup untuk membangun jalan ke kampung saya.

Pada saat saya menjadi Asisten FK saya memperoleh banyak sekali pengalaman pendampingan dengan masyarakat khususnya masyarakat miskin di daerah terpencil, dengan latarbelakang saya dari daerah terpencil, dan pengalaman organisasi saya ketika dulu sekolah di SMEA, beberapa program PPK dapat kami laksanakan dengan baik. Awalnya, tahun 2001 hampir 80% lokasi perkampungan penduduk tidak dapat dilalui kendaraan roda empat namun berkat komitmen dan kerjasama dari semua pihak sekarang hampir 90% lokasi perkampungan telah bisa dilalui kendaraan roda empat walaupun masih jalan tanah dan bisa dilalui dengan mobil garden dua (artop). Ketika akhir tahun 2000 masih banyak perkampungan di Mapattunggul menggunakan kuda beban sebagai alat angkut utama penduduk namun sekarang sudah menggunakan mobil. Awalnya ketika kendaraan belum mencapai kampung harga kebutuhan pokok sehari-hari penduduk harganya mencapai 4 x lipat dari harga standar yang berlaku umum di pasar kecamatan, sekarang harga di ibu kecamatan sudah hampir sama dengan harga barang di kampung terjauh dari ibu kecamatan. Karena para pedagang pengumpul karet juga bersaing dengan ketat di pasar kampung

untuk mendapatkan barang angkutan keluar dari kampung.

Penduduk di Mapattunggul pada umumnya mengandalkan pohon karet sebagai sumber penghasilan utama. Dulu pada tahun 2000, karet di kampung yang paling jauh dari ibu kecamatan lebih kurang 90 Km dari Rao ibu kecamatan, harganya hanya Rp 900 sementara harga di Rao Rp 3.500,-/Kg, dan Rp 2.600 selisihnya menjadi ongkos kuda beban dan keuntungan pedagang. Tapi sekarang harga di Karet di Pasar Rao Rp 4.000,-/kg dan harga di kampung paling jauh Rp 5.000/Kg. dan ongkos angkut kendaraan Rp 500 dan keuntungan pedagang Rp 5.00,-. Dengan demikian pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah mampu meningkatkan keuntungan petani karet lebih tinggi. Sebelum adanya jalan lebih dari 74% harga karet di pasar Rao menjadi keuntungan pedagang dan ongkos angkut namun sekarang keuntungan pedagang dan ongkos angkut tinggal 20% dari keuntungan petani naik lebih dari 50% dari harga jual. Rata-rata setiap petani mampu menghasilkan getah karet 20 Kg per hari, pada masa lalu hanya menghasilkan uang Rp 18.000,- tapi sekarang mampu dihasilkan Rp 80.000, artinya kemampuan masyarakat juga akan meningkat

Dari pengamatan saya secara sederhana tentang penanggulangan kemiskinan dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa penanggulangan kemiskinan mesti dipahami apa yang menjadi penyebab kemiskinan itu sendiri, jika penduduk terkungkung oleh gunung yang tinggi dan lautan yang luas, maka barangkali sarana transportasi yang menjadi solusi, seperti jalan. Pengerasan dan perbaikan jalan menjadi suatu hal yang amat penting dalam mendorong berjalannya perekonomian masyarakat. Masyarakat akan lebih mudah memobilisasi barang dan jasa sehingga harga kebutuhan pokok yang dibeli oleh petani jauh lebih rendah dari masa sebelumnya dan harga jual produk hasil pertanian petani juga dijual dengan harga yang lebih tinggi.

Pengalaman saya menjadi fasilitator pembangunan, kadang-kadang amat sulit meyakinkan penduduk tentang perlunya kerjasama dan dukungan dari semua pihak untuk membangun jalan itu. Banyak persoalan lapangan yang saya temui diantaranya tentang ganti rugi, program PPK

tidak membolehkan adanya ganti rugi lahan, ini menjadi kendala ketika membangun jalan. Pengalaman saya ketika menyelesaikan persoalan itu dimusyawarahkan dalam musyawarah adat di nagari, sehingga lahir kesadaran bersama bahwa jalan itu menjadi kepentingan bersama dan juga akan mempertinggi harga tanah yang dilewati kendaraan sehingga ganti rugi akan bisa digantikan oleh kenaikan harga tanah dan harga jual dari produk-produk pertanian penduduk.

Namun tentu saja, usaha yang saya jalani tidaklah kemudian menjadi solusi yang tepat ketika proses waktu terus berjalan, setelah kendaraan masuk ke-kampung, pendapatan rumah tangga meningkat, maka pola konsumsi penduduk mulai berubah, melihat kendaraan roda dua sangat membantu transportasi dan memberikan kesan kesenangan kepada anak-anak muda, akhirnya kebun karet di jual dan dibeli ke kendaraan roda dua. Saya mengamati sudah hampir setiap rumah memiliki roda dua, namun ketika saya telusuri pembelian itu pada umumnya kredit dan uang mukanya bersumber dari penjualan kebun karet. Banyak keluarga yang sesungguhnya belum mampu untuk membeli sepeda motor tapi anak-anak mereka sudah sangat bernaafsu sekali untuk memiliki dan menggunakan sepeda motor, maka terpaksa kebun karet dijual ke toke-toke karet kampung dan orang luar kampung. Sehingga selanjutnya rumah tangga akan terbebani oleh angsuran sepeda motor dan biaya operasional sepeda motor, pada hal sepeda motor tidak memberikan sumbangan terhadap pendapatan rumah tangga.

Akhirnya saya juga mengambil hikmah dibalik itu semua, ternyata solusi yang diperoleh dari pembangunan jalan akhirnya menimbulkan persoalan baru yang tentu saja membutuhkan pemimpin yang memiliki visi pendidikan masyarakat secara umum sehingga kesejahteraan bisa ditingkatkan.

BAB VI

PENDIDIKAN BAGI RUMAH TANGGA DAN MASYARAKAT

Indonesia merupakan negara yang memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Proklamasi 17 Agustus 1945, merupakan awal lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, yang menyatukan wilayah dan masyarakat dalam sebuah negara yang besar. Enam puluh empat tahun telah berlalu, sejak Hindia Belanda hingga abad globalisasi sekarang ini tetap saja dalam konstelasi ekonomi dunia Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang dan termasuk dalam kategori miskin. Hun (dalam Kompas, 26 Januari 2008) mengemukakan musuh utama yang harus dilawan oleh negara-negara berkembang sekarang adalah kebodohan dan kemalasan. Keduanya merupakan bibit utama dari kemiskinan. Keberhasilan mengurangi kebodohan dan kemiskinan ini merupakan kunci sukses meraih kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Kemiskinan dan rendahnya daya saing bangsa merupakan persoalan utama dari perekonomian Indonesia. Rendahnya produktivitas rumah tangga di Indonesia kuat dugaan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, Soewardi (1999) mengemukakan bahwa kelemahan masyarakat Indonesia merupakan akibat dari budaya santai (*soft culture*) yang dicirikan sifat tidak adanya orientasi masa depan, tidak ada *growth philosophy*, cepat menyerah, berpaling dari akhirat dan lamban. Lebih lanjut Soewardi (1999) menemukan bahwa di kalangan rumah tangga yang berpenghasilan rendah dan tinggi ditemukan rendahnya karsa, rumah tangga berpendapatan tinggi bersifat KKK (kuda lepas kandang) dan rumah tangga berpenghasilan rendah MKT (mobil kurang tenaga). Kedua rumah tangga ini menambah penghasilannya bukan dengan

pertumbuhan kuantitas produk dan jasa (*growth*) melainkan melalui perbesaran penghasilan "*Share*" atau pangsa dalam pembagian pendapatan. Dalam pertarungan itu lapisan ataslah yang mendapatkan pembagiaan (*share*) yang lebih besar. Akibatnya, kemudian lahir ketidakeimbangan pendapatan antara kelompok rumah tangga yang berpenghasilan tinggi dengan yang rendah. Fenomena ini bisa dilihat dari struktur kepemilikan aset produktif (*distribusi fungsional*). Struktur ekonomi nasional terjadi ketidakadilan, dimana kesenjangan kepemilikan aset-aset produktif, orang dalam jumlah sedikit yakni sebesar 0,01% dari jumlah penduduk memiliki 57% aset produktif namun orang dalam jumlah yang banyak yakni sebesar 99,9% hanya memiliki 43% aset produktif nasional (data diolah dari BPS, 2002). Akibatnya, daya saing bangsa menjadi rendah.

Beberapa ahli menilai, pada dasarnya Indonesia memiliki peluang yang amat besar untuk menjadi negara makmur, besar dan bermartabat. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, beragam dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Akan tetapi, peluang itu paling tidak sampai awal tahun 2008 ini belum terbukti secara nyata. Dalam catatan BPS masih terdapat 16,5% yang dikategorikan sebagai penduduk miskin dengan penghasilan rata-rata kurang dari 152.847/bulan. Pada saat yang sama dunia terus maju, globalisasi ekonomi telah berlangsung, Indonesia telah menjadi bagian dari ekonomi globalisasi tersebut.

Beberapa ahli meyakini, faktor manusia merupakan faktor yang utama dari keberhasilan pembangunan bangsa, dan perbaikan layanan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) itu merupakan kebijakan yang amat penting dilakukan, termasuk layanan pendidikan, kesehatan dan program lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM tersebut (Todaro, 2003).

Manusia atau sumber daya manusia merupakan faktor yang aktif dalam pembangunan dan variabel yang amat penting dalam eksistensi bangsa. Beberapa indikator pembangunan manusia Indonesia masih dikategorikan sebagai negara miskin di dunia. Empat indikator pembangunan manusia menunjukkan. Rata-rata orang Indonesia memiliki

harapan hidup pada umur 66,2 tahun, 88,4% penduduk dewasa telah mampu membaca huruf latin, rata-rata orang bersekolah di Indonesia selama 6,7 tahun dan pengeluaran riil perkapita penduduk Rp 578.800, dengan angka ini Indonesia pada tahun 1999 memiliki HDI 64,3 dan di level dunia berada pada tingkat 117 dari 157 negara yang dihitung (Bappenas, 2001).

Beberapa peneliti menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi (Alhumami, Kompas, 2004). Schultz (1960, dalam Uharsputra, 2007) menjelaskan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui proses pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang penting bagi suatu rumah tangga dan bangsa. Kesadaran yang sama juga diutarakan oleh Stiglitz (2006) peraih hadiah nobel ekonomi, mengenai pentingnya pendidikan untuk semua bagi warga negara.

Usaha-usaha untuk membangun SDM manusia dengan visi keunggulan mesti tetap ditingkatkan. Idrus (1997) dalam pidato ilmiahnya mengungkapkan bahwa kondisi sekarang berada pada kondisi yang selalu berubah sehingga diperlukan pemikiran kita untuk memikirkan dan mengantisipasi perubahan tersebut dengan pertimbangan : Kita pada saat ini dihadapkan pada kondisi global dengan liberalisasi pasar, dimana persaingan (*competition*) antar organisasi, baik yang berorientasi pada keuntungan (*profit*) maupun yang berorientasi pada '*nonprofit*', semakin tajam. Setiap organisasi didorong untuk selalu meningkatkan kinerjanya (*performance*), dan keunggulan bersaing dalam jangka panjang / berkelanjutan (*sustained competitive advantage* atau *SCA*) dalam rangka memuaskan pelanggan (*customers or users satisfaction*), dan untuk memperoleh manfaat (*benefit*), baik yang berupa keuntungan maupun citra (*public image*) organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Kedua, perkembangan 3-C (*computer, communication, and control*), telah membuat jarak antarnegara dan bangsa semakin dekat, yang memungkinkan transfer sumber daya antarnegara semakin mudah dan cepat. Keadaan ini pula membuat perubahan lingkungan external organisasi berubah dengan cepat dan sulit diprediksi. Ketiga, sumber daya (manusia, dana, material, waktu, dan teknologi) akan dimanfaatkan seefisien mungkin. Persaingan yang '*fair*' tanpa subsidi dan proteksi akan diberlakukan di dalam

menghasilkan 'output' (barang dan jasa) yang berkualitas. Memperhatikan ketiga hal di atas, maka 'strategy' merupakan salah satu aspek penting untuk menjawab perubahan yang cepat dan 'unpredictable' di atas.

A. Pentingnya Pendidikan

Membangun sistem pendidikan yang mapan dengan berorientasi pada keunggulan bersaing merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM. Pendidikan merupakan usaha menciptakan manusia siap memasuki zaman yang selalu berubah. Potensi dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia membuat manusia bisa berpikir dan selalu belajar sebagai salah satu tugas kemanusiaannya. Ahli sosiologi dan antropologi membagi beberapa jenis aktivitas dan kemampuan manusia untuk bisa beradaptasi, transformasi kebudayaan dan evolusi kebudayaan, dengan lingkungan di antaranya adalah sosialisasi (*socialization*), internalisasi (*internalization*) dan enkulturasi (*enculturation*), (Koentjaraningrat, 2002:227).

Proses ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah sistem pendidikan (*education*) yang lebih sistematis sebagai sistem budaya atau interaksi intelektual yang formal atau informal. Collins (1977, dalam Sanderson, 2003) mengemukakan ada 3 tipe dasar pendidikan yang ditemukan diseluruh masyarakat dunia yakni pendidikan dan keterampilan praktis, pendidikan untuk keanggotaan kelompok status dan bisnis dan pendidikan birokratis. Lebih lanjut Collins (dalam, Sanderson, 2003) menjelaskan sistem pendidikan keterampilan praktis dirancang untuk memberikan keterampilan dan kemampuan teknis tertentu yang dipandang penting dalam melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan dan lain-lain (pendidikan kursus/ magang keahlian). Pendidikan kelompok status dilakukan bertujuan untuk simbolisasi memperkuat prestise dan hak-hak istimewa (*privilege*) kelompok elit dalam masyarakat yang memiliki strata sosial (pendidikan informal). Dan pendidikan birokrasi diciptakan oleh pemerintah untuk melayani salah satu atau kedua tujuan, untuk seleksi rekrutmen posisi-posisi pemerintahan, penekanan pada ujian, syarat kehadiran, peringkat dan derajat (Pendidikan formal)

Dalam penerapannya sistem tiga sistem pendidikan

ini pada masyarakat agraris dan industri menggabungkan tiga bentuk sistem pendidikan tersebut dan kemudian dalam fase selanjutnya. Pendidikan mengalami perkembangan (*expansional*). Di Eropa muncul sistem pendidikan mobilitas yang disponsori (*Sponsored mobility*), dimana para peserta didik (siswa) ditempatkan pada jalur/jenjang pendidikan berdasarkan pertumbuhan dan perkembangannya. Di Unisovyet (Rusia) dan Jepang timbul suatu sistem pendidikan mobilitas kontes (*Contes - mobility*), tidak memiliki penyaluran yang resmi secara informal dan tersembunyi dan terdapat kompetisi yang terbuka untuk mencapai pendidikan yang maju, (Collins, 1979, dalam Sanderson, 2003)

Di Amerika serikat berkembang sistem pendidikan berdasarkan jenjang sekolah, pra sekolah, dasar, menengah dan tinggi sebagai implikasi dari teori fungsional. Pendidikan berkembang karena kebutuhan masyarakat industri dengan perubahan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Collins (1979, dalam Sanderson, 2003) meringkaskan prinsip-prinsip utama teori fungsional pendidikan yakni persyaratan pendidikan dari pekerjaan-pekerjaan dalam masyarakat industri meningkat sebagai akibat dari adanya perubahan teknologi, pendidikan formal memberikan latihan yang diperlukan kepada orang untuk mendapatkan pekerjaan yang berketerampilan lebih tinggi dan semakin banyak orang dituntut untuk menghabiskan waktu lebih lama di sekolah. Seiring dengan itu Folger dan Nam (1964, Sanderson, 2003; 493) menyatakan bahwa persyaratan pendidikan naik menjelaskan bahwa pekerja yang berpendidikan lebih baik ternyata.

Boli - Bernet (1977) dan John Meyer, Ramirez, Robinson (1985, dalam Sanderson, 2003) menjelaskan bahwa pendidikan massal yang telah berkembang menjadi salah satu aspek pembangunan bangsa, karena memiliki standar, rasional melintasi lintas etnis, agama, ras, jenis kelamin, dan sebagainya, melembaga dan tersusun secara sistematis dan diarahkan pada sosialisasi individu sebagai satuan sosial primer untuk mencapai tujuan agama, politik, dan ekonomi nasional. Ahli ekonomi mulai dari Adam Smith, Jhon Stuart Mill, Theodore Schultz, Hervey Leibenstein dan Garry S Becker (1960-an, dalam Elfindri, 2001) mengembangkan kerangka berpikir faktor pendidikan sudah diakui sebagai salah satu variabel yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi

dan pembangunan dan menganggap pendidikan sebagai investasi yang akan memberikan keuntungan, baik individu, eksternalitas serta benefit sosial. Berdasarkan beberapa riset empiris para ahli ekonomi (Elfindri, 2001) memiliki keyakinan semakin tinggi tingkat pendidikan maka pengembalian individu, eksternalitas ekonomi dan benefit sosial juga akan semakin baik.

Pengembalian individu (rumah tangga) merupakan salah satu penentu rumah tangga membelanjakan pendapatannya untuk investasi pendidikan khususnya kepada anak. Pengambilan keputusan utama rumah tangga khususnya orang tua berkaitan dengan investasi dini untuk mengalokasikan sumber daya ekonomis rumah tangga untuk digunakan sebagai usaha untuk memaksimalkan kualitas anak, melalui kesehatan dan gizi anak, pembentukan skill dan pengetahuan anak melalui jenjang pendidikan termasuk keterlibatan dan interaksi orang tua dengan anak, (Elfindri, 2001).

Globalisasi ekonomi merupakan suatu sistem perdagangan barang dan jasa dilaksanakan tanpa hambatan, antar negara, sehingga intensitas dan lingkungan persaingan semakin kompleks. Perusahaan-perusahaan negara maju secara bebas masuk ke wilayah negara kita, dan perusahaan kita mesti menghadapi lingkungan persaingan terbuka ini. Termasuk juga tenaga ahli, orang-orang, ide dan gagasan bergerak melintasi batas negara (Hitt, 2001)

B. Penciptaan Nilai dalam Persaingan

Kemampuan daya saing bangsa tidak terlepas dari kemampuan daya saing dari seluruh komponen bangsa, baik individu, institusi pemerintah, lembaga bisnis, lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta lembaga pendidikan.

Globalisasi ekonomi menjadikan lingkungan persaingan semakin luas, individu dan institusi Indonesia akan berhadapan langsung dengan individu dan institusi dari negara-negara lain di dunia. Globalisasi ekonomi mendorong meningkatnya standar output, biaya, produktivitas, kinerja dan masa hidup produk, dan kelancaran arus informasi, dan intensitas persaingan semakin ketat (Hitt, 2001). Miller (dalam Hitt, 2001). Lembaga bisnis atau perusahaan yang bersaing dengan strategis adalah perusahaan yang telah belajar

bagaimana mengaplikasikan pemikiran-pemikiran kompetitif yang diperoleh dari unsur karakteristik lokal (domestik) dan berkembang ke pasar global. Artinya, tetap memelihara pemikiran lokal sehingga dapat melakukan modifikasi dan inovasi dan menerapkannya secara benar pada lingkungan global.

Pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan output tidak terlepas dari kemampuan perusahaan untuk menambah input industri. Bahan material, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta ekspansi pasar yang memadai. Untuk menciptakan itu Shumpeter's (1934) seorang ahli ekonomi Jerman meyakini bahwa inovasi pengusaha merupakan kunci dari keberhasilan tersebut. Dengan rangkaian perilaku pengusaha (*entrepreneur*) yang dimulai dari kreativitas dan inovasi (dalam Kirchoff, 1994)

Dalam kajian mikro, sebuah perusahaan keunggulan bersaing untuk jangka panjang, Porter (1993) menawarkan landasan fundamental bagi kinerja (*performance*) di atas rata-rata yakni dengan keunggulan biaya (*cost leader*), *diferensiasi*, dan *focus*. Beberapa pilihan dan kombinasi bisa dilakukan oleh institusi perusahaan untuk mencapai keunggulan di pada masa jangka panjang. Lebih lanjut Porter menjelaskan ada dua tipe dasar keunggulan bersaing yang dapat dimiliki yakni biaya rendah atau *diferensiasi*. Kedua tipe dasar keunggulan bersaing ini bisa dikombinasikan dalam ruang lingkup institusi perusahaan dengan tiga pilihan strategi generik yakni keunggulan biaya, *diferensiasi* dan fokus.

Ketiga strategi generik ini bisa digambarkan dalam gambar 6.1 berikut ini.

Cakupan persaingan	Biaya lebih rendah	<i>diferensiasi</i>
Sasaran Luas	Keunggulan biaya	<i>diferensiasi</i>
Sasaran Sempit	Focus biaya	Focus <i>diferensiasi</i>

Gambar : 6.1 Tiga Strategi Generik
Sumber : Porter (1993)

Lebih lanjut Porter (1993) menjelaskan bahwa keunggulan biaya, perusahaan berusaha menjadi produsen

dengan biaya produksi yang rendah, dengan sumber di antaranya adalah pencapaian skala ekonomi (*economies of scale*), teknologi swa-milik (*proprietary technology*), dan akses ke sumber bahan baku. Diferensiasi dilakukan dengan usaha perusahaan memiliki keunikan, memilih atribut penting yang dapat membedakan dengan pesaing dan sulit ditiru oleh pesaing. Fokus mengoptimalkan strategi untuk segmen target yang dipilih, perusahaan fokus berupaya mencapai keunggulan bersaing dalam segmen targetnya walaupun perusahaan tidak memiliki keunggulan bersaing secara menyeluruh.

Lebihlanjut, (Barney, 1991; Grant, 1991) mengembangkan teori "basis sumber daya" menurut mereka bahwa sumber keunggulan dalam persaingan bersumber dari nilai sumber daya, langka, unik dan sulit ditiru. Sumber daya ini biasanya bisa dalam bentuk tak berwujud dan bisa dibangun dengan pengetahuan dan pengalaman perusahaan (Teece, Pisano & Shuen, 1997)

Greene dan Brown (1997) menyatakan bahwa masing-masing kombinasi dari pertumbuhan dan inovasi akan memerlukan kombinasi sumber daya yang berbeda seperti manusia, sosial, fisik, organisasi atau keuangan. Inti ekonomi, Greene dan Brown (1997) yang mengusulkan pembangunan sumber daya manusia (*human capital*) merupakan kombinasi dari sistem pendidikan, pengalaman, dan keahlian.

Globalisasi menyebabkan perubahan begitu cepat terjadi sebagai akibat dari perubahan teknologi, arus informasi yang begitu cepat melalui media yang semakin canggih. Akibatnya, siklus hidup suatu produk dan jasa semakin singkat, jenis-jenis pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan juga semakin cepat berubah. Teknologi dibangun dengan basis keilmuan, pengetahuan, keahlian dan kesesuaiannya dengan budaya lokal. Akibatnya, kemampuan daya serap dan adaptasi sumber daya manusia menjadi kunci sukses dalam persaingan (Nielson 1999, dalam Hitt, 2001)

Berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai salah barang ekonomi (tenaga kerja), maka kemampuan bersaing individu amat ditentukan oleh keahlian yang dimiliki, spesifikasi, keunikan dan mampu bersaing upah dengan

pekerja lain. Untuk menciptakan SDM unggul ini diperlukan suatu proses pendidikan.

Proses pendidikan merupakan usaha yang telah sejak diyakini menjadi usaha yang mangkus dalam menciptakan sumber daya manusia yang cakap. Cakap dalam ranah pengetahuan (*kognitif*), cakap dalam ranah sikap (*afektif*) dan cakap dalam ranah keterampilan (*psikomotorik*) B.S Bloom tahun (1956,dalam Winkel,1996) Bloom mengembangkan taksonomi atau klasifikasi (*taxonomy of education objectives*) sebagai tujuan instruksional, 1) Ranah kognitif (*cognitive domain*) dengan tingkatan: *Knowledge, comprehension, application, analysis, Synnthesis*, dan *evaluation*. 2) Ranah Afektif (*affective domain*) *Receiving, responding, valuing, organization dan characterization by value or value complex* dan 3) Ranah Psikomotorik, *perception, set, guided response, mechanical response, complex response, adjustment dan creativity*.

Belajar merupakan proses kehidupan. Jika dilakukan secara sistematis, bisa kita namakan dengan pendidikan. Belajar memiliki peran yang sangat penting bagi manusia karena belajar merupakan perubahan tingkah laku manusia yang dikendalikan oleh ganjaran (*reward*) atau penguatan (*reinforcement*) dari lingkungan dan juga dikenal dengan teori tingkah laku dan stimulus dan respons (*S-R Psikologis*) yang dikembangkan oleh Thorndike, Watson, Ivan Povlov, dan guthrie (dalam Nirwana, 2004). Kemudian Skinner (dalam Gredler, 1991) memperdalam dan menyempurnakan teori belajar dengan menghubungkan antara satu stimulus dengan stimulus lainnya, memahami respon sendiri dan berbagai konsekwensi yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat laku peserta didik. Skinner juga mengembalikan dari pendidikan laboratorium ke praktek di kelas.

Perkembangan model tingkah laku (*behavioris*) diikuti oleh lahirnya model kognitif pada tahun 1970-an yang dikembangkan oleh Jean Piaget, Ausubel dan Bruner (dalam, nirwana, 2004). Lebih lanjuta Juan Piaget mengemukakan bahwa proses belajar sesungguhnya terdiri dari tiga tahap yakni asimilasi, akomodasi dan equilibrasi. Proses asimilasi adalah proses penyatuan (*pengintegrasian*) informasi baru kestruktur kognitif yang sudah ada dalam benak peserta didi, akomodasi

adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru dan equalibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dengan akomodasi. Sementara itu Ausubel (dalam nirwana, 2004) menjelaskan bahwa peserta didik akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan belajar (*Advance Organizer*) didefenisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik, pengatur kemajuan belajar adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didi. Dan kemudian model kognitif dilanjutkan kajiannya oleh Bruner (dalam Nirwana, 2004) menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan dalam bentuk konsep, teori, defenisi dan lain-lain melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya.

Pada akhir tahun 1977 Robert M Gagne mengembangkan Model belajar (dalam Winkel, 1996) menjelaskan bahwa belajar merupakan mekanisme yang dengan itu menjadikan anggota masyarakat menjadi cakap, meningkatnya keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai sehingga menghasilkan tingkah laku yang berbeda yang disebut dengan kapabilitas dari hasil belajar. Kapabilitas belajar diperoleh melalui stimulasi yang berasal dari lingkungan dan proses kognitif dari beberapa tahapan pengolahan informasi yang dilakukan peserta didik. Lebih lanjut Gagne menjelaskan bahwa belajar memiliki lima ragam belajar yakni : informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap dan siasat kognitif.

Pengembangan pendidikan juga berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja dapat dilakukan sisi penawaran, dengan cara memperbaiki kualitas tenaga kerja dengan cara pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas Sumber daya Manusia dan memperbaiki budaya kerja dan nilai-nilai sosial.

C. Strategi Pendidikan Masyarakat

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin lama seseorang belajar atau semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kemungkinan untuk memperoleh penghasilan

yang lebih besar juga semakin tinggi. Ahli ekonomi mulai dari Adam Smith, Jhon Stuart Mill, Theodore Schultz, Hervey Leibenstein dan Garry S Becker (1960-an, dalam Elfindri, 2001) mengembangkan kerangka berpikir faktor pendidikan sudah diakui sebagai salah satu variabel yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dan menganggap pendidikan sebagai investasi yang akan memberikan keuntungan, baik individu, eksternalitas serta benefit sosial. Berdasarkan beberapa riset empiris para ahli ekonomi (Elfindri, 2001) memiliki keyakinan semakin tinggi tingkat pendidikan maka pengembalian individu, eksternalitas ekonomi dan benefit sosial juga akan semakin baik.

Pengembalian individu (rumah tangga) merupakan salah satu penentu rumah tangga membelanjakan pendapatannya untuk investasi pendidikan khususnya kepada anak. Pengambilan keputusan utama rumah tangga khususnya orang tua berkaitan dengan investasi dini untuk mengalokasikan sumber daya ekonomis rumah tangga untuk digunakan sebagai usaha untuk memaksimalkan kualitas anak, melalui kesehatan dan gizi anak, pembentukan skill dan pengetahuan anak melalui jenjang pendidikan termasuk keterlibatan dan interaksi orang tua dengan anak, (Elfindri, 2001).

Implikasi dari pemikiran ini, adalah bagaimana upaya rumah tangga dan upaya pemerintah bisa bersinergi untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Namun usaha tersebut amatlah sulit. Pada saat visi negara dalam konstitusi negara yang mengamanatkan sektor pendidikan minimal dibiayai 20%, pemerintah belum juga mampu memenuhi standar minimal itu, dan cenderung lembaga pendidikan pada level tinggi khususnya perguruan tinggi alokasi anggaran publik cenderung diperkecil sehingga belanja rumah tangga untuk perguruan tinggi semakin tinggi.

Kebijakan memperkecil alokasi anggaran negara untuk pendidikan tinggi sebagai upaya untuk pemerataan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Namun kebijakan ini kadang kala sedikit bertentangan dengan usaha untuk mempertinggi daya saing bangsa. Jika pendidikan dasar yang akan dikembangkan oleh pemerintah berarti pemerintah

sesungguhnya ingin memperbanyak jumlah buruh dan pekerja kasar di Indonesia untuk kuli di sektor formal dan sektor informal. Pada saat yang sama, pada saat produktivitas nasional belum menunjukkan kenaikan yang signifikan kemampuan rumah tangga untuk menyekolahkan anaknya juga akan semakin rendah. Akibatnya secara umum lama bersekolah penduduk juga tidak akan meningkat. Kalau kita perhatikan lama bersekolah Indonesia berkisar antara 6 sampai 7 tahun, artinya sebagian besar penduduk Indonesia hanya tamatan SD dan SLTP.

Paradigama peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan kesadaran atas kelemahan pengelolaan pendidikan yang sentralistik beberapa periode yang lalu. Pendapat ini senada dengan pandangan Suryadi (2003) yang mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan yang sentralistik menjadikan sekolah terkungkung oleh kekuasaan birokrasi yang "menggurita. Maka dikembangkan sistem pendidikan yang melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Dewan pendidikan dan komite sekolah ini tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, mengacu pada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun tujuan dewan pendidikan dan komite sekolah adalah sebagai berikut :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di kabupaten/kota (untuk dewan pendidikan) dan satuan pendidikan (untuk sekolah).
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

D. Upaya Publik, Penyediaan Dana Publik

Penyediaan layanan pendidikan merupakan salah satu tugas yang diemban oleh pemerintah dalam mempertinggi taraf pendidikan masyarakat. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita kemerdekaan. Sehingga kemudian UUD 1945 hasil amandemen dengan tegas menyatakan keharusan pemerintah menyediakan 20% dana publik untuk membiayai sektor pendidikan. Namun amanah itu sampai tahun 2008, nampaknya belum mampu diwujudkan secara maksimal oleh pemerintah. Data statistik pendidikan yang diterbitkan oleh Kompas, 26 Januari 2008 mempublikasikan mulai tahun 2002 hingga tahun 2008, berturut-turut persentase anggaran pendidikan yakni : tahun 2002= 3,31%, 2003= 4,42%, 2004= 4,57%, 2005=5,71%, 2006=9,1%, 2007=11,8% dan tahun 2008 9,19%. Pada tahun 2008 dari Rp 564,6 triliun RAPBN, anggaran pendidikan dianggarkan sebesar Rp 61,4 triliun.

Ada beberapa alasan sebagai dasar dari ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban konstitusi 20% dari total APBN dan APBD. Diantaranya adalah beratnya beban negara dalam menanggung biaya rutin pemerintahan, angsuran dan bunga hutang negara, dan beban subsidi yang masih tinggi khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Kalaulah pemimpin negeri ini memiliki rasa pengorbanan dan semangat kebangsaan maka pemenuhan kewajiban itu tidak akan menjadi persoalan. Semangat kebangsaan dan nilai pengorbanan itu semakin berkurang sebagai akibat dari terdapatnya sikap dan perilaku *materialisme* di kalangan anak bangsa termasuk para pemimpin bangsa. Rakyat dimintakan pengorbanannya atas resiko pembangunan dengan penggusuran, pembebasan tanah pada lokasi yang strategis. Dipihak lain, para fasilitator pembangunan termasuk pemerintah menerima imbalan finansial (*fee*) atas proyek-proyek pembangunan itu. Sehingga masyarakat menjadi apatis, dan kemudian menjadi anarkis.

1. Penciptaan Lingkungan Pendidikan yang Kondusif.

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan belajar bagi anak usia sekolah, keberhasilan pendidikan juga tidak terlepas dari suasana lingkungan masyarakat

yang mendukung. Dalyono (1997) menjelaskan bahwa lingkungan merupakan alam sekitar di luar diri individu manusia dan juga sesungguhnya mencakup material dan stimulus baik yang bersifat fisiologis, psikologis maupun sosial - budaya. Lebih lanjut Dalyono (1997) menjelaskan secara fisiologis lingkungan meliputi kondisi dan material jasmaniah di dalam tubuh seperti gizi, vitamin, air, zat asam, suhu, sistem saraf, peredaran darah, pernapasan, pencernaan makanan, kelenjer dan kesehatan jasmaniah. Secara psikologis lingkungan mencakup segenap stimulasi yang diterima oleh individu mulai sejak dalam konsensi, kelahiran sampai matinya. Dan secara sosial - kultural lingkungan mencakup segenap stimulasi interaksi dan kondisi dalam hubungannya dengan perlakuan atau pun karya orang lain. Pola hidup keluarga, pergaulan kelompok, pola hidup masyarakat dan latihan.

Menurut Prayitno (1989) lingkungan yang besar dan penting pengaruhnya terhadap minat dan keseriusan siswa dalam belajar adalah lingkungan sekolah dan keluarga (orang tua). Lingkungan sekolah yang dimaksud di sini adalah khusus lingkungan fisik dan sosial yang terdapat di dalam kelas atau sekolah pada umumnya. Lingkungan fisik sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan rasa aman, nyaman, dan memberikan fasilitas belajar yang banyak sangat menunjang minat siswa dalam belajar. Hubungan sosial antara guru dan siswa, dan siswa dengan siswa mempengaruhi proses belajar.

Sementara itu, Sukmadinata (2005) menjelaskan proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu lingkungan yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan ini mencakup lingkungan fisik, sosial dan intelektual dan nilai-nilai. Lingkungan fisik berkaitan dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia yang merupakan tempat dan sekaligus memberikan dukungan dan kadang-kadang juga menghambat bagi berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan antarmanusia, pergaulan antara pendidik dengan peserta didik serta orang lainnya yang terlibat dalam interaksi pendidikan. Lingkungan intelektual merupakan kondisi dan iklim sekaligus pendorong dan menunjang pengembangan

kemampuan berpikir. Lingkungan intelektual mencakup perangkat lunak, perangkat keras serta aktivitas-aktivitas pengembangan dan penerapan berpikir.

Dalam aspek lingkungan hal yang patut juga diperhatikan adalah, peranan media televisi. Media televisi amat mempengaruhi penggunaan waktu umat manusia di dunia, karena televisi menyajikan acara-acara hiburan dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (publik). Setelah televisi berwarna ditemukan tahun 1967 siaran-siaran televisi berkembang dengan pesat, hasil-hasil budaya lokal mulai ditampilkan di acara televisi pertandingan sumo di Jepang, drama telenovela di Amerika latin. Hasil riset di Jepang pada tahun 1960 menunjukkan rata-rata seorang dewasa di tiga jam sebelas menit menghabiskan waktu untuk menonton televisi. Anak-anak bahkan menghabiskan waktu yang lebih banyak (Briggs, 2000). Analisis sosial mulai memberikan argumentasinya pengaruh televisi terhadap perilaku masyarakat secara umum khususnya pada aspek moralitas. Para analisis sosial mengatakan bahwa televisi menjadi "media" (Ernie kovacs), "mata universal" (Frnak Llyod Wright), "Mata yang rakus" (Shulman), "Mata setan" (Neil Postman). Perdebatan tentang efek televisi berkenaan dengan aspek kesopanan, bahasa, seks, kekerasan dan selera (dalam Briggs, 2000). Sehingga beberapa negara di dunia mulai mengatur dan membuat regulasi tentang program televisi.

McLuhan (1996, dalam Briggs, 2000) menjelaskan televisi merupakan "*the medium is the message* (media itulah yang menjadi pesan), merupakan formula kunci dari masa simulasi (*Electronic simulation*), yang menunjukkan televisi melebur dalam kehidupan. Sehingga acara-acara televisi sering dicontoh oleh pemirsa mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan kemudian televisi menjadi ikutan (agama) bagi masyarakat. Maka ketika televisi menyiarkan atau mempertontonkan perilaku kekerasan, seks dan pornografi pada bentuk acara film, berita, sinema, drama di televisi maka ada kecenderungan masyarakat juga akan meniru dan melakukan apa yang diajarkan oleh televisi

Dari survey yang dilakukan oleh Kompas, 14 Januari 2008, siaran televisi 30%-nya mengandung acara sinetron, dan 39% berbentuk iklan. Sementara itu isi dari sinetron kita, menurut Sosiologi tidak memiliki visi yang baik, miskin akal dan budi dan hanya mengandung motif menghibur, mempertontonkan kepura-puraan, emosi yang tidak terkendali, rasa takut, amarah dan tidak memiliki nilai positif.

Sejalan dengan itu Seto Mulyadi dan Rusdi Muchtar (Kompas 15 Januari 2008) menjelaskan sinetron amatlah membahayakan anak-anak, karena mengandung acara pornografi, kekerasan dan mistik yang membuat anak tidak terdorong menggunakan akal dan pikirannya. Sementara itu departemen komunikasi dan informasi menjelaskan tayangan televisi hanya berkisar pada 0,07%, dari total acara yang ditayangkan setiap hari.

Maka kemudian pemerintah, khususnya lembaga yang ditunjuk untuk itu berusaha agar berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar ini lebih kondusif khususnya muatan konten acara televisi

2. Pengelolaan Lembaga Pendidikan yang Profesional

Lembaga pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pendidikan di Indonesia. Pada jenjang pendidikan mulai dari tahun 2002 - 2008, Depdiknas mencatat, tahun 2006 terdapat 28 juta anak usia sekolah sedang menyelesaikan pendidikannya di berbagai jenjang pendidikan sebagai mana terlihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Jumlah Siswa Berdasar Jenjang Pendidikan dan Pertumbuhan setiap tahunnya

Tahun	SD	Tumbuh	SLTP	Tumbuh	SLTA	Tumbuh	PT
2002	28 926 377	0	9 429 969	0	5 912 944	0	3 118 333
2003	29 051 104	0,40%	9 514 017	0,90%	5 941 787	4,00%	4 001 191
2004	29 092 130	0,10%	9 586 753	0,80%	6 175 328	3,90%	4 001 192
2005	29 149 746	0,20%	9 681 802	1,00%	6 311 395	2,20%	3 284 289
2006	28 982 708	-0,60%	10 286 521	6,20%	6 511 288	3,20%	3 189 038

Sumber Kompas, 26 Januari 2007

Dari data tabel 6.1 di atas dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan memiliki jumlah siswa yang signifikan banyaknya. Dengan demikian lembaga pendidikan merupakan institusi yang amatlah penting dalam menciptakan daya saing bangsa ke depan. Lembaga ini harus dikelola dengan baik dengan menggunakan pola manajemen modern yang terencana. Memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas, dan terarah.

Pemerintah perlu membuat panduan agar, lembaga pendidikan menjadi lembaga yang efektif dan berfungsi secara baik dalam menciptakan output pendidikan dengan kemampuan bersaing yang tinggi. Ada beberapa unsur pendidikan yang mendukung atas kesuksesan hasil belajar peserta didik diantaranya adalah pendidik, siswa itu sendiri, kurikulum, tujuan pendidikan, sarana dan prasarana belajar siswa termasuk administrasi pendidikan. Input yang baik, dan diproses secara benar dalam proses pembelajaran maka diharapkan menghasilkan output SDM yang memiliki keunggulan bersaing yang tinggi dalam komunitas global.

Variabel-variabel itu saling mempengaruhi, dan menentukan kualitas output pendidikan yang akan dihasilkan. Sistem pembelajaran dipandu oleh sistem kurikulum, penyusunan kurikulum mestilah mempertimbangkan filosofi pendidikan yang dianut oleh bangsa. Terdapat kandungan kepentingan bangsa dalam menciptakan anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan, keilmuan, ahlak dan budi pekerti yang tinggi. Pelaksanaan kurikulum harus didukung oleh tenaga pendidikan yang berkompeten, memiliki integritas serta didukung oleh sarana dan prasarana pembelajaran agar proses belajar berlaku secara optimum.

Pada era globalisasi ini hendaklah setiap jenjang pendidikan selalu melakukan evaluasi diri atas proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dunia yang selalu berubah, kadang-kadang perubahan lingkungan eksternal itu lebih cepat dibandingkan dengan sistem pembelajaran di jenjang pendidikan sehingga tamatan pendidikan kadang kala tidak siap dan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Sekolah harus selalu mendorong agar memungkinkan siswa belajar tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual.

Perubahan yang terjadi pada lingkungan teknologi, perusahaan, sosial dan politik mesti direspon oleh lembaga pendidikan dengan melakukan penyesuaian secukupnya khususnya pada kajian-kajian empiris. Secara legal menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa beretika (beradab dan berwawasan budaya bangsa Indonesia) memiliki nalar (maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab), berkemampuan komunikasi sosial (tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, demokratis) dan berbadan sehat sehingga menjadi manusia mandiri.

Lebih lanjut terjemahkan dalam bentuk tujuan pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan yakni sebagai berikut :

1. Pendidikan Dasar bertujuan : Tumbuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha Esa, tumbuh sikap beretika dengan sopan santun dan beradab, tumbuh penalaran yang baik (mau belajar, ingin tahu, senang membaca, memiliki inovasi, beinisiatif dan bertanggung jawab), tumbuh kemampuan komunikasi/sosial (tertib, sadar aturan, dapat bekerja sama dengan teman dapat berkompetensi dan tumbuh kesadaran untuk menjaga kesehatan badan.
2. Pendidikan menengah umum bertujuan : memiliki keimanan dan bertaqwa terhadap Tuhan yang maha Esa mulai mapan, memiliki etika (sopan santun dan beradab), memiliki penalaran yang baik (dalam kajian materi kurikulum, kreatif, inisiatif serta memiliki tanggung jawab) dan penalaran sebagai penekannya, kemampuan berkomunikasi/sosial (tertib, sadar aturan dan perundang-undangan, dapat bekerjasama, mampu bersaing, toleransi, menghargai hak orang lain, dapat berkompromi dengan baik.
3. Pendidikan menengah kejuruan : memiliki keimanan dan bertaqwa terhadap Tuhan yang maha Esa mulai mapan, memiliki etika (sopan santun dan beradab), memiliki penalaran yang baik terutama dalam bidang keahliannya(mengerjakan keterampilan khusus, inovatif, dalam arah tertentu, kreatif dalam bidangnya,

, inisiatif dalam bidangnya, serta memiliki tanggung jawab terhadap karyanya) dan keterampilan sebagai penekannya, kemampuan berkomunikasi/sosial (tertib, sadar aturan dan perundang-undangan, dapat bekerjasama, mampu bersaing, toleransi, menghargai hak orang lain, dapat berkompromi dengan baik dan dapat mengurus diri sendiri.

Upaya pendidikan pada jenjang sekolah, diharapkan bisa membangkitkan karsa generasi muda, mengurangi sifat kemalasan dan meningkatkan etos kerja dan semangat kerja yang tinggi dan meningkatkan melek huruf, informasi dan teknologi.

Sistem pendidikan pada jenjang sekolah mestilah memiliki karakteristik lokal, nilai kebangsaan dan membangun paradigma pada kecerdasan finansial. Pembangunan paradigma kecerdasan finansial ini merupakan solusi atas rendahnya karsa, rendahnya produktivitas masyarakat dan terbiasanya generasi muda sekarang dengan kebiasaan konsumtif atau pola hidup hura-hura.

Pembangunan karakter hemat dan cerdas finansial merupakan adopsi pada teori siklus kehidupan dan spirit dan motivasi yang dikembangkan oleh Robert T. Yosaki tentang bagaimana orang tua kaya mengajarkan kepada anaknya bagaimana menggunakan uang dan bagaimana orang tua miskin tidak mengajarkan kepada anaknya cara menggunakan uang.

Generasi muda perlu diberikan pembelajaran tata cara belanja, bagaimana cara memperbanyak aset dan berbisnis (wirausaha). Kurikulum wirausaha dengan tujuan kecerdasan finansial mesti menjadi salah satu materi penting dalam proses pembelajaran di tingkat sekolah, sehingga diharapkan lahir generasi muda dengan spirit wirausaha dan spirit produktif untuk kejayaan bangsa.

E. Upaya Rumah Tangga

Siklus kehidupan seorang manusia, dimulai dari bayi, anak-anak, memasuki masa remaja, dewasa, dan

tua. Dalam proses siklus hidup itu secara ekonomi, mestilah direncanakan secara baik. Badan Pusat statistik biasanya mengkategorikan umur produktif dan non produktif, umur produktif berada pada kisaran 10 tahun – 65 tahun.

Teori konsumsi siklus hidup merupakan Perilaku rumah tangga dalam mengambil keputusan konsumsi sepanjang hidup yang didasarkan pada harapan atas pendapatan seumur hidup (Case, 2003). Setelah sampai pada fase produktif dan membentuk keluarga (rumah tangga), manusia adakalanya mengkonsumsi lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan sehingga muncul pinjaman atau APC (*average propensity to consume*), jika APC lebih besar dari 1 maka harus ada pinjaman untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Dan juga bisa terjadi APC lebih kecil dari 1 maka rumah tangga bisa menabung dan jika APC lebih kecil dari 1 pada masa perjalanan hidup maka pada masa tua akan menikmati dana tabungan atau pensiun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 6.2 berikut ini : Teori konsumsi Siklus Hidup

Gambar 6.2 Teori Konsumsi Siklus Hidup, sumber (Case. 2003:271)

Dalam tahun kerja awal, umur 20 tahun orang mengkonsumsi lebih banyak dari pada pendapatan (*income*). Diantara dua masa itu orang menghemat (*saving*) konsumsi lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan untuk melunasi

hutang pinjaman dan mengumpulkan tabungan untuk masa datang (masa tua).

Franco Modigliani (1950-an, dalam Mankiw, 2000) menjelaskan pendapatan dalam kehidupan seseorang selalu bervariasi seperti yang digambarkan pada kurva teori siklus konsumsi pendapatan, tabungan dapat menggerakkan pendapatan di masa hidupnya. Ketika pendapatan tinggi ke masa hidup dalam periode rendah yang dikenal dengan hipotesis daur hidup (*Life cycle hypothesis*). Pendapatan riil yang bisa dibawa pulang oleh rumah tangga (*disposable income*) merupakan pendapatan dikurangi dengan pajak. Setiap pendapatan yang diperoleh diakumulasikan dalam bentuk tabungan maka rumah tangga akan memiliki sejumlah kekayaan (*aset*). Idealnya rumah tangga memiliki kekayaan yang lebih besar dari hutang (kewajiban)nya sehingga memiliki kekayaan positif (Case, 2003). Kekayaan positif di masa mendatang dimungkinkan terjadi jika perilaku konsumsi masa sekarang bisa dijaga, dihemat dan ditabungkan dan kemudian dibelanjakan pada kekayaan yang produktif dan memiliki nilai bertambah pada masa mendatang. Perilaku rumah tangga tidak terlepas dari pemahaman dan pengetahuan kepala rumah tangga tentang melek ekonomi/finansial. Kemampuan rumah tangga menyisihkan pendapatan sekarang (Y) untuk sebagian konsumsi (*consumption*/ C) dan tabungan (*saving*/ S) bisa diformulasikan dengan $Y = C + S$. Jika akumulasi S dibelanjakan dalam bentuk kekayaan produktif bisa dikategorikan sebagai Investasi (I). Investasi merupakan pembelanjaan sekarang untuk mendapatkan pendapatan dimasa mendatang. Semakin banyak S digunakan untuk menambah kekayaan (aktiva) dalam bentuk investasi memungkinkan rumah tangga dimasa pensiun akan memperoleh pendapatan permanen atau *pasif income*.

Lebih lanjut, Kiyosaki (2000) menawarkan ide untuk memotivasi rumah tangga untuk menggunakan uang (*income*) dengan cerdas, menabung, menggunakan tabungan untuk menambah asset sehingga dihasilkan pemasukan di masa mendatang. Rumah tangga atau masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dan keunggulan daya saing bangsa. Upaya nyata yang harus dilakukan adalah meningkatkan sumber-sumber

penghasilan rumah tangga. Konsekwensinya rumah tangga mesti meningkatkan keterampilan dan keahlian sehingga mendapatkan upah yang lebih besar, menggunakan waktu senggang (*leisure*), menghemat pengeluaran konsumsi barang dan membelanjakan pada kekayaan yang akan menghasilkan *income non tenaga kerja* (*property*), "*permanent income*" atau "*pasif income*". Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah menggunakan sebagian pendapatan berinvestasi pada pendidikan anak modal sosial keluarga.

Rumah tangga kelas bawah yang terdiri dari buruh, tani dan nelayan, pada umumnya penghasilan yang diperoleh banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Kebutuhan untuk tabungan dan pendidikan anak kadang-kadang terabaikan. Dengan demikian sangat diperlukan pengetahuan yang luas dan kesadaran yang tinggi, kepala rumah tangga untuk mengatur perekonomian rumah tangga, agar pendidikan anak bisa terjamin dengan baik. Implikasinya diperlukan suatu masa pada saat anak-anak berada pada usia sekolah orang tua hidup berhemat, harus mengurangi masa senggang dan menggunakan waktu senggang untuk kerja sampingan. Usaha lain yang bisa dilakukan oleh keluarga kelas bawah adalah mengurangi jumlah anak. Walaupun cara ini dinilai oleh beberapa kalangan masyarakat bertentangan dengan nilai agama, namun harus disadari bahwa meninggalkan anak dalam keadaan yang lemah juga suatu pelanggaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengurangan jumlah anak bagi keluarga miskin akan menjamin ketersediaan gizi dan pendidikan bagi anak.

Rumah tangga memiliki peran penting dalam menciptakan pendidikan bangsa yang berdaya saing. Rumah tangga idealnya mestilah mengalokasikan potensi dananya untuk dibelanjakan kepada pembiayaan pendidikan anak. Anak merupakan aset orang tua, anak merupakan harapan dan anak merupakan kasih sayang dan amanah dari Tuhan yang harus dijaga oleh orang tua. Perhatian yang serius dari orang tua kepada anak bukan hanya sekedar memberkan nafkah fisik berupa makan dan minum tapi lebih dari itu. Orang tua memiliki kewajiban untuk mempertinggi taraf kehidupan anak di kemudian hari.

Bagi keluarga yang kaya dana tidaklah menjadi persoalan, termasuk juga kesadaran untuk menyekolahkan anak. Kerawanan pendidikan anak justru terjadi pada keluarga miskin. Rumah tangga miskin pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat tinggal, dan transportasi sehingga sebagian besar rumah tangga tidak memiliki kesanggupan dalam membiayai pendidikan anak.

Dengan demikian anak dari keluarga kurang mampu menghadapi dua bentuk persoalan utama dalam melanjutkan pendidikan, yakni kemampuan akademis yang rendah dan diiringi dengan kemampuan keuangan orang tua yang juga rendah. Inilah persoalan utama dalam meningkatkan tingkat pendidikan anak bangsa, khususnya pada rumah tangga miskin. Beberapa pemikiran berikut ini perlu dipertimbangkan, yakni:

1. Rumah tangga perlu menyusun pengeluaran rumah tangga dengan pola berhemat, menggunakan kemampuan finansial untuk kebutuhan minimal dan mengalokasikan sebagian dana untuk menyekolahkan anak. Cara ini tentu saja harus diiringi dengan pengetahuan dan kesadaran yang tinggi dari kepala rumah tangga dan ibu atas makna dan hakekat pendidikan bagi anak.
2. Rumah tangga perlu membangun hidup berkelompok dan berjaringan dengan sistem arisan atau di beberapa daerah ada istilah "*badoncek*" pada masyarakat Pariaman di Sumatera Barat. Setiap induk pada suatu kaum memusyawarahkan secara bersama tatacara pembiayaan menyekolahkan anak dan kemenakan, mamak keluarga memiliki peran penting dalam memusyawarahkan persoalan itu dengan anggota suku dan masing-masing anggota memberikan iuran dan sumbangannya pada usaha untuk menyekolahkan anak dan kemenakan.
3. Cara yang lain yang bisa dilakukan oleh anak keluarga miskin adalah dengan cara merantau (*migration*). Jika seseorang belum memiliki sumber penghasilan atau pekerjaan yang tetap ada baiknya dilakukan pola "*berinduk semang*" pada keluarga yang memiliki usaha.

Cara ini efektif mengembangkan dan mempertinggi taraf kehidupan anak dikemudian hari. Biasanya juga dikembangkan dengan sistem magang. Seperti yang dilakukan di pola restoran rumah makan Padang. Setelah seseorang magang beberapa tahun di rumah makan tersebut, terasa sudah paham dengan tatacara bisnis kemudian anak diperkenankan membuka sendiri bisnis rumah makan di tempat lain. Akibatnya, rumah makan berkembang di seluruh penjuru nusantara restoran "*Rumah Makan Padang*" ada disepanjang jalan-jalan dan pemukiman penduduk.

F. Kesimpulan

1. Peningkatan lama penduduk bersekolah merupakan usaha untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga penduduk memiliki keahlian khusus, dan basis teknologi untuk mengembangkan diri dan meningkatkan produktivitas disetiap pekerjaan dan akan mempertinggi tingkat upah yang akan diterima oleh seseorang, sehingga kesejahteraan rumah tangga bisa ditingkatkan.
2. Upaya pemerintah dengan menaikkan alokasi anggaran untuk pembiayaan proses pembelajaran memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat pendidikan penduduk dan kemampuan rumah tangga untuk menyekolahkan anak pada usia sekolah. Dengan mempertinggi tingkat pendidikan penduduk akan mempertinggi ukuran pembangunan manusia khususnya ukuran variabel lama bersekolah penduduk, tingkat melek huruf sehingga juga akan mempertinggi indeks pembangunan manusia sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan daya saing bangsa.
3. Sistem pendidikan dengan paradigma pembangunan karakter dan peningkatan kompetensi akan mampu membangkitkan karsa, mengurangi kemalasan dan mempertinggi melek huruf, informasi dan teknologi generasi muda serta memiliki keahlian khusus (spesifikasi) sehingga memiliki nilai tambah untuk bersaing. Perlunya membangun sistem pendidikan berbasis pada potensi masyarakat dalam bentuk transformasi nilai, pengetahuan

dan keahlian sehingga terbentuk jaringan yang saling menguntungkan .

G. Saran-Saran dan Implikasi

1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan taraf pendidikan penduduk merupakan usaha yang perlu dilakukan untuk mempertinggi tingkat daya saing bangsa. Untuk itu, disarankan agar pembangunan Indonesia difokuskan pada upaya mempertinggi akumulasi modal sumber daya manusia (*human capital*) melalui politik anggaran yang memadai dan sosialisasi yang terus-menerus akan makna pendidikan bagi penduduk, khususnya penduduk miskin
2. Perlunya perhatian yang lebih serius dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan pengelolaan kelembagaan pendidikan yang berbasis pada sekolah dengan keterlibatan orang dan masyarakat secara umum. Waktu siaran pendidikan pada televisi publik perlu dipertinggi durasinya dan memberikan panduan yang lebih operasional kepada pihak media dan masyarakat perfilman untuk memasukkan unsur nilai pada semua acara yang disiarkan.
3. Sistem pendidikan pada jenjang sekolah haruslah membangkitkan karsa mengurangi kemalasan dan mempertinggi melek huruf, informasi dan teknologi generasi muda serta memiliki keahlian khusus (spesifikasi) sehingga memiliki nilai tambah untuk bersaing.

Daftar Pustaka

- Bahrum, Syamdul. 2008. Perspektif Islam dalam Paradigma Globalisasi. <http://syamsulbahrum.web.id/> di download tanggal 24 Februari 2008.
- Barney, J. 1991. Firm resources and sustained competitive advantage, *Journal of Management*. 17(1), 99-120
- Becker, Gary S., 1962. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis," *Journal of Political Economy* LXX: 9 - 49.
- _____. 1975. *Human Capital : a theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. -- 2d ed. -- New York: National Bureau of Economic Research: distributed by Columbia University Press, LB2321.B27 74-83469
- Becker, Gary S. Murphy, Kevin N. Tamura, Robert F. (1990) Human Capital, Fertility and Economic Growth: Working Paper No. 3414. <http://home.uchicago.edu/~gbecker/papers/>
- Bellante, don dan Mark Jackson (1990) *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta : LP FE- UI Jakarta (edisi Indonesia)
- BPS, Bappenas UNDP, 2001, *Laporan Pembangunan Manusia 2001*, Jakarta : BPS, Bappenas, UNDP Indonesia
- Briggs, Asa & Peter Burki. 2006. *Sejarah Sosial Media*, penerjemah A Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Case, Karl E dan Ray C. Fair (2004) *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, alih bahasa, Berlian Muhamad. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia
- Dalyono, M .1997. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Delliarnov, 2007. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Depdiknas (2005), *Tanya Jawab Sekitar Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta : Direktorat Jenderal

- Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Elfindri (2001) *Ekonomi SDM*. Padang : Penerbit Universitas Andalas
- Gemmel, Norman.(1992) *Ilmu Ekonomi Pembangunan, beberapa survey*. Jakarta: Pustaka LPES (alih bahasa. Nirwono), kontributor artikel tentang penelitian ini Colin Kirkpatrick, Arne Bigsten, Frederick nixson, Subrata Ghatak
- Ghatak, Subrata.1992. *Ilmu Ekonomi Pembangunan, Pertanian dan Pembangunan Pertanian*. Jakarta : LP3ES.
- Gie, The Liang. 1994.*Cara Belajar yang Efisien buku I* Yogyakarta: Liberti
- _____. 1995.*Cara Belajar yang Efisien, Sebuah Buku Pegangan Untuk Mahasiswa Indonesia buku II*. Yogyakarta:
- Grant, R. 1991. The resource-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation. *California Management Review*. (spring) 112-135
- Greene, P. & Brown, T. 1997. Resource needs and the dynamic capitalism typology.*Journal of Business Venturing*. 12(3):161-174
- Hardwick, Philip, Langmead, John, Jhan, Khan, Bahadur. 1999. *An Introduction to Modern Economics*. England. Prentice Hall.
- Hill, Hal.(2002) *Ekonomi Indonesia*.Jakarta : PT RajaGrafindo Persada (penerjemah Tri Wibowo BS & Hadi S)
- Hitt, Michael A, Ireland, R Duane, Hoskisson, Robert. 2001. *Manajemen Strategi*,Edisi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Hurlock, elizabet B.Alih (Bahasa Istiwidayanti).1992. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Hun, Young Koh,2008, *Korea Saja Bisa, Apalagi Indonesia*. Jakarta: Kompas, tanggal 26 Januari 2007
- Idrus,M.S. 1997. *Strategi : Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi dan Keunggulan Bersaing*. Malang : Makalah tidak dipublikasikan
- ISEI Padang, (2006) *Kumpulan Makalah Seminar Regional maslah pasar kerja sebagai pendorong investasi*,

- Padang : ISEI cabang Padang
- Jalal, Fasli dkk (2003) Reformasi dan Kebijakan Pendidikan di Otonomi Daerah. Jakarta :
- Jhingan, M.L.2003, Ekonom Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kadarusman, YB dkk.2004. Makro Ekonomi Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama dan Limlit Ekonomi IBII
- Keputusan menteri pendidikan nasional (2002) Kepmendiknas Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Jakarta : Departemen Pendidikan nasional RI.
- Keynes, Jhon Maynard.(1991) Teori Umum Mengenai Kesempatan Kerja, Bunga dan Uang/Edisi Indonesia, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.(terjemahanWillem H. Makaliwe)
- Kirchhoff, B. 1994. Entrepreneurship and Dynamic Capitalism. Westport, CT: Praeger
- Koenjaraningrat. 2002. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kompas, 2008, Sinetron bahayakan anak, dan Sinetron kita miskin akal budi. Jakarta : Tanggal 14 dan 15 Januari 2008
- Lains, Alfian.2003. Ekonometrika Teori dan Aplikasi,Jakarta: LP3S
- Lipsey, Richar G, Steiner, Peter O, dan Purvis, Douglas D (1992) Pengantar Mikro Ekonomi Jilid II. (Alih bahasa, Jaka Wasana dan Kirbrandoko). Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mankiw N. Gregory. 2000. Teori Ekonomi Makroekonomi/ Edisi Indonesia. Jakarta: Erlangga (alih bahasa Umam nurmawan).
- Mangkuatmodjo, Soegyrto. (2004) Statistik Lanjutan. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- Miller, Roger le Roy. 1997. Teori Ekonomi mikro Intermediate/edisi Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo. (terjemahan Haris Munandar
- Mujiran, Paulus (2007) Meningkatkan Peran Komite Sekola, Jaakarta : Dunia Guru.com

- Nicholson, Walter. 2002. Mikroekonomi intermediate dan aplikasi : alih bahasa Ign Bayu mahendra. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Nirwana, Herman. dkk. 2005. Belajar dan Pembelajaran. Padang:FIP UNP.
- Pindyk, Robert S. and Daniel Rubinfeld (2005) Mikroekonomi, (edisi Indonesia, Nia Kurnia dewi. Jakarta : PT Indeks.
- Prayitno, Elida. 1989. Motivasi dalam Belajar. Jakarta: Debdikbud.
- Santoso, Budi Tri Wibowo. 2002. Ekonomi Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Samuelson, Paul A & William D Nordhaus. 2003. Mikroekonomi, Edisi Indonesia. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Sanderson, Stepen K. 2003. MakroSosiologi,alih bahasa Farid Wajidi dan S Menno. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Soewardi, Herman. 1999. Roda Berputar Dunia Bergulir, Kognisi Baru tentang Timbul Tenggelamnya Sivilisasi. Bandung : Bakti Mandiri.
- Subari, Mulyadi, 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukmadinata, Nana Syaodih.2005. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Suryosubroto. 1997. Proses Belajar Mengajar di Sekolah. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Suryadi,Ace (2003). Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah: MewujudkanSekolah-sekolahyang mandiri dan otonom. Jakarta : www.Depdiknas.go.id.
- Suparlan, (2007) Program Pemberdayaan Komite Sekolah. Depok. www.Depdiknas.go.id.
- Stiglitz, Joseph E. 2003. Dekade Keserakahan era -90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi,penerjemah AanSuhaeni. Jakarta: PT Cipta Lintas Wacana
- Todaro, Michel P. 2003. Pembangunan Ekonomi,edisi Indonesia. Jakarta: Erlangga. (alih bahasa : Harris munandar)
- Truett, Lila J & Dale B. Truett (1987) Microeconomics, S.T

Louis : Times Mirror/Mosby College Publisng
Undang-undang - RI Nomor. 2004. nomor : NOMOR 14
TAHUN 2004 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta
Undang-undang - RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jakarta
Winkel,WS.1996. Psikologi Pengajaran.Jakarta : PT
Gramedia Widiasarana Indonesia
www/Uharsputra.Wordpress.com, di didownload
tanggal 24 September 2007

Tentang Penulis

Yulhendri, S.Pd., M.Si., lahir di Tombang /Pasaman, 25 Mei 1977, Kuliah di IKIP Padang dan menamatkan S1 di UNP tahun 2001 jurusan pendidikan ekonomi-akuntansi, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Program Magister (S2) studi Program studi PPN Perencanaan Pembangunan Universitas Andalas tamat tahun 2005. Dan pada tahun 2007 kembali belajar, pada program doktoral di Universitas Negeri Malang (UM). Pengalaman internasional pernah mengikuti program persahabatan pemuda ASEAN- Jepang di Kyoto, Osaka, Nagasaki dan Ehime prefecture tahun 2003 dan kursus riset dan metodologi di *The University of Queensland* tahun 2008.

Semasa kuliah Penulis dikenal sebagai pegiat koperasi, di Koperasi mahasiswa, tetapi tidak meninggalkan kesempatan belajar menjadi aktivis organisasi kepemimpinan mahasiswa mulai dari Himpunan mahasiswa jurusan, senat fakultas, senat perguruan tinggi, unit kegiatan riset pengembangan ilmu dan penalaran, serta pernah juga aktif dalam gerakan reformasi 1998-2000 di presidium Dewan Eksekutif mahasiswa UNP periode 1999-2000. Disamping itu penulis juga aktif bergaul dalam aktivis antar perguruan tinggi dalam diskusi keislaman dan keilmuan di himpunan mahasiswa islam. Disamping menjadi penggerak organisasi, penulis juga aktif dalam menulis di-media daerah dan nasional diantaranya Singgalang, Padang Ekspres, Haluan, Media Indonesia untuk menaburkan ide-ide kritis dan konstruktif untuk kebangkitan bangsa. Penulis juga pernah Juara I Nasional dalam lomba karya tulis Perkoperasian yang diadakan oleh UNJ dan Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2001 dan juga aktif di gerakan Koperasi Indonesia Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO) (Induk nasional Koperasi Mahasiswa/Pemuda Indonesia) Pimpinan Paripurna Pusat Dewan Koperasi Indonesia untuk periode 2004- 2009. dan sejak Januari 2005, Penulis mengabdikan di Universitas Negeri Padang menjadi Dosen pada Fakultas Ekonomi dan sekarang. Pada tanggal 7 Februari 2004, Yulhendri menikah dengan Nora Susanti, sekarang telah dikarunia tiga orang anak: Aulia Henora Putri (alm): Alifya Sofy Riputra panggilan IFY san (sayang ayah nak), (umur : 2 tahun 9) bulan dan Sidqilansyah Rahmadi Singkwan panggilan Rama-san (9 bulan).

Saat ini penulis mengabdikan diri menjadi pendidik dan tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi - Universitas Negeri Padang. Sering berkiriman dan menerima surat di E-mail dan facebook di: Yulhendrisutan@yahoo.co.id (elektronik) atau dapat juga dikunjungi di www.yulhendriunp.blogspot.com

PEMBANGUNAN EKONOMI

Pasar, Struktur Ekonomi, Pendidikan dan Pengurangan
Kemiskinan

YULHENDRI

Pada era pemerintahan reformasi sekarang, ada kecenderungan para perancang kebijakan kebanyakan berasal dari ekonom yang pro pasar. Mereka meyakini bahwa pasar sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan. Namun mereka lupa bahwa pasar juga memiliki keterbatasan, khususnya pada ketidakterpenuhan kondisi Indonesia saat ini pada asumsi pasar persaingan sempurna. Perekonomian yang mengandalkan pasar akan menyebabkan ketidakadilan ekonomi yang semakin tinggi, karena pelaku ekonomi di pasar tidak memiliki kemampuan finansial dan informasi yang sama. Disamping itu, pasar juga menimbulkan eksternalitas negatif diantaranya adalah kesenjangan, polusi, pengangguran dan kemiskinan. Buku ini mencoba memaparkan tentang pasar, dan kegagalan pasar menciptakan keadilan ekonomi. Pada bagian kedua mencoba menelaah kondisi perekonomian Indonesia dan dilanjutkan dengan faktor pendidikan dalam perekonomian, dan perlunya penciptaan pelaku ekonomi yang rasional.

Tentang Penulis

Yulhendri, S.Pd., M.Si., lahir di Tombang /Pasaman, 25 Mei 1977, Kuliah di IKIP Padang dan menamatkan S1 di UNP tahun 2001 jurusan pendidikan ekonomi-akuntansi, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Program Magister (S2) Program studi PPN Perencanaan Pembangunan Universitas Andalas tamat tahun 2005. Dan pada tahun 2007 kembali belajar, pada program doktoral di Universitas Negeri Malang (UM). Pengalaman internasional pernah mengikuti program persahabatan pemuda ASEAN- Jepang di Kyoto, Osaka, Nagasaki dan Ehime prefecture tahun 2003 dan kursus riset dan metodologi di The University of Queensland tahun 2008. Saat ini penulis mengabdikan diri menjadi pendidik dan tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi - Universitas Negeri Padang. Alamat penulis di E-mail dan facebook : Yulhendrisutan@yahoo.co.id (elektronik) atau dapat juga dikunjungi di www.yulhendriunp.blogspot.com

ISBN 978-979-8587-79-5

9789798587795

PENERBIT UNP PRESS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Jln. Prof Hamka Air Tawar Padang
Telp. (0751) 7051260, 7055689 Fax (0751) 7055628